

Addressing Challenges

Shaping Future Progress



Daftar Isi

Table of Contents

01 Addressing Challenges, Shaping Future Progress
Addressing Challenges, Shaping Future Progress

02 Sekilas PT PII
IIGF at a Glance

06 Proses Bisnis PT PII
IIGF Business Process

08 Visi, Misi & Tujuan
Vision, Mission & Objectives

09 Nilai-nilai Utama: InTIME
Core Values: InTIME

10 Sejarah Perusahaan & Jejak Langkah
Company History & Milestones

12 Strategi Pengembangan
Jangka Panjang PT PII
IIGF Long-Term Growth Strategy

13 Ikhtisar Keuangan
Financial Highlights

14 Peristiwa Penting dan Penghargaan 2012
Event Highlights and Awards 2012

19

Laporan
Dewan Komisaris
Report from
the Board of
Commissioners



25

Laporan
Direksi
Report from the
Board of Directors



32

Membangun Landasan
untuk Melangkah Pasti
ke Depan
Building Our Capacity
to Move Ahead
Confidently



34 Kapasitas Penjaminan
Guarantee Capacity

36 Project & Guarantee Consultation
Project & Guarantee Consultation

37 Sumber Daya Manusia
Human Resources

41 IIGF Institute
IIGF Institute

42

Mencapai Kemajuan
di Tengah Tantangan
Addressing
Challenges while
Delivering Progress



44 Proyek PLTU
Power Plant Project

45 Proyek Kereta Api Batu Bara
Coal Railway Project

46 Proyek Sistem Penyediaan Air Minum
Clean Water Supply Project

47 Proyek PLTU Mulut Tambang
Mine-Mouth Power Plant Project

49 Proyek dalam Proses
Projects in the Pipeline

50

Tinjauan Keuangan
Financial Review

58

Penerapan Tata
Kelola Perusahaan
Good Corporate
Governance
Implementation

70

Pengelolaan Risiko
Risk Management

80

Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
Corporate Social
Responsibility

85

Laporan Keuangan
Financial Statements

143

Data Perusahaan
Corporate Data

Addressing Challenges,

Shaping Future Progress

Tahun 2012 memberikan tantangan tersendiri bagi PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), atau PT PII, dalam upayanya mendukung pembangunan proyek-proyek infrastruktur dengan skema kerja sama pemerintah dan swasta. Di tengah berbagai tantangan tersebut, PT PII terus membangun dan memperkuat kapabilitas internal perusahaan dan sekaligus mencatat berbagai kemajuan dalam mendorong proses-proses pengembangan sejumlah proyek infrastruktur yang potensial. Berbagai pencapaian tersebut menggarisbawahi keyakinan PT PII akan kemampuannya memenuhi misi penting yang diemban dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia.

The year 2012 presented considerable challenges for Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF) in its efforts to support public-private partnership scheme for infrastructure projects. In the face of those challenges, IIGF continued to strengthen and enhance its internal capabilities as well as achieving solid progress on a number of viable and potential infrastructure projects. Thus, IIGF remains confident of its ability to fulfill its crucial role in supporting infrastructure development in Indonesia.

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), atau PT PII, yang didirikan oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 30 Desember 2009, adalah suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola penyediaan penjaminan risiko pada proyek infrastruktur dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS).

Dalam melaksanakan mandatnya, PT PII berperan dalam kerangka Kebijakan Satu Pelaksana (*Single Window Policy*), yang dimaksudkan untuk mewujudkan akuntabilitas, transparansi serta konsistensi dalam pemberian jaminan dan pemrosesan klaim, guna meningkatkan kepercayaan investor untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek infrastruktur di Indonesia, namun dengan tetap menjaga kepentingan Pemerintah, utamanya terkait kewajiban kontinjensi yang mungkin timbul kepada Pemerintah akibat pemberian penjaminan pemerintah.

Sekilas PT PII

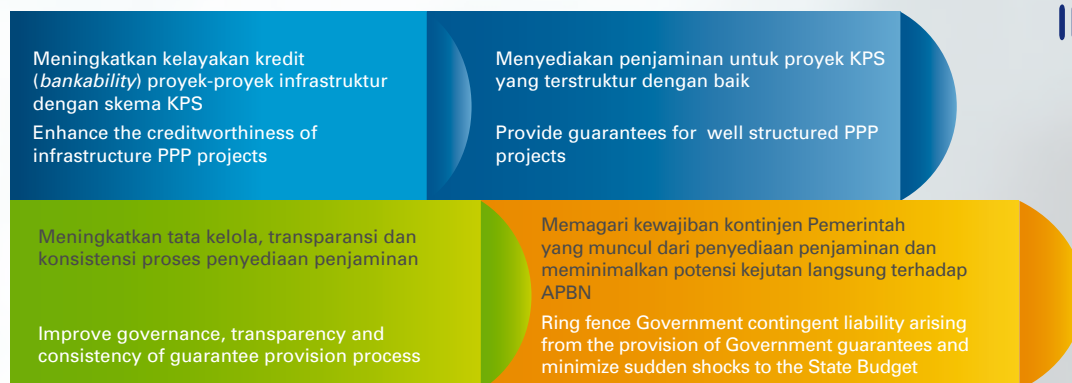
IIGF at a Glance

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) or Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF), is a State-Owned Enterprise established on 30 December 2009 by the Government of Indonesia to manage the provision of guarantee for risks in infrastructure projects under the Public Private Partnership (PPP) scheme.

In carrying out its mandate, IIGF plays its role under the Single Window Policy framework, which is aimed to ensure accountability, transparency and consistency in guarantee provisioning and claim processing, in order to improve market confidence to participate in infrastructure projects in Indonesia, while at the same time safeguarding the interest of the Government, particularly related to potential contingent liability to the Government vis-a-vis government guarantees.



Mekanisme Satu Pelaksana untuk Penjaminan Infrastruktur Single Window Policy for Infrastructure Guarantee



Hingga saat ini, Pemerintah telah melakukan penyertaan modal dari APBN ke PT PII sebesar Rp 4,5 triliun (sekitar USD 500 juta). PT PII secara bertahap akan mengurangi ketergantungan pada APBN, dan akan meningkatkan kapasitas penjaminannya melalui kerja sama dengan berbagai institusi keuangan, baik institusi multilateral (Bank Dunia, ADB, IDB, MIGA), institusi bilateral, maupun lainnya.

Up to now, the Government of Indonesia has injected capital from the State Budget of Rp 4.5 trillion (approximately USD 500 million) into IIGF. IIGF will gradually reduce its dependence on the State Budget, and increase its guarantee capacity through cooperation with several financial institutions such as multilateral agencies (World Bank, ADB, IDB, MIGA), bilateral institutions, and others.

Nilai tambah dari keberadaan PT PII diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pemangku kepentingan utama.

The value proposition of IIGF is expected to provide benefits to various key stakeholders.

Manfaat bagi Indonesia:

- Mendukung pembangunan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas dengan skema KPS
- Menjembatani kesenjangan pendanaan bagi pembangunan infrastruktur

Benefits for Indonesia:

- Support economic growth through the development of quality infrastructure using PPP scheme
- Bridge the funding gap for the development of infrastructure projects

Manfaat bagi Penanggung Jawab Proyek Kerjasama/PJPK (Pemerintah Pusat/Daerah, BUMN/BUMD):

- Menarik minat sektor swasta untuk berpartisipasi
- Memfasilitasi tercapainya tujuan-tujuan PJPK
- Mendorong kompetisi dalam proses tender proyek sehingga menghasilkan proposal proyek yang lebih berkualitas dengan harga bersaing

Benefits for Contracting Agency/CA (Central/Regional Government, SOEs, Regional Government-Owned Enterprise):

- Attract private sector participation
- Facilitate the achievement of CA's objectives
- Encourage fair competition in project procurement process, to obtain higher quality projects and competitive costs

Manfaat bagi sektor swasta:

- Mitigasi risiko bagi sektor swasta yang tidak dapat diperoleh dari pasar
- Peningkatan transparansi, kejelasan dan konsistensi proses evaluasi dan pemberian penjaminan bagi proyek
- Peningkatan *bankability* dari proyek
- Memperpanjang jangka waktu pinjaman, yang berdampak pada harga penawaran (*bid*) yang lebih kompetitif
- Memberikan insentif bagi PJKP untuk membuat kontrak yang memenuhi praktik yang berlaku umum/internasional

Tahapan pemberian penjaminan PT PII meliputi:

- **Konsultasi/Bimbingan:** Memberikan informasi rinci tentang penjaminan oleh PT PII, seperti kriteria penjaminan, proses yang harus dilakukan untuk memperoleh jaminan, contoh perjanjian konsesi, dan sebagainya
- **Penyaringan:** Mengevaluasi Formulir Penyaringan (*Screening Form*) yang disampaikan PJKP kepada PT PII untuk menentukan kualifikasi proyek atau eligibilitas dalam memperoleh jaminan berdasarkan regulasi atau ketentuan yang ada. Beberapa kriteria umum antara lain: termasuk sektor yang tercantum dalam Perpres No. 67/2005 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 13/2010 dan Perpres No. 56/2011; proyek selaras dengan prioritas Pemerintah dan dokumentasi proyek telah disiapkan oleh tenaga ahli yang kredibel
- **Penilaian:** Melakukan evaluasi kelayakan (*Appraisal*) proyek secara rinci dari aspek legal, teknik, ekonomi dan keuangan, serta lingkungan dan sosial, termasuk juga evaluasi terhadap kemampuan PJKP untuk memenuhi kewajiban finansialnya sesuai perjanjian konsesi
- **Penstrukturan:** Menetapkan struktur penjaminan (*Guarantee Structuring*) serta menyusun ketentuan dan kondisi penjaminan, misalnya jangka waktu, kewajiban finansial dan risiko yang dijamin, yang disesuaikan untuk masing-masing proyek KPS

Benefits for the private sector:

- Mitigate risks that are otherwise not covered by the market
- Improve transparency, clarity and consistency in appraisal and guarantee provision process for project
- Improve project bankability
- Extend the tenor of funding from lenders which results in more competitive bids
- Provide incentive for CAs to formulate project contracts according to generally-accepted or international practice

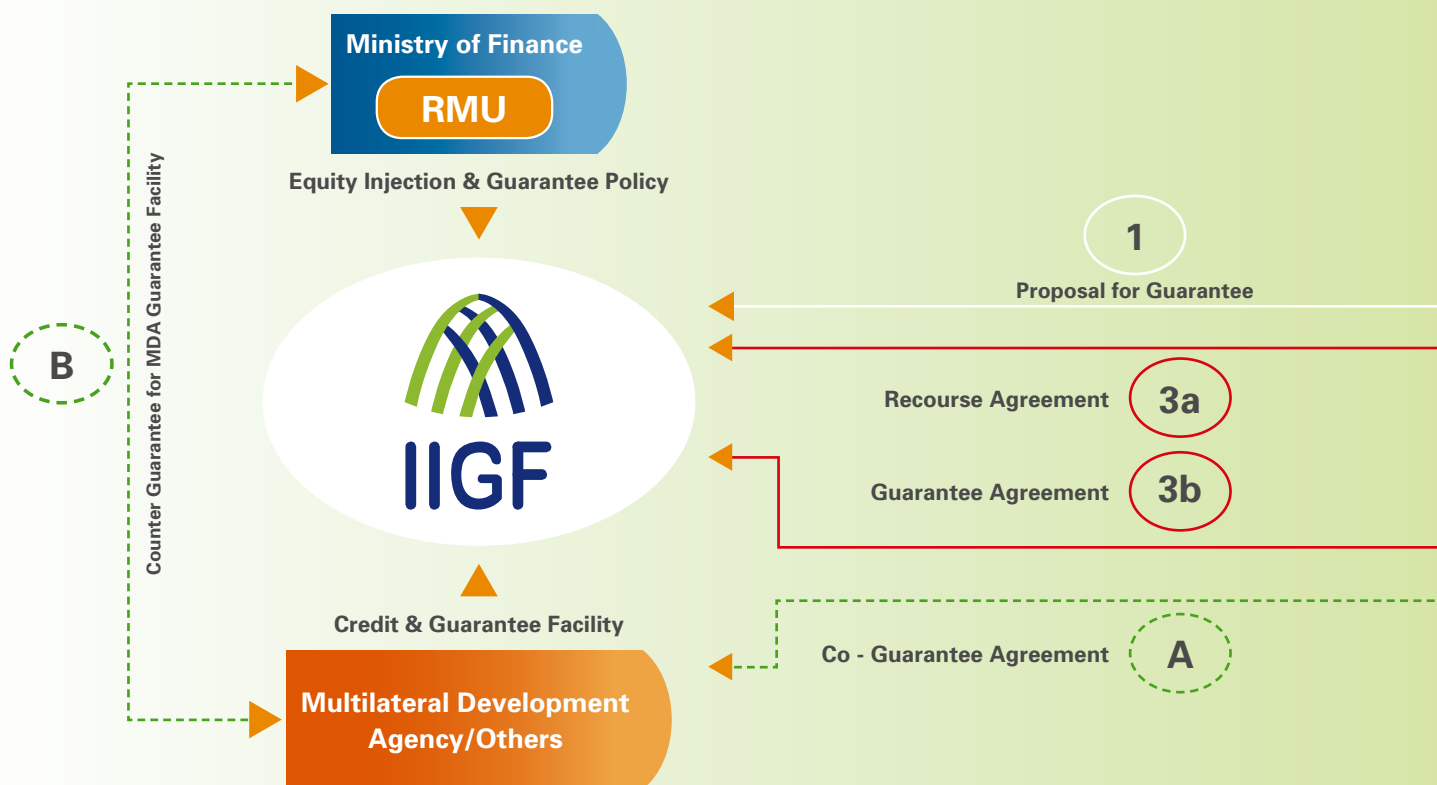
Stages in IIGF guarantee provisioning are as follows:

- **Consultation/Guidance:** Provide detailed information on IIGF's guarantee provision, such criteria for guarantee, the guarantee provision process, sample concession agreement, etc.
- **Screening:** Evaluate the Screening Form submitted by CA to determine project qualification or eligibility in obtaining a guarantee based on existing regulations. The general criteria includes among other things, the sectors named in Presidential Regulation (Perpres) No. 67/2005, as subsequently amended by Perpres No. 13/2010 and Perpres No. 56/2011; that the project is in line with the Government's priority; and that project documentation has been prepared by professional credible experts
- **Appraisal:** Conduct detailed assessment of project feasibility in various aspects i.e.: on legal, technical, economic and financial, as well as social and environment aspects, and also evaluate of CA's ability to meet its financial obligation under the concession agreement
- **Structuring:** Determine the guarantee structure as well as terms and conditions, such as the guarantee period, financial obligation and risk coverage to be guaranteed, customized for each PPP project

Proses Bisnis PT PII

IIGF Business Process

Proyek KPS tipikal mencakup perjanjian-perjanjian seperti berikut ini:
A typical PPP project involves the following agreements:



PT PII dapat menjamin berbagai kewajiban financial PJPK yang telah dialokasikan kepada PJPK berdasarkan Perjanjian KPS

Allocation of Risks in a PPP Agreement – an Illustration

PC	Shared	CA
A		
B*		
C		
	D	
	E*	
		F
		G*
		H*

*) Risk that leads to certain financial obligation of the bearer

Possible IIGF Guarantee Coverage

Examples:

- CA Payment Obligations
 - Inability to Pay
 - Unwillingness to Pay
- Early Termination/Other Payment Obligations due to Government Actions/Inactions, such as:
 - Change in Law
 - Expropriation
 - Currency Inconvertibility/Non Transfer
 - Force Majeure Affecting CA

PC: Project Company
CA: Contracting Agency

Note:

B will exist only if **A** exist, i.e. when **A** become part of guarantee structure provided to investor

Contracting Agency
(Ministry, SOE,
Regional Govt)

2

PPP Agreement

**Project Company/
Investor**

IIGF may provide coverage of various CA's financial Obligations which have been allocated to CA under PPP Agreement



Transport

Toll Roads

Electricity

Water Supply

Waste Water

Selected Telecom

Irrigation

Selected Oil & Gas

Sectors: As per Presidential Regulation No. 67/2005 **

visi_{vision}

Menjadi penyedia penjaminan yang memainkan peran penting dalam menarik modal swasta untuk pembangunan infrastruktur dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

To be a guarantee provider that plays a pivotal role in attracting private capital for infrastructure development to accelerate Indonesia's economic growth.

mission_{mission}

- Menyediakan produk-produk penjaminan melalui proses bisnis yang transparan dan baik.
- Melaksanakan kebijakan satu pelaksana dalam proses pemberian jaminan dengan modal yang kuat dan manajemen yang profesional.
- Meningkatkan kelayakan kredit proyek infrastruktur Indonesia.
- To provide guarantee products through transparent and robust business processes.
- To implement a "Single Window" policy in guarantee provision through a solid capital base and professional management.
- To improve the creditworthiness of infrastructure projects in Indonesia.

tujuan_{objectives}

- Meningkatkan kelayakan kredit dan kualitas proyek-proyek infrastruktur KPS melalui kerangka evaluasi dan pengelolaan klaim atas penjaminan.
- Meningkatkan tata kelola dan transparansi pelaksanaan penyediaan penjaminan.
- Memfasilitasi keberhasilan transaksi bagi PJP (Kementerian, BUMN, Pemda) melalui penyediaan penjaminan bagi proyek KPS yang distruktur dengan baik.
- Memagari kewajiban kontingen Pemerintah dan meminimalkan kejutan langsung kepada APBN.
- To improve creditworthiness and quality of PPPs in infrastructure projects by establishing a clear and consistent appraisal and claim framework for guarantees.
- To improve the governance and transparency of guarantee provision.
- To facilitate the deal flow for Contracting Agencies (i.e. Ministries, SOEs, Regional Governments) by providing guarantees to well-structured PPPs.
- To ring-fence Government contingent liability and minimize sudden shock to State Budget.

Nilai-Nilai Utama: InTIME

Core Values: InTIME

“INTEGRITY” (INTEGRITAS)

1. Bekerja dengan standar etika tertinggi
2. Jujur terhadap diri sendiri maupun orang lain dalam segala urusan
3. Mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi, golongan dan/ atau pihak-pihak lain
4. Menjaga komitmen dalam melaksanakan tugas
5. Mentaati aturan perusahaan
6. Bertanggung jawab dalam seluruh tindakan

“TEAM WORK” (KERJA SAMA)

1. Beroperasi sebagai sebuah tim
2. Memberi kontribusi ketrampilan dan pengetahuan demi kepentingan tim
3. Mengutamakan kepentingan tim untuk mencapai tujuan perusahaan

“THINK BIG” (BERPIKIRAN LUAS)

1. Memiliki pemikiran luas dan mutakhir
2. Mempertimbangkan berbagai alternatif untuk hasil yang lebih baik bagi perusahaan dan bagi pemangku kepentingan
3. Menggali secara terus menerus ide-ide baru untuk perkembangan perusahaan
4. Terbuka terhadap berbagai perkembangan yang ada di lingkungan demi hasil terbaik tanpa meninggalkan prinsip tata kelola yang baik

“MUTUAL TRUST” (SALING PERCAYA)

1. Memegang teguh etika bisnis bersama seluruh komponen internal perusahaan maupun dengan mitra perusahaan
2. Konsisten memenuhi standar layanan yang dijanjikan
3. Mempercayai dan menghormati satu sama lain dengan itikad baik untuk mendapatkan kepercayaan dari rekan-rekan kerja dan mitra bisnis

“EXCELLENCE” (KEUNGGULAN)

1. Berkomitmen untuk menjadi yang terunggul dalam melaksanakan apapun yang dilakukan
2. Berusaha untuk melakukan perbaikan yang terus-menerus
3. Memiliki pengetahuan mendalam guna mendukung kegiatan dan mendapatkan hasil yang melebihi harapan

INTEGRITY

1. To work with the highest standard of ethics
2. To be honest with oneself or other persons in all interactions
3. To put the interest of the Company above the interest of the individual, group and/or other parties
4. To maintain commitment in the execution of one's duties
5. To always comply with company regulations
6. To always be responsible in all actions

TEAM WORK

1. To operate as a team
2. To contribute in skills and knowledge for the benefit of the team
3. To uphold the interest of the team in striving for company's objectives

THINK BIG

1. To be broad-minded and cognizant of the latest issues
2. To consider alternatives that can led to improved results for the benefit of the company and stakeholders
3. To strive at all times for innovations for the progress of the company
4. To be receptive to current developments in the work environment that can led to the best results while adhering to the principles of good governance

MUTUAL TRUST

1. To uphold the highest of business ethics with all components within the company as well as with business partners
2. To consistently fulfil the agreed service level standard
3. To trust and respect one another in good faith in order to earn the confidence of co-workers and business partners

EXCELLENCE

1. To commit to be the best in all of one's endeavor
2. To strive for continuous improvement
3. To develop comprehensive and thorough knowledge that can support one's work and deliver results that are above expectation

Sejarah Perusahaan & Jejak Langkah

Company History & Milestones

'09

Pembentukan PT PII

Pada tanggal 30 Desember 2009, Pemerintah Indonesia mendirikan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), atau PT PII, sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Penempatan Modal Negara sebesar Rp 1 triliun sesuai PP no 35 tahun 2009, sebagai modal dasar ditempatkan dan disetor penuh.

Establishment of IIGF

On 30 December 2009, the Government of Indonesia established PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), or Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF) as a State-Owned Enterprise (SOE) through a State Capital Injection of Rp 1 trillion as paid-up capital., referring to Government Regulation no 35/2009.

'10

Peresmian Operasional PT PII

Pada tanggal 11 Mei 2010, PT PII secara resmi mulai beroperasi sesuai mandatnya untuk menyediakan penjaminan bagi proyek-proyek infrastruktur dalam skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) sebagai salah satu upaya percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

IIGF Operational Commencement On 11 May 2010, IIGF officially commenced with its operations as mandated, in the provision of guarantee facilities for infrastructure projects under the Public Private Partnership (PPP) scheme as an effort to accelerate infrastructure development in Indonesia.

'10

Peraturan Presiden No. 78/2010

Terbitnya Peraturan Presiden No. 78/2010 tanggal 21 Desember 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur menandakan dimulainya era baru proses penjaminan infrastruktur di Indonesia.

Presidential Regulation No. 78/2010

The issuance of Presidential Regulation No. 78/2010 dated 21 December 2010 on Guarantees for Infrastructure Projects in Partnership of Government and Private Sector Through an Infrastructure Guarantee Business Entity marked the beginning of a new era in the process of infrastructure guarantees in Indonesia.

'10

Peraturan Menteri Keuangan No. 260/PMK.011/2010

Pada tanggal 31 Desember 2010, Menteri Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha, yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Presiden No. 78/2010.

December 31, 2010, Regulation of the Minister of Finance No. 260/2010

On 31 December 2010, the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia issued Regulation of Ministry of Finance No. 260/PMK.011/2010 on Directive for Infrastructure Guarantees in Partnership Projects of Government and Private Sector, as the implementing regulation for Presidential Regulation No. 78/2010.

'10

Penambahan Penyertaan Modal Negara 2010

Pada akhir Desember 2010, Pemerintah RI menambah Penyertaan Modal Negara (PMN) di PT PII sebesar Rp 1 triliun, merujuk pada PP No. 88/2010, sehingga total (PMN) menjadi Rp 2 triliun.

Additional State Equity Participation 2010

At end of December 2010, the Government of Indonesia made an additional Capital Injection from State Budget (PMN) into IIGF in the amount of Rp 1 trillion, as stipulated in Government Regulation (PP) No. 88/2010, making for a total PMN of Rp 2 trillion.

Keberadaan PT PII merupakan bagian dari upaya Pemerintah RI untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur, yang diperlukan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, melalui penyediaan fasilitas penjaminan bagi proyek infrastruktur dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS).

The establishment of IIGF is part of the efforts by the Government of Indonesia to facilitate the development of infrastructure needed to support national economy growth, through the provision of guarantee facilities for infrastructure projects developed under the Public Private Partnership (PPP) scheme.

'11

Acuan Alokasi Risiko

Pada bulan Maret 2011, PT PII menerbitkan dokumen Acuan Alokasi Risiko yang berisi kategori dan distribusi risiko infrastruktur yang akan menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam skema KPS untuk proyek infrastruktur.

Risk Allocation Guidelines

In March 2011, IIGF published a Risk Allocation Guidelines document, which defines the infrastructure risk category and distribution as a reference for stakeholders in infrastructure project under PPP scheme.

'11

Panduan Penyediaan Penjaminan Infrastruktur

PT PII juga meluncurkan dokumen Panduan Penyediaan Penjaminan Infrastruktur yang bertujuan memberikan ilustrasi tentang langkah-langkah dalam proses pemberian penjaminan infrastruktur oleh PT PII.

Infrastructure Guarantee Provision Guidelines

IIGF also published the Infrastructure Guarantee Provision Guidelines document that illustrates the various steps in the processing of infrastructure guarantee provision by IIGF.

'11

PLTU Jawa Tengah

Pada tanggal 6 Oktober 2011, PT PII menandatangani Perjanjian Penjaminan untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 x 1.000 MW di Batang, Jawa Tengah, yang menjadi proyek pembangunan infrastruktur skema KPS pertama yang berhasil diwujudkan oleh Pemerintah menggunakan fasilitas penjaminan bersama oleh PT PII dan Kementerian Keuangan RI.

Central Java Power Plant

In October 6, 2011, IIGF signed the Guarantee Agreement for the Central Java Coal-Fired Power Plant 2 x 1,000 MW located in Batang, Central Java, which represented the first PPP infrastructure development project successfully implemented by the Government of Indonesia using a joint guarantee facility provided by IIGF and the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

'11

Penambahan Penempatan Modal Negara

Pada tanggal 31 Desember 2011, Pemerintah RI meningkatkan jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh PT PII melalui tambahan Penempatan Modal Negara sebesar Rp 1,5 triliun, sesuai dengan PP no 55/2011, untuk memperkuat kapasitas penjaminan PT PII menjadi total Rp 3,5 triliun.

Additional State Equity Participation

In 31 December 2011, the Government of Indonesia has increased the fully placed and paid-up capital of IIGF through an additional Rp 1.5 trillion of State Capital Injection, referring to Government Regulation no 55/2010, strengthening the guarantee capacity of IIGF to Rp 3.5 trillion.

'12

Penambahan Penempatan Modal Negara

Perusahaan telah menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 1 triliun pada tanggal 17 Desember 2012 sehingga total kapasitas penjaminan menjadi Rp. 4,5 triliun.

Additional State Equity Participation

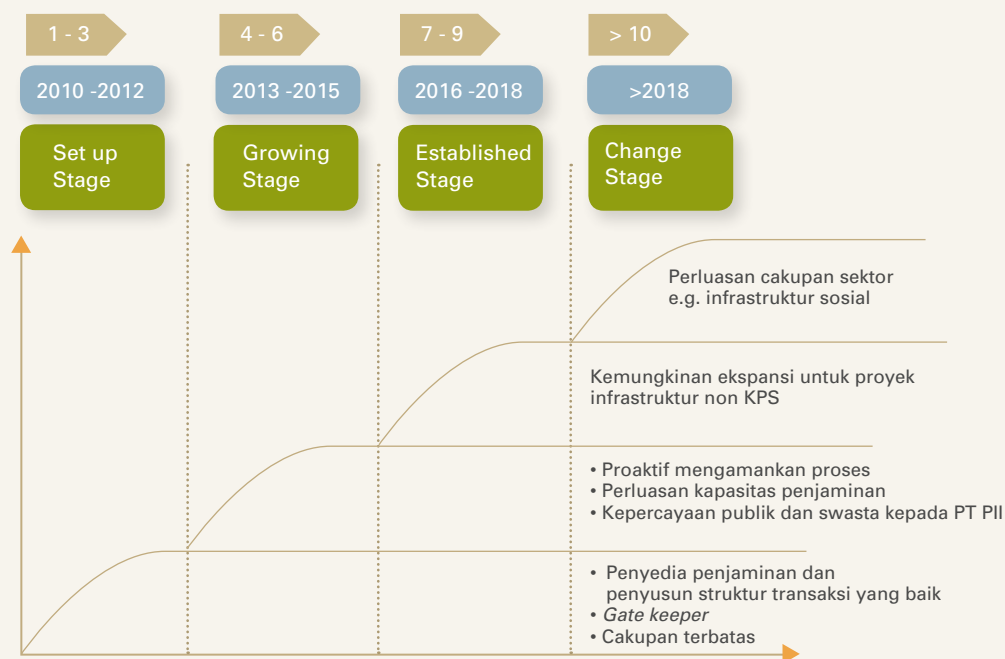
The Company received additional State Equity Participation (PMN) of Rp 1 trillion on December 17, 2012, strengthening its guarantee capacity to a total of Rp 4.5 trillion.

Strategi Pengembangan Jangka Panjang PT PII

IIGF Long-Term Growth Strategy

PT PII telah merumuskan sebuah *road-map* strategi yang membagi rencana pengembangan PT PII dalam empat tahapan utama.

IIGF has formulated a strategy road map that defines IIGF's long term growth plans, into four principal stages.



- **Tahap Persiapan:** PT PII akan meletakkan landasan serta dasar-dasar proses penjaminan, sekaligus memastikan *good governance* dalam melakukan penilaian terhadap kelayakan suatu proyek yang akan diberikan penjaminan.
- **Tahap Pertumbuhan:** PT PII akan berusaha mendapatkan kepercayaan publik dan sektor swasta atas perannya, memperluas jenis risiko yang dapat dijamin Perusahaan serta meningkatkan kapasitas penjaminan.
- **Tahap Pematangan:** PT PII akan melakukan ekspansi penjaminan di luar proyek-proyek Kerjasama Pemerintah Swasta.
- **Tahap Perubahan:** PT PII akan melakukan ekspansi penjaminan diluar proyek infrastruktur ekonomi.

- **Set-up Stage:** IIGF will lay the foundation and the basic principles of the underwriting process, while ensuring good governance in assessing the feasibility of any project that will receive underwriting.
- **Growth Stage:** IIGF will strive to earn the trust of the public and private sector in its role, expand the types of risks that the Company can underwrite and improve its underwriting capacity.
- **Established Stage:** IIGF will expand its underwriting activities beyond Public-Private Partnership projects.
- **Transformation Stage:** IIGF will expand its underwriting beyond economic infrastructure projects.

Ikhtisar Keuangan

Financial Highlights

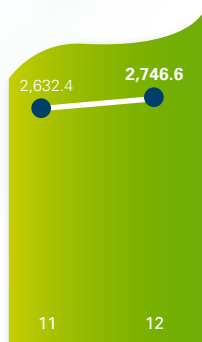
Angka-angka pada seluruh tabel dan grafik dalam Laporan Tahunan ini menggunakan notasi bahasa Inggris Rp000

Numerical notations in all tables and graphs in this Annual Report are in English Rp000

	2012	2011	
Laba Rugi Komprehensif			Comprehensive Income
Pendapatan Operasi	312,240,468	228,349,244	Operating Revenue
Beban Operasi	50,666,380	37,218,439	Operating Expenses
Laba Sebelum Pajak	261,574,088	191,130,805	Profit Before Income Tax
Laba Bersih	213,378,069	157,141,089	Net Income
Jumlah Pendapatan Komprehensif	214,778,786	157,657,468	Total Comprehensive Income
Neraca			Balance Sheet
Kas dan setara kas	2,746,643,432	2,632,388,309	Cash and Cash Equivalent
Penempatan Investasi Dana	2,142,262,853	1,078,119,828	Investment Fund Placement
Jumlah Aset Lainnya	77,931,051	28,122,990	Other Total Assets
Jumlah Aset	4,966,837,336	3,738,631,127	Total Assets
Kewajiban	49,720,071	34,842,648	Liabilities
Ekuitas	4,917,117,265	3,703,788,479	Equity
Laporan Arus Kas			Cash Flow Statement
Arus Kas Operasi	179,653,661	176,871,698	Cash Flow from Operations
Arus Kas Investasi	1,064,620,365	1,050,423,285	Cash Flow from Investment
Arus Kas Pendanaan	999,221,827	1,499,992,765	Cash Flow from Financing
Rasio			Ratio
Marjin Laba Operasi	83.8%	82.1%	Operating Profit Margin
Marjin Laba Bersih	68.3%	68.8%	Net Profit Margin
ROE	5.47%	7.0%	ROE

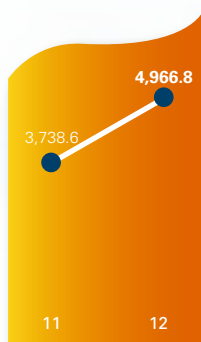
Kas dan Setara Kas Earnings Assets-Net

Rp Jutaan | Rp Million



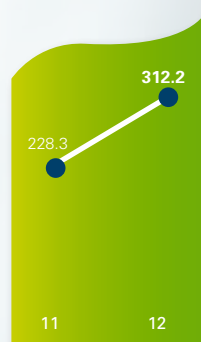
Jumlah Aset Total Assets

Rp Jutaan | Rp Million



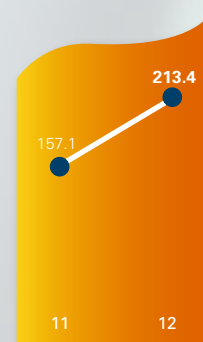
Pendapatan Operasi Operating Revenue

Rp Jutaan | Rp Million



Laba Bersih Net Income

Rp Jutaan | Rp Million



Peristiwa Penting dan Penghargaan 2012

Event Highlights and Achievements 2012

10 jan

Acara Infrastructure Day di Batang, Jawa Tengah, dimana PT PII menyumbangkan perangkat komputer dan buku-buku perpustakaan untuk 10 Sekolah Dasar di Batang.

Infrastructure Day in Batang, Central Java, where IIGF donated PCs and library books to 10 Elementary School in Batang.

26 jan

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham membahas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2012.

IIGF General Meeting of Shareholders to discuss the Company's Work Plan and Budget for 2012.

28 feb

PT PII menandatangani Nota Kesepahaman dengan PT PLN (Persero) tentang kerja sama persiapan Proyek PLTU Mulut Tambang Sumsel 9 dan Sumsel 10.

IIGF signed a Memorandum of Understanding with PT PLN (Persero) concerning the cooperation in the preparation for Sumsel-9 and Sumsel-10 Coal-Fired Mine-Mouth Power Plant project.



08 may

PT PII menerima hasil diagnostic assessment dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang penerapan GCG di PT PII.

IIGF received the results of the diagnostic assessment on GCG implementation at IIGF conducted by the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP).

11 may

Kunjungan dan Rapat Kerja Menteri Keuangan di kantor PT PII.

Visit and work meeting with the Minister of Finance at IIGF office.



12 jul

PT PII bersama Gubernur Kalimantan Tengah menyaksikan penandatanganan Deklarasi Komitmen terhadap Transportasi Batubara di Palangkaraya.

IIGF and the Governor of Central Kalimantan witnessed the signing of the Declaration of Commitment to Coal Railway Transportation in Palangkaraya.

18 jul

Lokakarya Proyek Rel KA Batubara Kalimantan Tengah dengan pemangku kepentingan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, BKPM dan Bappenas.

03 feb

Acara kick-off Sosialisasi
Nilai-nilai Perusahaan dan
Kode Etik Perusahaan.

Kick-off meeting for
the socialization of IIGF
Corporate Values and Code
of Conduct.

25 apr

Lokakarya pembentukan
Joint Monitoring
Committee (JMC) untuk
Proyek PLTU Jawa Tengah.

Workshop on the
establishment of the Joint
Monitoring Committee
(JMC) for the Central Java
Power Plant project.

30 apr

PT PII dan Islamic Corporation for
Insurance of Investment and Export
Credits (ICIEC, IDB) telah menandatangani
Nota Kesepahaman bersama dengan
acara Asia Finance and Risk Mitigation
Forum 2012 di Makati City, Filipina.

IIGF and the Islamic Corporation for
Insurance of Investments and Export
Credit have signed a Memorandum
of Understanding during the Asia
Finance and Risk Mitigation Forum
2012 in Makati City, the Philippines.



14 jun

Penyelenggaraan
Rapat Umum
Pemegang Saham
Tahunan 2011.

The 2011 Annual
General Meeting of
Shareholders.

18 jun

Direktur Utama PT PII
menjadi pembicara dalam
acara tahunan PPP in
Emerging Market Summit
di Kuala Lumpur, Malaysia.

IIGF President Director as
speaker at the annual event
PPP in Emerging Market
Summit in Kuala Lumpur,
Malaysia.

Workshop on the Central Kalimantan Coal
Railway project with stakeholders from
the Ministry of Transportation, Ministry
of Forestry, Coordinating Ministry of
Economy, Investment Coordinating Board
(BKPM) and the National Development
Planning Board (Bappenas).



02 agt

PT PII menjadi sponsor dan
pembicara pada Investor Forum:
Indonesia Infrastructure Fiscal
Policy Support and Update di
Singapura yang diselenggarakan
bersama dengan Kementerian
Keuangan RI.

IIGF was a sponsor and
speaker at the Investor Forum:
Indonesia Infrastructure
Fiscal Policy Support and
Update held in Singapore
and organized jointly with the
Ministry of Finance.

11 agt

Pemerintah RI menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2012 tentang tambahan Penyertaan Modal Negara sebesar Rp 1,0 triliun, sehingga total modal disetor PT PII menjadi Rp 4,5 triliun.

The Government of Indonesia issued Government Regulation No. 68 Year 2012 on the additional State Equity Participation of Rp 1.0 trillion in IIGF, resulting in fully paid-in capital of Rp 4.5 trillion.

28 agt

PT PII berpartisipasi dalam Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition (IIICE) di Jakarta Convention Center, Jakarta.

IIGF participated at the Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition (IIICE) at the Jakarta Convention Center, Jakarta.

12 sep

PT PII menjadi pembicara dan partisipan dalam Forum Koordinasi Percepatan Investasi Proyek Infrastruktur yang diselenggarakan oleh BKPM di Bali.

IIGF was a participant and speaker at the Coordinating Forum for the Acceleration of Investments in Infrastructure Projects organized by the Investment Coordinating Board (BKPM) in Bali.

8 nov

PT PII mendapatkan rating AA+ dari Fitch Rating untuk pemeringkatan domestik (*unpublished*).

IIGF was rated AA+ for domestic rating (*unpublished*) by Fitch Rating.

13 nov

PT PII dan Overseas Private Investment Corporation dari Amerika Serikat menandatangani Nota Kesepahaman mengenai kerja sama untuk mendukung proyek infrastruktur.

IIGF and the Overseas Private Investment Corporation from the United States have signed a Memorandum of Understanding on cooperation for investments in infrastructure projects.



27 nov

Soft launching IIGF Institute dan penandatanganan Nota Kesepahaman antara PT PII dengan tiga perguruan tinggi yaitu Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung dan Universitas Gadjah Mada tentang program peningkatan pemahaman dan kapasitas pemangku kepentingan terhadap penyediaan infrastruktur.

Soft launch of IIGF Institute and the signing of MoU between IIGF and three universities (Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung and Universitas Gadjah Mada) on the program to increase knowledge and capacity of stakeholders concerning the provision of public infrastructure.



PT PII memenangkan Gold Award untuk Laporan Tahunan 2011 di kategori Financial Services Company pada Vision Award Annual Report Competition 2012 yang diselenggarakan oleh League of American Communications Professional di Amerika Serikat. Untuk seluruh kategori, PT PII menempati urutan 74 dunia.

IIGF won the Gold Award for the 2011 Annual Report in the Financial Services Company category at the Vision Award Annual Report Competition 2012 organized by the League of American Communications Professional in the US. In the overall category, IIGF placed 74th among the global entries.



28-30 agt

PT PII mendapatkan penghargaan untuk 'Best Booth' pada acara Indonesia International Infrastructure Conference & Exhibition (IIICE) 2012 yang berlangsung di Jakarta.

IIGF receives an award for 'Best Booth' at the Indonesia International Infrastructure Conference & Exhibition (IIICE) 2012 held in Jakarta

18 sep

Direktur Utama PT PII menjadi pembicara dalam Korean PPP Roadshow di Jakarta yang diselenggarakan oleh Pemerintah Korea bekerjasama dengan Bappenas.

IIGF President Director was a speaker at the Korean PPP Roadshow in Jakarta organized jointly by the Government of Korea and Bappenas.

30 oct

Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) melalui lokakarya untuk guru-guru Sekolah Dasar di Kotamadya Bandar Lampung.

Workshop for Elementary School teachers in Bandar Lampung organized as an implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) program.



15 nov

PT PII berpartisipasi dalam Annual Asia & Middle East Government Funds Roundtable ke-5 di Singapura.

IIGF participated at the 5th Annual Asia & Middle East Government Funds Roundtable in Singapore.



13 dec

Rapat Kerja PT PII membahas Rencana Strategis 2013 - 2017 dan Rencana Kerja 2013.

Work meeting of IIGF to discuss the 2013-2017 Strategic Plan and the 2013 Work Plan.

Proyek KPS PLTU Jawa Tengah yang didukung oleh fasilitas penjaminan yang disediakan oleh PT PII tercatat sebagai salah satu proyek KPS dalam 'Top 40 PPPs in Emerging Markets' untuk kawasan Asia Timur, Pasifik dan Asia Selatan, dalam laporan Emerging Partnership yang diterbitkan oleh Infrastructure Journal bekerja sama dengan IFC.

The Central Java Power Plant PPP project that is supported with a guarantee facility provided by IIGF is mentioned among the PPP projects in 'Top 40 PPPs in Emerging Markets' in the East Asia, Pacific and South Asia region, in the Emerging Partnership report published by Infrastructure Journal in collaboration with the IFC.



Freddy Rikson Saragih
Komisaris Utama
President Commissioner

Laporan Dewan Komisaris

Report from the Board of Commissioners

PT PII telah mencapai banyak kemajuan sepanjang tahun 2012 dalam pengembangan kapasitas internal organisasi, termasuk penguatan aspek tata kelola perusahaan. Hal ini memperkuat keyakinan Dewan Komisaris akan kemampuan PT PII dalam menjadikan tahun 2013 sebagai “Tahun Implementasi” untuk mewujudkan transaksi penjaminan bagi proyek-proyek infrastruktur yang kini tengah ditangani.

Throughout 2012, IIGF has made considerable progress in developing internal organizational capacity, including enhancement of corporate governance aspect. Thus, the Board of Commissioners is fully confident that IIGF will be able to turn 2013 into the ‘Year of Implementation’ in realizing guarantee transactions for a number of ongoing infrastructure projects.



dari kiri ke kanan | from left to right:

Freddy Rikson Saragih

Komisaris Utama | President Commissioner

Ayu Sukorini

Komisaris | Commissioner

Pemegang saham yang terhormat,

Tahun 2012 merupakan tahun ketiga PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), atau PT PII, beroperasi komersial secara penuh sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur untuk mendukung pembangunan proyek infrastruktur dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) di Indonesia.

Dalam tahapan-tahapan pengembangan PT PII yang dirancang pada saat berdirinya, tahun 2012 merupakan akhir dari tahap pertama yaitu Tahap Persiapan (Set Up Stage). Dewan Komisaris berbesar hati dapat melaporkan bahwa secara keseluruhan, tahapan tersebut telah dapat diselesaikan dengan cukup baik oleh PT PII.

Sebagaimana telah kami singgung dalam Laporan Tahunan sebelumnya, salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan skema KPS untuk pembangunan infrastruktur adalah menyangkut perubahan paradigma yang diperlukan di kalangan pemangku kepentingan, yaitu dari penyediaan layanan infrastruktur menggunakan anggaran belanja negara menjadi pengadaan proyek dalam kemitraan antara sektor publik dan swasta. Ini merupakan salah satu intensi Pemerintah dengan menggulirkan kebijakan tentang KPS, selain tentunya sebagai opsi untuk mendanai kebutuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia yang meningkat pesat.

Penilaian Dewan Komisaris terhadap Kinerja Direksi

Dilihat dari sudut pandang tersebut, Direksi telah menunjukkan kemampuannya untuk bergerak cepat menyikapi kenyataan yang ada di lapangan menyangkut keterbatasan pengetahuan, kemampuan maupun kesiapan Penanggung Jawab Pelaksana Proyek (PJPK) sebagai pemilik proyek untuk menstruktur proyek-proyek yang *bankable* dan layak secara komersial, sebagai salah satu pra-syarat untuk memperoleh penjaminan dari PT PII. Dewan Komisaris khususnya mencatat langkah strategis Direksi untuk 'bergerak ke hulu' (*move upstream*) dalam ikut serta meningkatkan kapabilitas PJPK untuk merealisasikan transaksi KPS dan aktif terlibat dalam penyusunan struktur dan pengadaan proyek.

Inisiatif ini yang diwujudkan melalui pembentukan fungsi Project Guarantee & Consultation (PGC) dalam struktur Perseroan adalah merupakan upaya

Dear shareholders,

The year 2012 is the third year for PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), or the Indonesian Infrastructure Guarantee Fund (IIGF), in full commercial operation as infrastructure guarantee fund for the development of infrastructure projects under the Public Private Partnership (PPP) scheme. in Indonesia

According to its long-term development roadmap, 2012 constitutes the end of the first growth stage, namely the Set Up Stage. The Board of Commissioners is pleased to report that the IIGF, on the whole, has performed in a satisfactory manner and completed its set up stage as planned.

As we mentioned in our previous Annual Report, one of the biggest challenges in implementing the PPP scheme is the required paradigm shift among related stakeholders, from the provision of public infrastructure funded by the state budget to the development of infrastructure in a partnership between the public and the private sector. This entails to a certain degree of improvement in the handling of public sector project procurement, and is one of the intentions behind the Government's policy regarding the use of PPP scheme, in addition to the need for alternative funding to provide for greatly increased infrastructure development in Indonesia.

Board of Commissioners' Evaluation of Board of Directors' Performance

As seen in that context, therefore, we commended the responsiveness of the Board of Directors in anticipating the relative limitations on the part of Contracting Agencies (CA) as owners of infrastructure projects, with regard to their knowledge, capability or readiness in structuring bankable and commercially viable projects that would be eligible for guarantee coverage by IIGF. In particular, the Board of Commissioners endorsed the strategic initiative taken by the Board of Directors to 'move upstream' to assist the CAs in improving their project transaction capability through active involvement in the processes for PPP project structuring and procurement.

This initiative takes the form of the establishment of the Project Guarantee & Consultation (PGC) function within the organization. Our aim here is to

membangun suatu model atau standar bagi dokumen dan struktur proyek yang dapat dijamin oleh PT PII, sehingga dapat mengakselerasi penyiapan proyek oleh PJPk dan selanjutnya dibawa ke pasar.

Kemajuan penting lain di tahun 2012 adalah dilakukannya *diagnostic assessment* atas pelaksanaan praktik GCG di Perseroan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasil dari *diagnostic assessment* tersebut memberikan gambaran yang jelas atas langkah-langkah perbaikan yang diperlukan, untuk kemudian ditindak-lanjuti sesuai dengan prioritasnya maupun ketersediaan sumber daya perusahaan yang ada.

Pada tahun 2012, Perseroan juga secara aktif telah memberikan masukan bagi Tata Kelola Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur. Adanya dasar hukum yang jelas mengenai aspek Tata Kelola di PT PII akan lebih memfasilitasi peningkatan kualitas penerapan GCG khususnya dalam rangka meningkatkan nilai serta kredibilitas Perseroan sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.

Dewan Komisaris memberikan apresiasi yang tinggi atas upaya-upaya Direksi mempersiapkan landasan yang diperlukan agar dapat melangkah dengan lebih efektif di tahun-tahun mendatang dalam mewujudkan transaksi penjaminan proyek-proyek KPS infrastruktur.

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan oleh Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan atas kepengurusan Perseroan oleh Direksi melalui forum rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, yang pada tahun 2012 tercatat diselenggarakan sebanyak 11 kali pertemuan. Agenda rapat telah dipersiapkan dengan baik sebelumnya dan seluruh anggota Komisaris dan Direksi secara aktif hadir dalam rapat-rapat tersebut.

Pada tahun 2012, Dewan Komisaris juga telah membentuk struktur Komite Audit sebagaimana yang diwajibkan dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Keberadaan Komite Audit sejak bulan Oktober 2012 telah berperan dalam meningkatkan kualitas fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris, khususnya menyangkut aspek audit internal serta pengendalian internal atas pelaporan keuangan Perseroan. Sesuai dengan

develop a standard model for transaction documents and project structure that would be eligible for guarantee coverage, and thus will accelerate project preparations and time to market by the CAs.

Another notable achievement in 2012 was the completion of a diagnostic assessment by the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) on the practice of Good Corporate Governance at the Company. The diagnostic assessment provides a clear picture of the needed improvements in our implementation of GCG. These improvements will be taken in hand according to their urgency and in consideration of the available resources in the Company.

Further, in 2012, the Company has also actively participated in the formulation of a formal Governance Framework for Infrastructure Guarantee Enterprise. The existence of a legal basis for corporate governance in an Infrastructure Guarantee Enterprise will facilitate quality implementation of GCG practice at IIGF and thus improving our value and credibility.

The Board of Commissioners would like to acknowledge efforts made by the Board of Directors in preparing the necessary foundation that will enable the Company to move ahead more effectively in accomplishing guarantee transactions on PPP infrastructure projects.

Supervision of the Company by the Board of Commissioners

In the implementation of our oversight function on the management of the Company, the Board of Commissioners held 11 meetings with the Board of Directors throughout 2012. These meetings have been effective for their purpose, with well-prepared agenda and full attendance of all members of the Board of Commissioners and Board of Directors.

In 2012, the Board of Commissioners has established the structure for an Audit Committee as required under the provisions of Law No. 10 Year 2003 on State-Owned Enterprises. Active since October 2012, the Audit Committee has contributed to an enhanced supervisory function of the Board of Commissioners, especially in overseeing effective internal audit and internal control over financial reporting at

prioritas kebutuhannya nanti sejalan dengan perkembangan Perseroan, Dewan Komisaris berencana membentuk komite-komite Komisaris lainnya sesuai ketentuan.

Pandangan atas Prospek Perusahaan

Selain dari kesiapan PT PII sendiri yang telah jauh lebih baik, pembangunan proyek infrastruktur berskema KPS juga terus memperoleh dukungan Pemerintah, antara lain melalui keluarnya Peraturan Menteri Keuangan mengenai penyediaan *Viability Gap Fund* untuk meningkatkan *bankability* dari proyek infrastruktur KPS. Oleh karenanya, Dewan Komisaris sangat mengharapkan bahwa tahun 2013 akan menjadi tahun implementasi, dimana PT PII dapat merealisasikan penjaminan atas sejumlah proyek infrastruktur yang telah dipersiapkan selama ini.

Terwujudnya penjaminan atas satu atau lebih dari proyek-proyek tersebut akan memberikan PT PII suatu model kerangka kerja yang kemudian dapat direplikasi dan menjadi rujukan bagi proyek-proyek selanjutnya di sektor yang bersangkutan. Terlebih penting lagi, hal ini akan dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan di sektor publik maupun swasta terhadap efektivitas peran PT PII dalam mendukung pembangunan proyek infrastruktur dengan skema KPS.

Ucapan Terima Kasih

Menutup sambutan singkat ini, Dewan Komisaris sekali lagi mengucapkan selamat kepada Direksi dan seluruh jajaran PT PII atas keberhasilannya mempersiapkan landasan yang kokoh bagi pertumbuhan ke depan. Keberhasilan tersebut tentunya juga tidak terlepas dari adanya dukungan, kepercayaan dan kerja sama yang baik dari berbagai pemangku kepentingan PT PII selama ini, untuk mana Dewan Komisaris juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Kiranya kerja sama, kepercayaan dan dukungan tersebut terus berlanjut dalam mendukung terwujudnya tujuan kita bersama dalam memajukan Indonesia, dan khususnya melalui pembangunan infrastruktur.

IIGF. Commensurate with the evolving need and development of the Company, plans are in hand to establish other Board committees as required by regulations.

Company Prospects

While IIGF is much better prepared now, the development of infrastructure PPP projects also continues to receive full support from the Government of Indonesia, as evidenced in the issuance of the Minister of Finance regulation regarding the provision of Viability Gap Fund to improve the bankability of PPP infrastructure projects. Therefore, the Board of Commissioners have high expectation that the year 2013 will be the year of implementation, in which IIGF could realize the guarantee facilities on several infrastructure projects on the pipeline.

The existence guarantee on one or more of those projects will provide IIGF with a model framework that could be replicated and used as reference for other projects in the respective sectors. More importantly, this will greatly enhance the confidence among stakeholders in the public and private sectors on the effectiveness of IIGF role in supporting the development of a PPP infrastructure project.

Appreciation

In closing, the Board of Commissioners would like to once again congratulate the Board of Directors and all teams at IIGF for their success in building a solid foundation for future growth. Such success, needless to say, would not be possible without the support, trust and good cooperation from various IIGF stakeholders, for which the Board of Commissioners would like to extend our thanks and appreciation. It is our hope that such good cooperation, trust and support will continue to exist as we move forward towards our shared goals in progressing Indonesia, and particularly through infrastructure development.



Freddy Rikson Saragih

Komisaris Utama | President Commissioner



Sinthya Roesly
Direktur Utama
President Director

Laporan Direksi

Report from the Board of Directors

Ditengah berbagai tantangan dalam mewujudkan realisasi transaksi penjaminan bagi proyek infrastruktur KPS di tahun 2012, PT PII berhasil menyelesaikan tahapan pertama dari roadmap pengembangan perusahaan, antara lain melalui pembenahan dan penguatan fungsi-fungsi dalam organisasi perusahaan, peningkatan kualitas penerapan GCG, serta peningkatan kapasitas penjaminan melalui penambahan Penyertaan Modal Negara.

Facing considerable challenges in its efforts to realize guarantee transactions for PPP infrastructure projects in 2012, IIGF nevertheless has successfully concluded the first stage of its development roadmap in the year, including the completion and strengthening of work functions in the organization, improved GCG implementation, and increased guarantee capacity with the infusion of additional State Equity Participation.

Pemegang saham yang terhormat,

Tahun 2012 dapat dikatakan merupakan tahun pembelajaran bagi PT PII, khususnya ditengah berbagai tantangan yang kami hadapi dalam upaya menyediakan penjaminan bagi proyek-proyek pembangunan infrastruktur dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) di Indonesia. Di lain pihak, kami berhasil mencapai berbagai kemajuan yang cukup penting, terutama terkait dengan peningkatan kapasitas institusi PT PII. Laporan Tahunan ini kiranya dapat memberi gambaran yang realistis bagi para pemangku kepentingan mengenai tantangan, kemajuan, dan terlebih penting lagi, optimisme kami akan kemampuan untuk melangkah lebih cepat dan lebih efektif ke depan.

Kinerja Operasional

Pada Laporan Tahunan yang lalu, kami telah melaporkan tentang penandatanganan Perjanjian Penjaminan (*Guarantee Agreement*) antara PT PII, Pemerintah RI dan PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) serta Perjanjian Regres (*Recourse Agreement*) antara PT PII dan PLN untuk proyek PLTU Jawa Tengah pada Oktober 2011. Memasuki tahun 2012, tahapan selanjutnya yaitu perolehan pembiayaan (*financial close*) - yang semula dijadwalkan pada Oktober 2012 - harus mengalami penundaan. Secara umum, hal ini disebabkan oleh keterlambatan perolehan ijin lokasi, pelaksanaan Analisa Manajemen Dampak Lingkungan (AMDAL) dan pengadaan lahan. PT PII telah bergerak cepat dan segera membentuk sebuah *Joint Monitoring Committee* (JMC) bersama dengan pihak BPI dan PLN untuk secara aktif memantau perkembangan status *financial close*, yang diperkirakan dapat tercapai pada Oktober 2013.

Bagi PT PII, tertundanya *financial close* proyek PLTU Jawa Tengah menyebabkan Perseroan belum dapat membukukan pendapatan penjaminan sebesar Rp 100,9 miliar dari proyek tersebut, sebagaimana target yang dianggarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2012. Terlepas dari itu, PT PII memandang kejadian yang tidak diinginkan tersebut sebagai suatu pembelajaran yang penting bagi Perseroan, dan kami harapkan juga bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan pembangunan proyek-proyek infrastruktur dengan skema KPS di Indonesia.

Dear shareholders,

The year 2012 can be seen as a learning period for IIGF, especially in the midst of the challenges that we encountered in our efforts to provide guarantees for infrastructure projects developed under the Public Private Partnership (PPP) scheme in Indonesia. On the other hand, we have succeeded in achieving considerable progress related to our institutional capacity building. In this Annual Report, we aim to give our stakeholders some insights on the challenges that we face, the progress that we achieve and, more importantly, the optimism that we have on our capability to deliver results, more efficiently and effectively, in the future.

Operational Performance

In our last Annual Report, we mentioned about the signing of the Guarantee Agreement between IIGF, the Government of Indonesia and PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) as well as the Recourse Agreement between IIGF and PT PLN (Persero), related to the Central Java Power plant Project in October 2011. Entering 2012, the next stage in the process, namely the financial close transaction scheduled to take place by October 2012, had to be postponed. This was mainly due to delays in the procuring of location permit, the Environmental Impact Management Analysis (AMDAL) study, and land acquisition. IIGF has moved quickly to establish a Joint Monitoring Committee (JMC) together with elements of BPI and PLN, to actively monitor the progress towards financial close, which is scheduled to be achieved by October 2013.

Due to the postponement of the financial close on the Central Java Power plant Project, IIGF was unable to realize Rp 100.9 billion in guarantee revenue from the project as budgeted in the Company's Budget and Work Plan (RKAP) for 2012. For such unfortunate development, IIGF views it as an important lesson for IIGF, and hopefully also for other related stakeholders in the execution of infrastructure projects under the PPP scheme in Indonesia.

Selain proyek PLTU Jawa Tengah, PT PII sepanjang tahun 2012 juga berkonsentrasi untuk terus mendukung terlaksananya tiga proyek infrastruktur KPS lainnya yang telah ditangani Perseroan dari tahun sebelumnya. Ketiga proyek tersebut adalah (i) proyek Kereta Api batu bara Puruk Cahu - Bangkuang - Batanjung, Kalimantan Tengah, dengan nilai investasi sekitar US\$ 2,3 miliar, (ii) proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bandar Lampung, Lampung, senilai sekitar US\$ 100 juta, dan (iii) proyek PLTU Mulut Tambang Sumsel-9 dan Sumsel-10 di Sumatera Selatan senilai total sekitar US\$ 4 miliar. Perkembangan pelaksanaan proyek-proyek tersebut diuraikan lebih rinci di bagian lain dalam Laporan Tahunan ini.

Belajar dari pengalaman yang dijumpai dalam berinteraksi dengan berbagai PJP terkait pelaksanaan proyek-proyek KPS yang ditangani pada tahun 2012, PT PII telah mengambil langkah proaktif dengan membentuk fungsi Project Guarantee & Consultation (PGC) dalam struktur organisasinya. Fungsi PGC berperan memberikan konsultasi dan pengarahan untuk membantu para PJP dengan berbagai informasi yang perlu mereka ketahui agar dapat mengembangkan struktur proyek infrastruktur dengan skema KPS yang baik. Kami memandang bahwa langkah ini, setidaknya untuk saat sekarang, sangat diperlukan untuk memfasilitasi pembelajaran dan peningkatan kapasitas para PJP terkait dengan proyek-proyek KPS dalam pembangunan infrastruktur.

Kinerja Keuangan

PT PII membukukan laba setelah pajak sebesar Rp 213,4 miliar pada tahun 2012, dibandingkan perolehan pada tahun 2011 sebesar Rp 157,1 miliar. Hal ini didorong terutama oleh kenaikan pendapatan Perseroan dari Rp 228,3 miliar di tahun 2011 menjadi sebesar Rp 312,2 miliar di tahun 2012. Akibat tertundanya *financial close* proyek PLTU Jawa Tengah, PT PII belum dapat membukukan pendapatan penjaminan dari proyek tersebut pada tahun 2012. Kenaikan pendapatan pada tahun 2012 sepenuhnya mencerminkan kenaikan pendapatan

Throughout 2012, in addition to ongoing developments of the CJPP project, IIGF continued to support the various stages of development of the three other PPP infrastructure projects that the Company was involved with since the previous year. These are (i) the Puruk Cahu - Bangkuang - Batanjung Coal Railway project in Central Kalimantan valued at US\$ 2.3 billion, (ii) the Clean Water Supply System project at Bandar Lampung, Lampung, valued at US\$ 100 million, and (iii) the Mine-Mouth Coal-Fired Power Plant Sumsel-9 and Sumsel-10 projects in South Sumatera valued at some US\$ 4 billion. Development progress on these projects is covered in more details in the following section in this Annual Report.

Based on our experience in dealing with various Contracting Agency (CA) in some PPP transaction execution in 2012, IIGF has taken a strategic anticipatory initiative with the establishment of the Project & Guarantee Consultation (PGC) function within our organization. PGC plays a role in providing consultation and guidance to assist the CAs with a variety of information needed in order to enable these CAs to prepare well structured PPP projects, for the time being at least, is very necessary to facilitate a faster learning process as well as capacity building on the part of CAs related to the development of PPP infrastructure projects.

Financial Performance

IIGF posted Rp 213.4 billion in income after taxes in 2012, which compared favorably with Rp 157.1 billion in 2011. This was mainly due to the growth in revenues, which increased from Rp 228.3 billion in 2011 to Rp 312.2 billion in 2012. Due to the postponement of financial close of the Central Java Power Plant project, IIGF was unable to book the respective guarantee revenue from that project in 2012. Hence, the increase in our revenues in 2012 was entirely the result of the increase in income from fund management, following an additional



dari kiri ke kanan | from left to right:

Armand Hermawan

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Director of Finance and Risk Management

Sinthya Roesly

Direktur Utama | President Director

Yadi J. Ruchandi

Direktur Operasi | Director of Operations

pengelolaan dana, yang didorong oleh pertumbuhan jumlah dana yang dikelola menyusul adanya tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 1.000 miliar kepada PT PII pada bulan Agustus 2012.

Total aset tercatat sebesar Rp 4.966,8 miliar pada akhir tahun 2012, dibandingkan posisi setahun sebelumnya sebesar Rp 3.738,6 miliar. Pertumbuhan tersebut terutama akibat adanya tambahan PMN seperti disebutkan di atas, yang dilakukan dalam rangka memperkuat struktur modal dan meningkatkan kapasitas penjaminan PT PII.

Tata Kelola Perusahaan

Menyusul penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) mengenai bantuan advis pengawasan dan tata kelola antara PT PII dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bulan Oktober 2011, BPKP pada tahun 2012 kemudian melakukan kajian dan *diagnostic assessment* atas proses-proses tata kelola (GCG) yang ada di PT PII. Hasil *diagnostic assessment* tersebut menempatkan kondisi penerapan GCG secara umum di PT PII pada kategori 'cukup' - dari lima tingkatan yaitu 'sangat baik', 'baik', 'cukup', 'kurang' dan 'sangat kurang'. Selanjutnya, masih dalam kerangka Nota Kesepahaman dengan BPKP tersebut, BPKP kemudian melakukan pendampingan dalam peningkatan implementasi GCG di PT PII.

Komitmen untuk menerapkan standar praktik GCG terbaik di lingkungan Perseroan adalah sejalan dengan upaya membangun reputasi dan kredibilitas PT PII sebagai sebuah institusi keuangan. Sampai dengan akhir tahun 2012, beberapa perbaikan dan penyempurnaan atas implementasi praktik GCG di PT PII antara lain adalah pembentukan Komite Audit.

Tanggung Jawab Sosial

Aspirasi PT PII akan penerapan standar tata kelola kelas dunia juga mencakup pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dengan visi jauh ke depan, PT PII pada tahun 2012 meluncurkan inisiatif

injection in August 2012 of Rp 1,000 billion in Government Equity Participation (PMN) into IIGF.

Our total assets amounted to Rp 4,966.8 billion as at year-end 2012, compared to its previous position at Rp 3,738.6 billion a year earlier. The growth in total assets is mainly from an addition of PMN as mentioned above, in order to strengthen our capital structure and improve our guarantee capacity.

Corporate Governance

Following the signing of the Memorandum of Understanding between IIGF and the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) on October 2011 regarding the advisory services for corporate supervision and governance, the BPKP subsequently has performed a review and diagnostic assessment of the corporate governance (GCG) processes at IIGF in 2012. Results of the diagnostic assessment indicated that GCG implementation at PT PII was evaluated in the category of 'fair' - from the five category ranking of 'excellent', 'good', 'fair', 'inadequate' and 'poor'. Next, as provided for in the MoU with BPKP, the BPKP proceeded to provide mentoring services to IIGF in the improvement of GCG implementation in IIGF.

We remain firmly committed to implement the best standards of GCG practice in the Company as a way to build our reputation and credibility as a financial institution. Up until year-end 2012, we have consequently effected a number of improvements and enhancements on the practice of GCG at IIGF, including the establishment of the Audit Committee.

Social Responsibility

Our aspiration towards world-class standards in the practice of corporate governance also includes commitment for social and environmental responsibility. With long term vision, IIGF in

yang dikenal sebagai IIGF Institute, yang ke depan akan diwujudkan sebagai sebuah lembaga yang akan berperan sebagai pusat pengetahuan dan pembelajaran bagi para pemangku kepentingan yang terkait dengan pengembangan proyek-proyek infrastruktur dengan skema KPS di Indonesia, termasuk kalangan akademisi dan masyarakat umum. Pembentukan IIGF Institute merupakan implementasi dari komitmen CSR Perseroan.

Prospek ke Depan

Pada tahun 2012, PT PII telah menyelesaikan penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2013 - 2017, yang merinci inisiatif-inisiatif strategis maupun sasaran-sasaran Perseroan tiap tahunnya dalam periode tersebut. Keberadaan RJPP 2013 - 2017 akan memberikan sebuah kerangka yang jelas bagi PT PII untuk mengalokasikan sumber daya perusahaan, mengukur pencapaian Perseroan, serta membuat penyesuaian dan perbaikan dimana

2012 launched an initiative known as the IIGF Institute. Going forward, we intend to develop the IIGF Institute with the role as a knowledge and learning center for various stakeholders, including academicians as well as the general interested public, in relation to the development of PPP infrastructure projects in Indonesia. The establishment of IIGF Institute is a manifestation of our Corporate Social Responsibility commitments.

Future Prospects

In 2012, IIGF has formulated the Long Term Corporate Plan (RJPP) 2013 - 2017, which details the strategic initiatives as well as corporate objectives for each year in the period covered. The 2013 - 2017 RJPP provides IIGF with a consistent framework with which to allocate its resources, measure its achievements, and to make adjustments and

diperlukan. Dari sisi operasional untuk tahun 2013 khususnya, PT PII memiliki peluang yang cukup baik untuk merealisasikan tercapainya tahap penandatanganan Perjanjian Penjaminan pada satu atau lebih proyek-proyek yang tengah berjalan saat ini sebagaimana diterangkan di atas. Optimisme kami tersebut juga didukung oleh kuatnya komitmen Pemerintah untuk mensukseskan pembangunan infrastruktur melalui proyek KPS, sebagaimana terlihat dengan terbitnya beberapa peraturan pelaksana di tingkat kementerian yang terkait.

Atas nama Direksi, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh karyawan PT PII atas kontribusi yang diberikan bagi pencapaian target-target kinerja Perseroan di tahun 2012. Kami juga sangat menghargai dukungan, kepercayaan dan kerja sama terus kami peroleh sepanjang tahun 2012 dari pemegang saham, Dewan Komisaris, para mitra kerja di berbagai Kementerian dan Lembaga Pemerintahan baik di pusat maupun daerah, para Penanggung Jawab Proyek Kerjasama, investor dan penyandang dana, serta para pemangku kepentingan lainnya. Dengan dukungan seluruh pihak di atas, PT PII akan melangkah lebih percaya diri ke depan dalam mewujudkan amanat yang diemban Perseroan.

improvements as necessary. For the year 2013, and especially in terms of our operational activities, IIGF has a good prospect of realizing the signing of Guarantee Agreement in one or more projects that are currently in the pipeline as described previously. We are further encouraged by the strong commitment of the Government for the successful development of infrastructure under the PPP scheme, as can be seen from the recent issuance of a number of implementing regulations by the relevant authorities at the ministerial level.

On behalf of the Board of Directors, I would like to thank the entire staffs at IIGF for their contributions toward the achievement of the Company's performance targets in 2012. We would also like to extend our deepest appreciation for the support, trust and cooperation that we have received throughout 2012 from the shareholders, the Board of Commissioners, our counterparts in the various Government Ministries and Agencies in central and regional governments, the Contracting Agencies, investors and financiers, and other stakeholders. With your support, IIGF will move ahead confidently in realizing our mandates.



Sinthya Roesly

Direktur Utama | President Director

Membangun Landasan untuk Melangkah Pasti ke Depan

Building Our Capacity to Move Ahead
Confidently



Tahun 2012 merupakan tahun ketiga operasional PT PII secara komersial, dan akhir dari tahap pertama dari empat tahapan roadmap pengembangan Perseroan, yaitu tahap persiapan (Set-Up Stage). Sepanjang tahun tersebut, PT PII berkonsentrasi menyelesaikan tahap persiapan tersebut terkait dengan pengembangan kapasitas dan kompetensi sumber daya Perseroan di berbagai aspek.

The year 2012 is the third year of commercial operations of IIGF, and the end year of the first stage in the four-phase development roadmap of the Company, namely the Set-Up Stage. Throughout that year, IIGF concentrated on completing the set-up stage with regard to the necessary build-up of the capacity and competences of company resources in various aspects.



Kapasitas Penjaminan

Guarantee Capacity

Kemampuan modal Perseroan merupakan hal penting yang menentukan seberapa jauh Perseroan memiliki kapasitas untuk menyediakan penjaminan bagi proyek-proyek KPS infrastruktur. Pada gilirannya, kapasitas penjaminan dapat berpengaruh pada kredibilitas PT PII di mata investor dan penyedia dana potensial untuk pengembangan proyek infrastruktur.

Sampai dengan akhir tahun 2012, kapasitas PT PII untuk melakukan penjaminan proyek-proyek infrastruktur masih sepenuhnya mengandalkan ekuitas perusahaan dari Penyertaan Modal Negara (PMN). Dana PMN berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disetor penuh ke dalam modal saham Perseroan. Pada tahun 2012, melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 2012, Pemerintah Republik Indonesia kembali melakukan penambahan PMN di PT PII sebesar Rp 1,0 triliun, yang dananya diambil dari APBN 2012.

The strength of our equity capital determines the extent of the Company's ability to underwrite PPP infrastructure projects. Subsequently, availability of adequate guarantee capacity will determine IIGF credibility to potential investors and financiers who are considering investments in the development of infrastructure projects.

Up to end of 2012, IIGF's capacity to underwrite infrastructure projects still relies entirely on its equity capital from Government Equity Participation (PMN) funds allocated from the Indonesian State Budget. In 2012, based on Government Regulation No. 68 Year 2012, the Government of Indonesia undertook an additional PMN injection into IIGF from the 2012 State Budget, amounting to Rp 1.0 trillion.

Dengan tambahan penyertaan modal tersebut, ekuitas PT PII kini tercatat sebesar Rp 4,9 triliun sehingga melihat leverage ratio saat ini, kapasitas penjaminan PT PII cukup memadai untuk proyek-proyek infrastruktur yang ditangani.

Untuk meningkatkan kapasitas penjaminan proyek, PT PII juga dimungkinkan untuk bekerja sama dengan pihak Pemerintah RI, lembaga pembangunan multilateral maupun institusi keuangan internasional dalam bentuk penjaminan bersama ataupun re-asuransi. Dalam struktur penjaminan bersama, proses penjaminan termasuk evaluasi proyek (appraisal) tetap dilaksanakan oleh PT PII sesuai dengan prinsip Kebijakan Satu Pelaksana.

Sebagai salah satu bentuk kerjasama ini, World Bank (WB) telah menyediakan fasilitas pinjaman untuk klaim penjaminan dan dukungan teknis atas proyek-proyek infrastruktur KPS sebagai kelanjutan Subsidiary Loan Agreement berdasarkan Loan Agreement yang telah ditandatangani oleh World Bank dengan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 19 November 2012 dan persetujuan dari Menteri Keuangan atas fasilitas pinjaman pada tahun 2012.

Pada tahun 2012, PT PII juga telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan pihak Islamic Corporation for Insurance of Investment and Export Credits (ICIEC), Islamic Development Bank (IDB) dan Overseas Private Investment Corporation (OPIC) terkait kolaborasi dalam pengembangan proyek infrastruktur di Indonesia.

The additional PMN resulted in an increase of IIGF equity capital to Rp 4.9 trillion. With the prevailing leverage ratio, this amount provides adequate capacity for IIGF to underwrite the infrastructure projects currently being handled by the Company.

To further increase its guarantee capacity, IIGF is allowed to cooperate with the Government of Indonesia, multilateral development agencies or international financial institutions in the provision of co-guarantee or re-insurance facilities. In a co-guarantee scheme, IIGF will still undertake the various guarantee processes, including project appraisal, in order to comply with the principle of Single Window Policy.

A manifestation of this cooperation is the facility provided by the World Bank (WB) for a standby-loan for guarantee claim payment and technical assistance loan for PPP infrastructure project handled by IIGF. The facility represents a Subsidiary Loan Agreement on the basis of a Loan Agreement signed by WB and the Government of Indonesia on November 19, 2012, and has received the approval of the Minister of Finance in 2012.

Also in 2012, IIGF has signed a Memorandum of Understanding with the Islamic Corporation for Insurance of Investment and Export Credits (ICIEC), Islamic Development Bank (IDB) and the Overseas Private Investment Corporation (OPIC) related to the collaboration in the development of infrastructure projects in Indonesia.



Project & Guarantee Consultation

Project & Guarantee Consultation



Project & Guarantee Consultation (PGC) merupakan salah satu fungsi dalam organisasi PT PII yang dibentuk pada tahun 2012. PGC berperan dalam memastikan pelaksanaan proses penyaringan dan konsultasi kepada Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) terkait penyiapan Dokumen Tender Penawaran Proyek (RfP) Infrastruktur dan Usulan Penjaminan telah layak dan sesuai dengan standar yang ditetapkan bagi penjaminan dan pelelangan proyek infrastruktur KPS.

Struktur PGC merupakan perluasan dari, dan menggantikan, struktur yang ada sebelumnya yang dikenal sebagai Pre-Appraisal Work (PAW) dalam organisasi PT PII. Pembentukan PGC dipicu oleh kenyataan yang ada di lapangan terkait minimnya kesiapan dokumentasi proyek ataupun keterbatasan kapasitas PJPK saat memasuki tahapan proses penyaringan oleh PT PII, sehingga menghambat terjadinya *deal-flow* atas pengembangan suatu proyek infrastruktur yang sesungguhnya memiliki potensi yang baik. Untuk itu, PT PII secara pro-aktif 'bergerak ke hulu' melalui aktivitas PGC, sebagai upaya membangun suatu model atau struktur standar yang dapat dijamin oleh PT PII, sehingga dapat mempercepat penyiapan proyek oleh PJPK. Model atau struktur standar ini kemudian dapat direplikasi dan menjadi rujukan bagi proyek-proyek infrastruktur serupa di sektor terkait.

PT PII percaya bahwa inisiatif ini dapat secara signifikan membantu terciptanya lebih banyak proyek infrastruktur yang terstruktur dengan baik dan siap untuk dijamin. Untuk menangkal persepsi

Project & Guarantee Consultation (PGC) is a function established by IIGF in 2012. The PGC serves to ensure the execution of the screening process, and provides consultation to Contracting Agency (CA) in regards the preparation of the Request for Proposal (RfP) and the Guarantee Application Package (GAP) documents, and thus ensuring the adequacy of these documents in terms of established standards for the tender and underwriting of PPP infrastructure projects.

The PGC structure replaces and expands on the previous structure known as Pre-Appraisal Work at IIGF. The establishment of PGC reflects on the reality found in actual experience regarding the lack proper project documentation or limitations on the capacity of CAs during the project screening process as conducted by IIGF. In turn, these prevent a smooth deal-flow for the development of potential infrastructure projects. The activities of the PGC unit represent a proactive strategy by IIGF in 'moving upstream', in an effort to establish a standardized model or structure of infrastructure projects that are eligible for guarantee facilities by IIGF, and therefore facilitating project preparation by the CA. This standard model or structure could be replicated or made as a reference for similar infrastructure projects in the respective sectors.

IIGF believes that this initiative would in time have significant impact in facilitating the deal-flow of a greater number of infrastructure projects that are well-structured and eligible for guarantee facility.

terdapatnya konflik kepentingan dalam hal bantuan persiapan proyek (PGC) dan proses penilaian (Appraisal) untuk proyek yang sama, struktur organisasi saat ini telah memisahkan secara jelas divisi dan fungsi antara tim yang melakukan PGC dan Appraisal.

To avoid a possible conflict of interest in the preparation (by PGC) and guarantee appraisal of the same project, the organization structure provides for a clear segregation in divisional and functional lines between the PGC and the Appraisal teams.



Sumber Daya Manusia

Human Resources

PT PII terus melakukan penyempurnaan terhadap struktur organisasinya, sesuai dengan perkembangan kegiatan operasional Perseroan maupun kebutuhan yang diidentifikasi agar dapat berfungsi lebih optimal. Pada tahun 2012, upaya penataan organisasi tersebut mencakup pembentukan beberapa fungsi baru serta perubahan struktur kerja di beberapa fungsi yang lain. Memasuki tahap pertumbuhan (growing stage) mulai tahun 2013, struktur organisasi yang baru tersebut akan memungkinkan PT PII untuk beroperasi dengan lebih efektif sebagai penyedia penjaminan proyek infrastruktur KPS.

Sejalan dengan perubahan struktur organisasi, PT PII juga melakukan pemutakhiran dan penyempurnaan pada uraian jabatan (job description) di tiap fungsi dan posisi yang ada. Secara bersamaan, Perseroan mulai menyusun daftar kompetensi perusahaan, yang akan digunakan kemudian sebagai basis kebijakan Perseroan dalam program-program rekrutmen dan pengembangan karyawan.

IIGF continued to modify its organization structure in line with the demands of operational activities as well as newly identified needs toward a more optimum organizational performance. In 2012, changes to the organizational structure were made involving the establishment of several new functions as well as work structure re-arrangement in a number of other functions. As IIGF enters its 'growing stage' beginning in 2013, the new organization structure will enable IIGF to operate more effectively as a provider of guarantee facilities for PPP infrastructure projects.

Along with changes to the organization structure, IIGF has also updated and refined the job description for each function and position within the structure. At the same time, the Company has also begun to compile a database of company competences, which eventually will form the basis for company policies on employee recruitment and development programs.

Sejak tahun 2011, PT PII telah melakukan penyusunan draft Peraturan Perusahaan sebagaimana ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada bulan Maret 2012, draft Peraturan Perusahaan tersebut telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial serta Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Dengan demikian, PT PII telah memiliki dasar untuk pengembangan berbagai kebijakan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia Perseroan.

Salah satu perkembangan penting terkait dengan aspek ini adalah pelaksanaan evaluasi jabatan (*job evaluation*) dan benchmark remunerasi karyawan dengan yang ada di pasar, sebagai dasar bagi penyusunan suatu sistem remunerasi karyawan yang '*internally fair dan externally competitive*'. Kebijakan dan sistem remunerasi merupakan salah satu cara untuk mendorong produktivitas karyawan maupun motivasi mereka untuk mencapai yang hasil yang terbaik.

Dalam menjalankan aktivitas usahanya, PT PII didukung oleh karyawan tetap maupun karyawan yang berstatus kontrak (alih-daya), dimana karyawan kontrak dikhususkan untuk pekerjaan-pekerjaan administratif. Struktur tersebut dimaksudkan untuk pendayagunaan yang optimal sumber daya manusia Perseroan dari sisi produktivitas kerja karyawan maupun efektivitas program-program pengembangan karyawan Perseroan.

Pada akhir tahun 2012, jumlah karyawan tetap (selain Komisaris dan Direksi) dan karyawan kontrak di PT PII tercatat sebanyak 42 orang, dibandingkan 30 orang di akhir tahun sebelumnya. Sepanjang tahun 2012, lima orang karyawan tercatat mengundurkan diri, sementara 17 orang karyawan baru telah bergabung dengan PT PII. Rekrutmen karyawan dilakukan berdasarkan aspek profesionalisme untuk mencari talenta-talenta terbaik bagi tiap-tiap posisi yang dibutuhkan, serta dengan mengedepankan prinsip kesetaraan kesempatan kerja tanpa membedakan jender, ras dan suku ataupun agama.

Since 2011, IIGF has started the formulation of the document of Company Regulations as required by Law No. 13 Year 2003 on Labor. Subsequently, in March 2012, the draft document of Company Regulations of IIGF has been approved by the Ministry of Labor and Transmigration, the Directorate General of Industrial Relations and Workers Social Security. The Company Regulations document provides IIGF with a formal basis for the formulation of company policies related to the management of human resources.

Another important and related development in this area is the implementation of a job evaluation and employee remuneration benchmarking exercise, which will form the basis for the development of an '*internally fair and externally competitive*' employee remuneration system at IIGF. Remuneration system and policies provide a means of encouraging higher work productivity as well as employee motivation in striving for the best result in their respective jobs.

In conducting its business activities, IIGF employs both permanent as well as contract (outsourced) employees, with contract employees being reserved for administrative jobs. This structure provides the most optimum use of the Company's human resources in terms of employee work productivity as well as the effectiveness of employee development programs.

As at year-end 2012, the total headcount of permanent employees (other than Commissioners and Directors) and contract employees is 42 personnel, compared with 30 personnel a year earlier. During 2012, five employees have resigned, while 17 new employees have joined the Company. Employee recruitment is undertaken on the basis of professionalism to secure the best talent for each position to be filled, while upholding the equal opportunity principle with no discrimination in terms of gender, race or ethnicity, and religion.

Komposisi karyawan Employee composition	
	2012
Laki-laki Male	30
Perempuan Female	17
Diploma Diploma	3
S1 Bachelor Degree	21
S2 Master Degree	20
S3 Doctoral	3
Karyawan Tetap Permanent	33
Karyawan Kontrak Contract	14

Sepanjang tahun 2012, PT PII tetap fokus pada pengembangan kompetensi inti karyawan di bidang penjaminan dan risiko terkait konsep KPS. Tujuan tersebut diupayakan melalui partisipasi dalam pelatihan, lokakarya ataupun seminar mengenai aspek-aspek kompetensi yang relevan dengan bidang pekerjaan karyawan, baik yang diadakan oleh lembaga pendidikan eksternal maupun dengan mengundang nara sumber profesional ke PT PII. Selain itu, PT PII juga secara rutin memfasilitasi berbagai sesi sharing knowledge antar karyawan pada berbagai unit kerja, termasuk dengan jajaran Direksi, agar terbentuk pemahaman dan pengetahuan yang standar terhadap bisnis inti Perseroan.

Pada tahun 2012, tercatat diselenggarakan sebanyak 37 sesi pelatihan maupun sharing knowledge untuk individu ataupun grup dengan berbagai topik. Rata-rata hari pelatihan adalah 6 hari/karyawan/tahun.

Throughout 2012, IIGF continued to focus on development of employee core competences in underwriting and risks related to the PPP concept. Towards this end, IIGF employees regularly participated in various training courses, workshops and seminars on work relevant subjects. Training is provided either by external formal institutions as well as internally by organizing classes and inviting competent professionals as speakers. From time to time, IIGF organized knowledge sharing sessions for employees from different work units, including with the Directors, in order to create a common and shared perception and knowledge about the Company's core business.

In 2012, there were a total of 37 training and knowledge sharing sessions for individuals or groups involving a variety of subjects. Average training-days was 6 day/employee/year.

Pelatihan Sumber Daya Manusia Employee Training	
Topik Subject	Frekuensi Frequency
Finance and Accounting	7
GA and IT	5
Procurement	3
Risk Allocation and ERM	2
Public Private Partnership	9

PT PII pada tahun 2012 telah mengembangkan dan meluncurkan portal intranet perusahaan yang diberi nama MyIIGF. Aplikasi berbasis *web* tersebut dirancang untuk berfungsi sebagai *platform* satu-atap untuk kebutuhan informasi perusahaan dan karyawan, dokumentasi dan pengarsipan, serta formulir-formulir administrasi dan kepegawaian. Portal MyIIGF dapat diakses oleh karyawan dimanapun dan kapanpun, sepanjang terdapat koneksi internet, sehingga memfasilitasi komunikasi dan interaksi antar karyawan maupun unsur-unsur internal perusahaan.

Melalui MyIIGF, PT PII dapat mengkomunikasikan berbagai hal yang terjadi di perusahaan, seperti peraturan perusahaan baru, perkembangan proyek yang sedang ditangani, ataupun jadwal kegiatan dan acara perusahaan, sementara karyawan dapat mengakses informasi yang relevan dan berguna untuk pekerjaannya. Portal MyIIGF memungkinkan interaksi yang lebih fleksibel dan spontan di antara karyawan dan unit kerja di PT PII, sehingga mendukung partisipasi dan peran aktif karyawan yang lebih besar dalam berbagai aspek aktivitas perusahaan. Karena setiap pengguna memperoleh informasi yang sama dalam intranet, portal MyIIGF juga sangat efektif untuk mendorong terbentuknya budaya perusahaan di PT PII.

In 2012, IIGF has developed and launched an intranet portal, which was known as MyIIGF. The web-based application is designed as a one-stop platform for corporate and employee information, corporate archive and documents, as well as a variety of standard employee administrative forms. IIGF employees have access to MyIIGF portal from anywhere and at any time, as long as they have an internet connection. This greatly facilitates communication and interaction among employees as well as among internal units in the organization.

MyIIGF intranet portal facilitates communication by IIGF concerning current developments in the Company such as new company regulations, progress updates of ongoing projects, or the Company's calendar of events. Employees meanwhile have access to a variety of useful information relevant to their jobs. The intranet portal also supports more flexible and spontaneous interactions among employees and work units at IIGF, leading to a greater degree of active participation by employees in a variety of activity areas within the Company. Moreover, as portal users receive exactly the same information, MyIIGF intranet portal is also a highly effective tool to promote the creation of IIGF corporate culture among employees.



IIGF Institute

IIGF Institute



Keterbatasan kapasitas PJKP dalam mengembangkan proyek KPS infrastruktur telah mendorong PT PII untuk secara proaktif berupaya memfasilitasi percepatan deal-flow transaksi proyek-proyek infrastruktur. Selain dengan 'bergerak ke hulu' melalui aktivitas PGC, inisiatif lain yang ditempuh PT PII adalah melalui pembentukan IIGF Institute, untuk membantu meningkatkan pemahaman dan kapasitas para pemangku kepentingan yang terkait dengan pengembangan infrastruktur publik oleh swasta, dan terutama melalui skema KPS, melalui edukasi mengenai aspek pendanaan, manajemen risiko dan peningkatan kredit.

Sebagai bagian dari pembentukan IIGF Institute, PT PII telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan tiga perguruan tinggi terkemuka di Indonesia yaitu Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung dan Universitas Gadjah Mada. Salah satu wujud awal dari kerja sama tersebut adalah penyelenggaraan Indonesia Infrastructure Roundtable (IIR) dengan tema "Kerjasama Pemerintah Swasta dalam Pengembangan Infrastruktur Publik". Ke depan, IIR direncanakan menjadi salah satu aktivitas rutin dari IIGF Institute.

Dalam jangka panjang, IIGF Institute akan menjadi salah satu implementasi program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) di PT PII. IIGF Institute nantinya akan dikembangkan sebagai suatu pusat pengetahuan dan institusi pembelajaran di bidang infrastruktur di Indonesia.

Capacity limitation on the part of Contracting Agencies to develop PPP infrastructure projects has encouraged IIGF to take a more proactive approach to facilitate the deal flows on infrastructure project transactions. Aside from 'moving upstream' through the activities of the PGC unit, IIGF has also established the IIGF Institute. This initiative aims at improving the knowledge and capacity of stakeholders related to the development of public infrastructure by the private sector and especially through the PPP scheme, through education on aspects of funding risk management and credit enhancement.

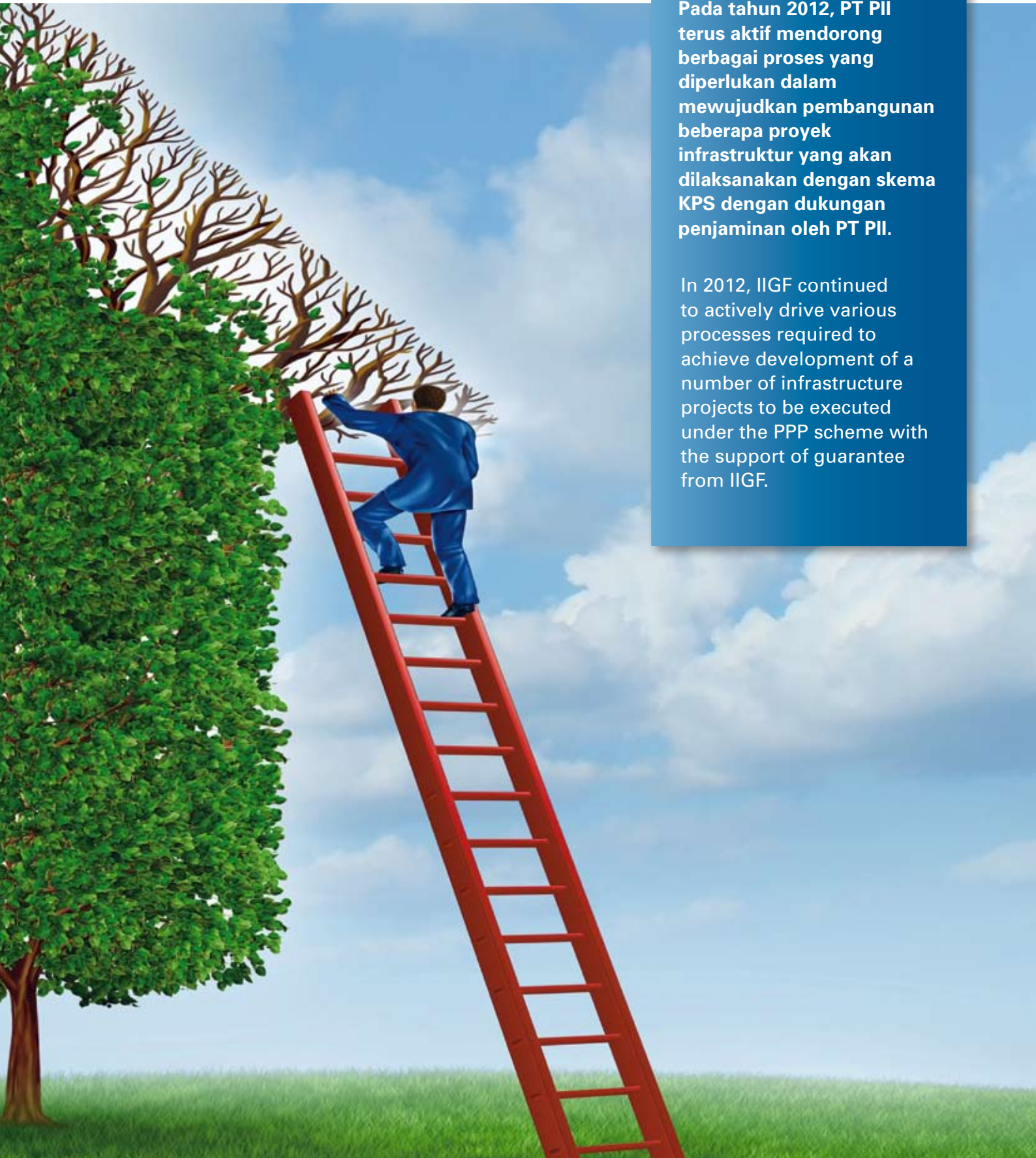
As part of the establishment of the IIGF Institute, IIGF has signed a cooperation agreement with three leading universities in Indonesia, namely Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung and Universitas Gadjah Mada. An initial program in this cooperation was the organizing of Indonesia Infrastructure Roundtable (IIR) event with a theme of "Public Private Partnership in the Development of Public Infrastructure". Going forward, IIR will become one of routine programs of the IIGF Institute.

IIGF Institute will eventually function as one of the implementation of Corporate Social Responsibility programs at IIGF. Eventually, the IIGF Institute will serve as a knowledge center and learning institution on infrastructure in Indonesia.

Mencapai Kemajuan di Tengah Tantangan

Addressing Challenges
while Delivering Progress



A man in a blue suit is climbing a red ladder that extends from a green field at the bottom to a tree at the top. The tree has a split canopy: the left side is lush with green leaves, while the right side consists of bare, brown branches. The background is a blue sky with white clouds.

Pada tahun 2012, PT PII terus aktif mendorong berbagai proses yang diperlukan dalam mewujudkan pembangunan beberapa proyek infrastruktur yang akan dilaksanakan dengan skema KPS dengan dukungan penjaminan oleh PT PII.

In 2012, IIGF continued to actively drive various processes required to achieve development of a number of infrastructure projects to be executed under the PPP scheme with the support of guarantee from IIGF.



Proyek PLTU

Power Plant Project

Proyek PLTU Jawa Tengah

Proyek PLTU Jawa Tengah adalah proyek pembangunan fasilitas pembangkit listrik tenaga uap berkapasitas 2.000 MW di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Sebagai proyek infrastruktur KPS, fasilitas ini akan dibangun oleh konsorsium PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) dengan skema Built-Own-Operate-Transfer dengan masa konsesi 25 tahun. Pada tanggal 6 Oktober 2011, PT PII telah menandatangani Perjanjian Penjaminan dengan BPI dan Perjanjian Regres dengan PT PLN (Persero) sebagai PJPK. Sesuai ketentuan, BPI akan melakukan proses *financial close* paling lambat satu tahun setelah penandatanganan Perjanjian Penjaminan.

Memasuki tahun 2012, terlihat indikasi akan tertundanya penyelesaian proses *financial close*, akibat keterlambatan pemrosesan beberapa perizinan, proses AMDAL dan pengadaan lahan. Untuk itu, PT PII melakukan langkah antisipatif dengan membentuk Joint Monitoring Committee (JMC) yang juga melibatkan unsur-unsur dari BPI dan pihak PJPK. Sepanjang tahun 2012, JMC aktif berperan dalam memantau perkembangan dari proses-proses perizinan dan persyaratan lain yang diperlukan, dan memfasilitasi solusi terhadap

Central Java Power Plant Project

The Central Java Power Plant project relates to the construction of a coal-fired power plant facility with a capacity of 2,000 MW located in Batang Regency, Central Java. As a PPP infrastructure project, the plant will be built by PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) consortium with a Built-Own-Operate-Transfer scheme for a concession period of 25 years. On October 6, 2011, IIGF has signed a Guarantee Agreement with BPI and also a Recourse Agreement with PT PLN (Persero) as the Contracting Agency (CA). According to regulations, BPI shall complete the financial close process within one year at the latest following the signing of the Guarantee Agreement.

Entering 2012, there appeared indications that the financial close will be delayed, due to the delayed processing of certain permits, environmental assessment and land acquisition. IIGF has undertaken an anticipatory initiative by forming the Joint Monitoring Committee (JMC), together with representatives from BPI and the CA. Throughout 2012, the JMC played an active role in closely monitoring the progress of the various processes involved to secure the necessary permits other requirements, as well as in facilitating solutions to

berbagai hambatan yang ditemui. Diharapkan, *financial close* proyek PLTU Jawa Tengah dapat berlangsung sesuai jadwal pada Oktober 2013.

Proyek Kereta Api Batu Bara Kalimantan Tengah

Pembangunan jalur kereta api (KA) batu bara Puruk Cahu - Bangkuang - Batanjung di Kalimantan Tengah merupakan salah satu proyek dalam Masterplan Percepatan & Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di Koridor Kalimantan. Jalur KA batu bara Puruk Cahu - Bangkuang - Batanjung menghubungkan lokasi-lokasi penambangan batu bara di wilayah utara provinsi Kalimantan Tengah dengan jaringan logistik di lepas pantai bagian selatan propinsi tersebut yang berbatasan dengan Laut Jawa. Proyek ini akan dapat mengatasi keterbatasan kapasitas angkutan batu bara yang saat ini mengandalkan angkutan tongkang melalui Sungai Barito Hulu dan Sungai Barito Hilir, baik dari sisi volume angkutan per trip maupun ketersediaan jalur sepanjang tahun.

Pada tahap awal, akan dibangun rel kereta api sepanjang sekitar 290 kilometer dari loading station di Puruk Cahu ke unloading station di Mangkatip. Dari sini, batu bara akan diangkut menggunakan tongkang melalui Sungai Barito ke kapal-kapal penerima yang sandar di lepas pantai. Proyek ini merupakan proyek perkereta-apian umum pertama di Indonesia yang akan dibangun dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Proyek yang diperkirakan memakan biaya sebesar US\$ 2,6 miliar tersebut akan dibangun dengan skema Built-Own-Operate-Transfer (BOOT) dengan masa konsesi 50 tahun.

problems encountered along the way. The financial close of the Central Java Power Plant project is expected to occur as scheduled in October 2013.

Central Kalimantan Coal Railway Project

The construction of the Puruk Cahu - Bangkuang - Batanjung coal railway in Central Kalimantan is one of several projects envisioned in the Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia's Economic Development (MP3EI) for the Kalimantan Corridor. The Puruk Cahu - Bangkuang - Batanjung coal railway will connect the coal mining locations at northern Central Kalimantan province with the offshore logistics network south of the province bordering with the Sea of Java. The railway will eliminate the limitations in coal hauling capacities currently relying on river barge transportation along the Barito Hulu and Barito Hilir rivers, in terms of coal haulage volume per trip as well as its year-round availability.

At the initial stage, plans are to build some 290 kilometers of railway tracks connecting the loading station at Puruk Cahu with the unloading station at Mangkatip. From here, coal would be transported using barges along the Barito River to the receiving ships offshore. This will be the first public railway system in Indonesia that will be developed under the Public Private partnership (PPP) scheme. At an estimated cost of approximately US\$ 2.6 billion, the project will be built with a Built-Own-Operate-Transfer (BOOT) scheme for a concession period of 50 years.

Proyek Kereta Api Batu Bara

Coal Railway Project



Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Penanggung Jawab Pelaksana Proyek (PJPK) menjalin kerja sama dengan PT PII guna mendukung penyiapan transaksi proyek melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani pada tanggal 30 November 2011. Terkait dengan proses penjaminan proyek KA batu bara, PT PII telah menerima dokumen Usulan Penjaminan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah pada Oktober 2012. PT PII telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait dengan kemungkinan keikutsertaan Pemerintah sebagai co-guarantor pada proyek ini.

Kelanjutan proses lelang proyek ini menunggu keputusan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

The provincial government of Central Kalimantan as the Contracting Agency (CA) has signed a Cooperation Agreement with IIGF on November 30, 2011, to support in the preparation for the project transactions. With regard to the guarantee process, IIGF has received the Guarantee Application Package (GAP) document submitted by the provincial government of Central Kalimantan in October 2012. IIGF has arranged a series of coordination meetings with the Ministry of Finance regarding the possible involvement of the Government as co-guarantor in the coal railway project.

The continuation of project tendering process is subject to Central Kalimantan Provincial Government decision.



Proyek Sistem Penyediaan Air Minum Clean Water Supply Project



Proyek Sistem Penyediaan Air Minum Bandar Lampung

Penyediaan air minum untuk kota Bandar Lampung, ibu kota propinsi Lampung, saat ini sudah tidak memadai lagi terutama akibat keterbatasan sumber air baku yang dipakai, yaitu sungai dalam kota. Untuk itu, Pemerintah melalui Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai PJPK merencanakan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bandar Lampung yang akan mengambil pasokan air baku dari sungai Way Sekampung, sekitar 21 km sebelah utara kota Bandar Lampung. Dengan nilai investasi sekitar US\$ 100 juta, proyek SPAM Bandar Lampung akan mampu memasok

Bandar Lampung Clean Water Supply Project

The supply of clean water to Bandar Lampung, the capital city of Lampung Province, is no longer adequate to meet current needs, mainly due to the limited capacity of the raw water supply taken from a river that flows within the city. Accordingly, the Government through the Bandar Lampung Municipal Government as the Contracting Agency has plans for the development of a clean water supply system taking the supply of raw water from the Way Sekampung River, some 21 kilometers north of Bandar Lampung. With an estimated investment of some US\$ 100 million, the Bandar

500 liter/detik air bersih untuk meningkatkan jumlah penduduk Bandar Lampung yang dapat menikmati pelayanan air bersih.

Sampai dengan akhir tahun 2012, proyek SPAM Bandar Lampung telah selesai dengan tahap tender pra-kualifikasi dengan terpilihnya empat peserta untuk maju ke babak lelang proyek. Proyek SPAM Bandar Lampung distruktur sebagai proyek Built-Operate-Transfer (BOT) dengan masa konsesi 25 tahun. Mengingat sifat dari proyek infrastruktur air minum untuk publik yang umumnya memiliki margin keuntungan tipis, SPAM Bandar Lampung merupakan salah satu proyek yang akan didukung oleh Pemerintah melalui penyediaan fasilitas Viability Gap Funding (VGF).

Terkait dengan penyediaan fasilitas penjaminan proyek, PT PII telah melakukan proses *appraisal* atas dokumen Usulan Penjaminan yang diajukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung pada Agustus 2012. Atas hasil appraisal tersebut, pada Oktober 2012, PT PII telah mengeluarkan pernyataan komitmen (Letter of Intent) pemberian jaminan dengan beberapa pra-kondisi. Nilai yang dijamin masih menunggu keputusan Pemerintah (Kementerian Keuangan) mengenai besarnya nilai VGF untuk proyek tersebut. Dengan penerbitan Letter of Intent tersebut, proyek SPAM Bandar Lampung adalah proyek kedua yang berpotensi memperoleh fasilitas penjaminan dari PT PII, setelah proyek PLTU Jawa Tengah.

Lampung Clean Water Supply project will eventually supply the inhabitants of Bandar Lampung with clean water at 500 liters/second.

Up to year-end 2012, the Bandar Lampung Clean Water Supply project has already completed the pre-qualification stage with the selection of four shortlisted bidders for the subsequent tender process. The project is structured in a Built-Operate-Transfer (BOT) scheme with a concession period of 25 years. In view of the small margins typical in public-use clean water installations, the Bandar Lampung Clean Water Supply project has been considered as one of the projects that will be supported by the Government through a Viability Gap Funding (VGF) facility.

In regards the process for a guarantee facility for the project, IIGF has undertaken the appraisal process on the Guarantee Application Package document submitted by the Municipal Government of Bandar Lampung in August 2012. Based on the appraisal, IIGF in October 2012 has issued a Letter of Intent to provide guarantee, subject to some preconditions. The underwritten value will be determined pending the decision of the Ministry of Finance regarding the amount of VGF facility for the project. With the issuance of the Letter of Intent, the Bandar Lampung Clean Water Supply project is potentially the second project to receive a guarantee facility from IIGF, after the Central Java Power Plant project.

Proyek PLTU Mulut Tambang

Mine-Mouth Power Plant Project



Proyek PLTU Mulut Tambang Sumsel-9 & 10

Pada tahun 2012, PT PLN (Persero) mengumumkan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Sumatera Selatan-9 dan 10. Skema PLTU Mulut Tambang mengacu pada pembangunan PLTU di lokasi bersebelahan dengan area tambang batu bara sehingga dapat menekan biaya pasokan batu bara sebagai sumber energi PLTU tersebut. Sebagai salah satu pusat penambangan batu bara di Indonesia, Sumatera Selatan merupakan lokasi yang ideal untuk pembangunan PLTU Mulut Tambang, termasuk untuk memasok kebutuhan listrik di Jawa-Bali yang tumbuh pesat, sementara lahan untuk pembangunan PLTU skala besar semakin sulit diperoleh. PLTU Mulut Tambang Sumsel-9 (2x600 MW) dan PLTU Mulut Tambang Sumsel-10 (1x600 MW) merupakan proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah untuk dilaksanakan dengan skema KPS. Dengan estimasi nilai investasi sebesar US\$ 4 miliar, produksi listrik dari PLTU Sumsel-9 dan Sumsel-10 juga akan dialirkan ke Jawa-Bali melalui jaringan interkoneksi transmisi Sumatera-Jawa 500 kV dengan sistem High Voltage Direct Current (HVDC) yang secara paralel juga akan dibangun oleh PLN.

Sejak pertengahan 2011, PT PII telah terlibat dalam proses konsultasi Pre-Feasibility Study untuk proyek ini oleh PLN sebagai PJPK. Selanjutnya, PLN dan PT PII telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada Juni 2012 untuk peran aktif PT PII dalam memberikan pendampingan kepada PLN dalam proses persiapan dan transaksi proyek. Menjelang akhir tahun, PLN membuka pra-kualifikasi tender pembangunan proyek, dengan sebanyak delapan konsorsium yang memasukkan dokumen pra-kualifikasi per 31 Januari 2013. Secara paralel, PT PII juga melakukan kajian awal terhadap berbagai risiko yang berpotensi timbul dari struktur proyek yang akan diambil, khususnya terhadap risiko regulasi akibat perubahan peraturan terkait harga batu bara ataupun royalti batu bara.

Sumsel-9 & 10 Mine-Mouth Power Plant Project

In 2012, PT PLN (Persero), the state power company, announced plans for the construction of Sumatera Selatan-9 and -10 coal-fired mine-mouth power plants. The mine-mouth scheme refers to the construction of coal-fired power plant adjoining a coal mine site, resulting in reduced transportation costs of the coal used as fuel in the power plant. Containing some of Indonesia's largest coal reserves, South Sumatera provides an ideal location in which to build a coal-fired power plant. The electricity could also be supplied to meet the fast growing needs of the Java-Bali electricity grid, as sufficient land areas in which to build large-capacity power plant is becoming more difficult to find in the Java-Bali region. The Sumsel-9 (2x600 MW) and Sumsel-10 (1x600 MW) Mine-Mouth Power Plants have been allocated by the Government to be built under the PPP scheme. With an estimated investment cost of US\$ 4 billion in total, the electricity generated by the Sumsel-9 and Sumsel-10 power plants will also be delivered to the Java-Bali grid using the 500 kV High Voltage Direct Current (HVDC) Sumatera-Java transmission interconnection network that will be built concurrently by PLN.

Since mid-2011, IIGF has been involved in the consultation process of Pre-Feasibility Study for the project by PLN as the Contracting Agency (CA). Then, PLN and IIGF signed a Cooperation Agreement in June 2012 for active guidance to PLN in the preparation and transaction processes for the project. Near the end of the year, PLN opened the tender pre-qualification process that attracted the interest of eight consortia. All of these interested bidders have submitted their pre-qualification documents by the deadline on January 31, 2013. Parallel to this, IIGF has started the initial review of potential risks inherent in the project structure to be opted, especially the regulatory risk related to changes in coal price or royalty.

Proyek dalam Proses

Projects in the Pipeline

Selain proyek-proyek infrastruktur yang telah dibahas di atas, PT PII juga tengah menangani sejumlah proyek infrastruktur lain yang telah direncanakan untuk dibangun menggunakan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Kemajuan status proyek-proyek tersebut sampai dengan akhir tahun 2012 adalah sebagai berikut:

In addition to infrastructure projects described in the preceding pages, IIGF is also engaged in a number of other infrastructure projects that have been planned to be developed using the Public Private Partnership (PPP) scheme. Up until year-end 2012, the progress on these projects is as follows:

No.	Nama Proyek Project Name	Uraian Description	Estimasi Nilai Proyek Estimated Project Value Rp Miliar Billion	Status Status	Rencana Tindak Lanjut oleh PT PII Follow-Up Action by IIGF
1.	Sistem Penyediaan Air Minum - Kota Semarang bagian barat Clean Water Supply System - Western Semarang	Penyediaan air minum dengan kapasitas 1.050 liter/detik untuk kota Semarang bagian barat. The provision of clean water with capacity of 1,050 liter/second to supply the western part of the city of Semarang.	825	IIF mempersiapkan dokumen Usulan Penjaminan dan permohonan VGF. IIF prepares the Guarantee Application Package document and application for VGF.	IIF telah mengkaji Final Business Case/FBC, mulai menyusun alternatif struktur proyek, mencari konsultan teknik, keuangan dan hukum. IIF has reviewed the Final Business Case/FBC, starting to formulate alternative project structuring, and is searching for technical, financial and legal consultants.
2.	Sistem Penyediaan Air Minum - Umbulan Clean Water Supply System - Umbulan	Penyaluran air curah dengan kapasitas 4.000 liter/detik dari Kabupaten Pasuruan ke 5 daerah di Jawa Timur. The supply of bulk raw water with capacity of 4,000 liter/second from Pasuruan Regency to 5 regions in East Java.	2.068	Proses appraisal dan structuring penjaminan proyek. Project guarantee appraisal dan structuring.	Menyampaikan struktur transaksi proyek agar proyek lebih credible; melengkapi kajian teknik, lingkungan hidup, sosial, keuangan dan penyempurnaan draft Perjanjian Kerjasama; melakukan structuring guarantee dengan PJKP dan bidders sebelum dikeluarkan In Principle Approval. Submitting project transaction structure for a more credible project; completing the technical, environmental, social and financial studies; improving the draft of Cooperation Agreement; engaging in guarantee structuring with CA and bidders prior to the issuance of In Principle Approval.
3.	Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Toll Road	Pembangunan dan pengelolaan jalan tol sepanjang sekitar 60 kilometer antara Medan - Bandara Kualanamu - Tebing Tinggi. Construction and operation of approximately 60 kilometers of toll road connecting Medan - Kualanamu Airport-Tebing Tinggi.	4.700	Telah diumumkannya tahapan Pre-Qualification (PQ). Announcement of the Pre-Qualification (PQ) stage.	Melakukan konfirmasi dengan pihak BPJT mengenai PQ dan koordinasi atas penyerahan GAP oleh PJKP. Confirmation with the BPJT on the PQ and coordination in regards the submission of GAP by CA.

Tinjauan Keuangan

Financial Review

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (“Perusahaan”) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang penyediaan penjaminan bagi pengembangan proyek infrastruktur dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS).

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) or Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (“the Company”) is a State-Owned Enterprise (SOE) engaged in the provision of guarantee facilities for the development of infrastructure project with the Public Private Partnership (PPP) scheme.



Perusahaan memperoleh pendapatan operasi terutama dari aktivitas penjaminan serta dari aktivitas pengelolaan dana. Pendapatan dari penjaminan terdiri atas pendapatan premi (*guarantee fee* dan *processing fee*) serta pendapatan provisi dan komisi terkait dengan proses penjaminan (*arranging fee*, *ceded commissions*, dan provisi dan komisi lain-lain). Sementara itu, pendapatan dari pengelolaan dana diperoleh dari penempatan aset keuangan Perusahaan pada berbagai instrumen investasi keuangan seperti penempatan dana pada deposito berjangka di bank, penempatan dana pada portofolio obligasi baik untuk tujuan diperdagangkan maupun untuk dimiliki hingga jatuh tempo, serta penempatan dana pada produk reksadana.

Sedangkan Beban operasi Perusahaan terutama terdiri dari beban penjaminan, beban administrasi dan umum, serta beban pengembangan terkait dengan komunikasi dan sosialisasi bidang usaha Perusahaan.

Kinerja Keuangan 2012

Berikut ini adalah pembahasan dan analisa mengenai hasil-hasil operasional dan posisi keuangan Perusahaan pada tahun 2012, yang disajikan berdasarkan Laporan Keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 yang telah diaudit.

The Company generates operating revenues from activities in project underwriting and fund management. Revenues from project underwriting consist of premium revenues (*guarantee fees* and *processing fees*) as well as guarantee-related fees and commissions (*arranging fees*, *ceded commissions*, and other fees and commissions). Revenues from fund management are derived from placement of the Company's financial assets on a variety of financial investment instruments such as time deposit placements in banks and portfolio investment in bonds, consisting of available for sale bonds and held to maturity bonds, as well as investments in mutual funds products.

The Company's expenses meanwhile consist of underwriting expenses, general and administrative expenses, and development expenses related to the communication and socialization of the Company's business.

2012 Financial Performance

The following is an analysis and discussions on the Company's results of operations and financial position for the year 2012, presented on the basis of the audited Financial Statements of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) for the years ended 31 December 2012 and 2011.

Hasil-Hasil Operasional

Results of Operations

Hasil-Hasil Operasional Results of Operations	(dalam ribuan Rupiah)	
	2012	2011
Pendapatan Operasi Operating Revenue	312,240,468	228,349,244
Beban Operasi Operating Expenses	50,666,380	37,218,439
Laba Sebelum Pajak Profit Before Income Tax	261,574,088	191,130,805
Laba Bersih Net Income	213,378,069	157,141,089
Jumlah Pendapatan Komprehensif Total Comprehensive Income	214,778,786	157,657,468

Pendapatan Operasi

Perusahaan membukukan pendapatan operasi sebesar Rp 312,2 miliar pada tahun 2012. Jumlah tersebut merupakan kenaikan 36,7% dari pendapatan operasi sebesar Rp 228,3 miliar pada tahun 2011, dan seluruhnya merupakan pendapatan dari pengelolaan dana.

Pendapatan dari pengelolaan dana meningkat dari Rp 183,1 miliar pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp 312,2 miliar pada tahun 2012, sejalan dengan kenaikan jumlah dana yang dikelola Perusahaan pada tahun 2012. Pendapatan bunga dari penempatan pada deposito berjangka berkontribusi Rp 239,6 miliar, atau 76,7%, dari total pendapatan dari pengelolaan dana, disusul oleh pendapatan bunga dari investasi pada instrumen berpendapatan tetap sebesar Rp 54,9 miliar (17,6%) dan laba dari penjualan obligasi pada portofolio investasi tersedia untuk dijual sebesar Rp 17,7 miliar (5,7%).

Beban Operasi

Beban operasi tercatat meningkat sebesar 36,1%, dari Rp 37,2 miliar pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp 50,7 miliar di 2012. Beban administrasi mengambil porsi 64,4% dari beban operasi Perusahaan, disusul oleh beban penjaminan dengan 27,0% dan beban pengembangan dengan 5,2%.

Beban administrasi dan umum naik sebesar Rp 7,99 miliar, atau 32,5%, menjadi sebesar Rp 32,62 miliar pada tahun 2012. Komponen terbesar pada beban umum dan administrasi adalah beban pegawai sebesar Rp 20,51 miliar, mewakili 62,9% dari total beban umum dan administrasi. Di tahun 2012, beban pegawai tercatat naik sebesar Rp 6,79 miliar, atau 49,5%, seiring dengan penambahan pegawai pada tahun tersebut. Komponen-komponen utama lainnya adalah beban jasa profesional serta

Operating Revenues

The Company posted operating revenues of Rp 312.2 billion in 2012. The amount represents an increase of 36.7% over operating revenues of Rp 228.3 billion in 2011, and consists entirely of income from investments.

Income from investments increased from Rp 183.1 billion in 2011 to Rp 312.2 billion in 2012, in line with the growth of the Company's portfolio investment in 2012. Interest income from placement in time deposits contributed Rp 239.6 billion, or 76.7%, of total income from investments, followed by interest income from fixed coupon bonds of Rp 54.9 billion (17.6%) and gain from sale of bonds in the available for sale portfolio of Rp 17.7 billion (5.7%).

Operating Expenses

Operating expenses recorded an increase of 36.1% from Rp 37.2 billion in 2011 to Rp 50.7 billion in 2012. General and administrative expenses accounted for 64.4% of the Company's total operating expenses, followed by guarantee expenses with 27.0% and development expenses with 5.2%.

General and administrative expenses increased by Rp 7.99 billion, or 32.5%, to Rp 32.62 billion in 2012. The largest component in general and administrative expenses is personnel expenses of Rp 20.51 billion, representing 62.9% of total general and administrative expenses. In 2012, personnel expenses recorded an increase of Rp 6.79 billion, or 49.5%, in line with additional employees recruited in that year. The other major components are professional fees and rent of Rp 4.09 billion and

beban sewa, yang tercatat sebesar Rp 4,09 miliar dan Rp 3,55 miliar, berturut-turut, pada tahun 2012. Jumlah-jumlah tersebut mencerminkan kenaikan sebesar 34,6% dan 60,2% masing-masing, dibandingkan pengeluaran untuk jasa profesional dan sewa pada tahun 2011.

Beban penjaminan tercatat sebesar Rp 13,70 miliar pada tahun 2012, relatif stabil dibandingkan tahun 2011 sebesar Rp 13,13 miliar. Komponen utama pada beban penjaminan adalah beban pegawai, beban konsultan dan beban perjalanan dinas. Beban pegawai dan beban perjalanan dinas tercatat naik 28,4% dan 79,6%, berturut-turut, menjadi sebesar Rp 12,01 miliar dan Rp 1,60 miliar, masing-masing, pada tahun 2012. Kenaikan ini dikompensasi oleh penurunan pada beban konsultan, yang tercatat sebesar Rp 2,67 miliar pada tahun 2011 dan nihil di tahun 2012.

Beban pengembangan sementara itu meningkat sebesar Rp 0,91 miliar, atau 52,3%, menjadi sebesar Rp 2,64 miliar di tahun 2012. Komponen terbesar beban pengembangan adalah biaya lokakarya yang tercatat sebesar Rp 1,59 miliar di tahun 2012, dibandingkan Rp 1,29 miliar di tahun 2011.

Laba Bersih

Perusahaan membukukan laba bersih sebesar Rp 213,38 miliar pada tahun 2012, yang merupakan peningkatan sebesar Rp 56,24 miliar, atau 35,8%, dari laba bersih tahun sebelumnya. Perolehan laba bersih tersebut mencerminkan Return on Equity (ROE) sebesar 5,47%.

Posisi Keuangan

Posisi Keuangan Financial Position	(dalam ribuan Rupiah)	
	2012	2011
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalent	2,746,643,432	2,632,388,309
Investasi Investment	2,142,262,853	1,078,119,828
Jumlah Aset Lainnya Other Total Assets	77,931,051	28,122,990
Jumlah Aset Total Assets	4,966,837,336	3,738,631,127
Kewajiban Liabilities	49,720,071	34,842,648
Ekuitas Equity	4,917,117,265	3,703,788,479

Jumlah Aset

Pada akhir tahun 2012, jumlah aset Perusahaan tercatat sebesar Rp 4.966,84 miliar, meningkat sebesar 32,9% dari posisi setahun sebelumnya sebesar Rp 3.738,63 miliar. Pertumbuhan aset Perusahaan terutama berasal dari kenaikan pada

Rp 3.55 billion, respectively, in 2012. The above amounts represented increases of 34.6% and 60.2%, respectively, compared to expenses for professional fees and rent, respectively, in 2011.

Guarantee expenses amounted to Rp 13.70 billion in 2012, relatively stable compared with Rp 13.13 billion in 2011. The major components of guarantee expenses are personnel expenses, consultancy fees, and business travels. Personnel expenses and business travels increased by 28.4% and 79.6%, respectively, to Rp 12.01 billion and Rp 1.60 billion, respectively, in 2012. These increases are compensated by the decline in consultancy fees, which amounted to Rp 2.67 billion in 2011 and nil in 2012.

Development expenses meanwhile grew by Rp 0.91 billion, or 52.3%, to Rp 2.64 billion in 2012. The largest component of development expenses is workshop expenses of Rp 1.59 billion in 2012, compared to Rp 1.29 billion in 2011.

Net Income

The Company posted Rp 213.38 billion in net income in 2012, which represented an increase of Rp 56.24 billion, or 35.8%, from net income in the preceding year. The net income reflected a Return on Equity of 5.47% in 2012.

Financial Position

Total Assets

As at year-end 2012, the Company's total assets amounted to Rp 4,966.84 billion, an increase of 32.9% over its position a year earlier at Rp 3,738.63 billion. The growth in total assets was primarily due to increases in the Company's cash and cash

akun kas dan setara kas serta akun portofolio investasi Perusahaan, menyusul adanya penambahan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 1.000 miliar oleh Pemerintah pada bulan Desember 2012.

Posisi kas dan setara kas pada akhir tahun 2012 tercatat sebesar Rp 2.746,64 miliar, naik 4,3% dari posisi setahun sebelumnya. Hampir seluruh (99,8%) kas dan setara kas Perusahaan berupa penempatan pada deposito berjangka dengan tenor 3-bulan atau kurang, yang jumlahnya mencapai sebesar Rp 2.741,78 miliar pada akhir tahun 2012, dibandingkan Rp 2.623,63 miliar di akhir tahun 2011.

Portofolio investasi Perusahaan tumbuh 98,7%, atau sebesar Rp 1.064,14 miliar, dari Rp 1.078,12 miliar di akhir tahun 2011 menjadi sebesar Rp 2.142,26 miliar di akhir tahun 2012, terutama akibat adanya tambahan PMN seperti disebutkan di atas. Penempatan dana pada deposito berjangka dengan tenor lebih dari 3-bulan tumbuh 73,2% menjadi sebesar Rp 1.316,50 miliar, yang mewakili 61,5% dari total portofolio investasi Perusahaan di akhir tahun 2012. Dana selebihnya diinvestasikan pada obligasi tersedia untuk dijual sebesar Rp 257,22 miliar, obligasi dimiliki hingga jatuh tempo sebesar Rp 463,85 miliar dan portofolio reksadana sebesar Rp 104,69 miliar.

Kewajiban

Jumlah kewajiban Perusahaan tercatat meningkat 42,7%, atau sebesar Rp 14,88 miliar, menjadi sebesar Rp 49,72 miliar pada akhir tahun 2012, dari Rp 34,84 miliar setahun sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama mencerminkan kenaikan sebesar Rp 12,87 miliar pada akun biaya yang masih harus dibayar, menjadi sebesar Rp 21,46 miliar di akhir tahun 2012. Komponen utama lainnya pada kewajiban Perusahaan adalah akun pendapatan tangguhan sebesar Rp 22,31 miliar, yaitu bagian dari arranging fee proyek PLTU Jawa Tengah yang dapat dikembalikan dan akan diakui pada saat proyek dimulai (financial close).

Ekuitas

Total ekuitas tercatat sebesar Rp 4.917,12 miliar di akhir tahun 2012, dibandingkan Rp 3.703,79 setahun sebelumnya. Peningkatan ekuitas tersebut mencerminkan kenaikan pada modal disetor akibat penambahan penyertaan modal Pemerintah sebesar Rp 1.000,0 miliar pada tahun 2012, serta kenaikan pada saldo laba ditahan dari laba bersih tahun 2012.

equivalent account and portfolio investment account, following the additional State Equity Participation (PMN) of Rp 1,000 billion by the Government in December 2012.

Cash and cash equivalent at year-end 2012 amounted to Rp 2,746.64 billion, increasing by 4.3% from its position a year earlier. Almost all (99.8%) of the Company's cash and cash equivalent represents time deposit placements with maturities of 3-month or less, which amounted to Rp 2,741.78 billion at year-end 2012, compared with Rp 2,623.63 billion at end of 2011.

The Company's portfolio investment grew by 98.7%, or increased by Rp 1,064.14 billion, from Rp 1,078.12 billion at year-end 2011 to Rp 2,142.26 billion at year-end 2012, due primarily to the addition of PMN as mentioned above. Funds at time deposit placements with maturities of more than 3-month grew 73.2% to Rp 1,316.50 billion, representing 61.5% of the Company's total portfolio investment at the end of 2012. The remaining funds were invested in available for sale bonds of Rp 257.22 billion, held to maturity bonds of Rp 463.85 billion, and mutual fund portfolio of Rp 104.69 billion.

Liabilities

The Company's total liabilities recorded an increase of 42.7%, or Rp 14.88 billion, to Rp 49.72 billion at year-end 2012, from Rp 34.84 billion a year earlier. The increase in total liabilities mostly reflected an increase of Rp 12.87 billion in accrued expenses, which amounted to Rp 21.46 billion at year-end 2012. The other major component of the Company's liability accounts is the unearned income account of Rp 22.31 billion, representing part of the arranging fees (refundable) for the Central Java Power Plant project, which will be refunded and recognized as income at the time of financial close of the project.

Shareholders' Equity

Total shareholders' equity amounted to Rp 4,917.12 billion as at year-end 2012, compared to Rp 3,703.79 billion a year earlier. The increase in shareholders' equity reflected the increase in fully paid capital from additional PMN by the Government of Rp 1,000.0 billion in 2012, as well as the increase in retained earnings from 2012 net income.

Rasio Keuangan

Financial Ratios

Rasio-Rasio Keuangan Financial Ratios	dalam persentase in percentage	
	2012	2011
Marjin Laba Operasi Operating Profit Margin	83.8%	82.1%
Marjin Laba Bersih Net Profit Margin	68.3%	68.8%
Return on Equity Return on Equity	5.47%	7.0%

Pengungkapan Lain-Lain

Other Disclosures

Kemampuan Membayar Hutang

Sampai dengan akhir tahun 2012, Perusahaan tidak memiliki hutang jangka panjang yang digunakan untuk membiayai asetnya. Lihat pembahasan mengenai struktur modal Perusahaan di bawah ini.

Debt Servicing Ability

Up until year-end 2012, the Company has not incurred any long-term debts to finance its assets. See the following discussion under Capital Structure.

Struktur Modal

Aset Perusahaan saat ini sepenuhnya didanai dari ekuitas Perusahaan, berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) oleh Pemerintah. Berdasarkan hasil keputusan pemegang saham yang dituangkan dalam akta notaris Aryanti Artisari, SH, MKn No. 145 tanggal 30 Agustus 2012, Pemerintah selaku pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar Perusahaan menjadi sebesar Rp 9 triliun (nilai penuh). Pada 31 Desember 2012, modal ditempatkan dan disetor penuh tercatat sebesar Rp 4.500 miliar, dibandingkan Rp 3.500 miliar setahun sebelumnya, yaitu melalui tambahan PMN sebesar Rp 1.000 miliar pada bulan Desember 2012.

Capital Structure

The Company's assets are currently entirely funded from its equity capital, in the form of State Equity Participation (PMN) by the Government. Based on the shareholders' resolutions as documented in notarial deed No. 145 dated August 30, 2012, from notary Aryanti Artisari, SH, Mkn., the Government as shareholder approved the increase in the Company's authorized share capital to Rp 9 trillion (full amount). At December 31, 2012, issued and fully paid capital amounted to Rp 4,500 billion, compared with Rp 3,500 billion a year earlier, due to the additional PMN of Rp 1,000 billion made in December 2012.

Ikatan yang Material Untuk Investasi Barang Modal

Pada tahun 2012, Perusahaan tidak mempunyai ikatan material terkait investasi barang modal.

Material Commitments in Capital Expenditures

In 2012, the Company has no material commitments regarding capital expenditures.

Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian Luar Biasa

Tidak terdapat informasi keuangan yang mengandung kejadian yang bersifat luar biasa atau jarang terjadi pada tahun 2012.

Financial Information with Extraordinary Events

There were no financial information with extraordinary or rare events occurring in 2012.

Dampak Perubahan Harga

Tidak ada pengungkapan tentang dampak perubahan harga terhadap pendapatan dan laba bersih Perusahaan.

Impact of Price Changes

There is no disclosure of the impact of changes in price to the Company's revenues and net income.

Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan atas Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2012.

Subsequent Events

There are no events of material importance subsequent to the balance sheet date that need to be disclosed in the 2012 Financial Statements.

Kebijakan Dividen

Kebijakan pembagian dividen ditentukan oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Sampai dengan tahun 2012, belum ada kebijakan tertentu mengenai pembagian dividen.

Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan

Sepanjang tahun 2012, tidak terdapat transaksi material oleh Perusahaan yang mengandung benturan kepentingan.

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan

Pada tahun 2012 tidak terdapat perubahan terhadap peraturan, regulasi atau undang-undang lain yang berpengaruh signifikan terhadap Perusahaan.

Transaksi dengan Pihak yang Berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi dengan Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang saham Perusahaan maupun dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan entitas sepengendali sebagai pihak yang berelasi. Perusahaan menempatkan dana dalam bentuk deposito dan obligasi dari pihak-pihak berelasi yang dilakukan dengan syarat dan kondisi yang disepakati.

Rincian pendapatan pengelolaan dana kepada pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Dividend Policy

Dividend policy is determined by the shareholders in the General Meeting of Shareholders. Up to 2012, the Company does not have definite policies regarding the distribution of dividends.

Material Transactions with Conflict of Interest

Throughout 2012, the Company did not engage in any material transaction with conflict of interest.

Changes in Laws and Regulations

In 2012, there were no changes in any rulings, regulations or laws that have a significant impact on the Company.

Transactions with Related Parties

In the course of doing business, the Company engages in transactions with the Government of Indonesia as the Company's shareholders, and also with State-Owned Enterprises as entities under a common control and as such are considered related parties. The Company engages in fund placements in deposit accounts and bonds of related parties, whereas such transactions are done under the agreed terms and conditions.

Following are details of revenues from fund placements with related parties:

(Rp ribu Rp thousand)	2012	2011
Bank Nagari	35,608,075	-
Bank Jabar Banten	33,257,524	16,065,589
Pemerintah Republik Indonesia	26,962,229	2,085,817
Bank Syariah Mandiri	18,206,462	32,057,336
PT BPD Sumatera Utara	17,333,678	14,812,483
Bank Tabungan Negara Syariah	15,851,141	-
PT Aneka Tambang	9,183,173	-
Bank Rakyat Indonesia	9,053,400	4,206,104
PT BPD Jawa Timur	7,168,601	-
Bank Tabungan Negara	6,065,426	11,800,597
PT Pembangkit Listrik Negara	2,992,180	1,655,708
PT Jasamarga	2,416,955	201,178
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	2,354,520	-
Bank Mandiri	1,797,937	624,410
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	1,777,305	1,456,097
Bank Bukopin	1,656,039	-
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	858,657	-
Danareksa	211,891	-
PT Indosat	167,795	21,196
Jumlah Total	192,922,988	84,986,515
Persentase terhadap jumlah pendapatan Percentage of Total Revenue	61.79%	37.22%

Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi atau Restrukturisasi Hutang

Perusahaan mengelola dana Penempatan Modal Negara untuk penjaminan dengan menginvestasikan dana-dana tersebut pada instrumen pasar uang dan pasar modal sesuai prinsip kehati-hatian, dengan tujuan untuk memelihara nilai dana, menjaga likuiditas Perusahaan, dan mengoptimalkan imbal-hasil dari dana-dana yang diinvestasikan.

Total jumlah dana yang dikelola per tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebesar berturut-turut Rp 4.884,04 miliar dan Rp 3.701,75 miliar.

Kapasitas Penjaminan

Besarnya kapasitas penjaminan merupakan faktor penting dalam menentukan banyaknya proyek pembangunan infrastruktur yang dapat dijamin oleh Perusahaan, serta kredibilitas Perusahaan dalam menjamin suatu proyek tertentu. Sampai dengan akhir tahun 2012, Perusahaan memiliki kapasitas penjaminan yang berasal dari penyertaan modal oleh Pemerintah sejumlah total Rp 4.500 miliar.

Perusahaan menerapkan suatu kebijakan dalam pemberian penjaminan pada proyek KPS, sebagai berikut:

- Untuk proyek < Rp 1 triliun: termasuk risiko Terminasi (komponen ekuitas dan pinjaman) dengan estimasi eksposur = Total Project Cost
- Untuk proyek > Rp 1 triliun: di luar risiko Terminasi (komponen pinjaman) dengan estimasi eksposur = periodical payment dari komponen Capital Recovery
- Saldo minimal dari modal Perusahaan dijaga sekitar Rp 200 miliar (di luar nilai penjaminan)

Selain melalui penyertaan modal Pemerintah, Perusahaan juga dapat menambah kapasitas penjaminan yang dimiliki melalui kerja sama fasilitas penjaminan dengan lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, MIGA dan Asian Development Bank.

Investments, Expansion, Divestment, Acquisition or Debt Restructuring

The Company manages funds derived from State Equity Participation for guarantee purposes by investing those funds in money market and capital market instruments in accordance with prudent principle, with the objective of preserving the value of funds, maintaining the Company's liquidity, and optimizing returns on invested funds.

Total amount of funds under management as at 31 December 2012 and 2011 were Rp 4,884.04 billion and Rp 3,701.75 billion, respectively.

Guarantee Capacity

The amount of guarantee capacity is an important factor that determines how much the Company can provide guarantee facilities to infrastructure development projects as well as the Company's credibility in underwriting a certain project. Up to year-end 2012, the Company has a guarantee capacity derived from the Government's equity participation in the Company's fully paid capital of Rp 4,500 billion.

The Company has established a policy for the provision of guarantee facilities to PPP projects, as follows:

- For projects < Rp 1 trillion: including Termination risk (equity and debt components) with estimated exposure = Total Project Cost
- For projects > Rp 1 trillion: excluding Termination risk (debt component) with estimated exposure = periodical payment of Capital Recovery component
- Minimum balance in the Company's capital account is kept at around Rp 200 billion (excluding the value of guarantee facilities)

In addition to State Equity Participation, the Company can also expand its guarantee capacity through co-guarantee cooperation with international financial institution such as the World Bank, MIGA and the Asian Development Bank.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan

**Good Corporate
Governance Implementation**

Sejak awal beroperasinya tiga tahun yang lalu, Perseroan memiliki komitmen untuk mengelola aktivitas bisnis dan operasionalnya secara profesional sesuai dengan standar praktik Tata Kelola Perusahaan (GCG) terbaik.

Since the start of its commercial operations three years ago, the Company has maintained its commitment to manage its business and operational activities in a professional manner according to best practice standards of Good Corporate Governance (GCG).



Perseroan meyakini bahwa penerapan praktik terbaik GCG akan berperan penting dalam membangun reputasi dan kredibilitas Perseroan, sekaligus kemampuannya untuk melaksanakan secara efektif mandatnya sebagai sebuah Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.

The Company believes that the practice of GCG will be crucial in building its reputation and credibility, as well as its capability to effectively perform its mandate as a Infrastructure Guarantee Enterprise.

Berikut ini adalah gambaran pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan oleh organ-organ utama dan pendukung Perseroan pada tahun 2012.

Following are descriptions of the implementation of Corporate Governance by the company's primary and support organs in 2012.

Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam struktur Tata Kelola Perseroan, yang memegang seluruh kewenangan yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan dalam batas-batas yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. Kewenangan tersebut termasuk antara lain wewenang untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta untuk menyetujui laporan tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest organ in the Company's governance structure, which holds all the powers that are not delegated to the Board of Commissioners or the Board of Directors, as defined in the Limited Liability Company Law and/or the Company's Articles of Association. These include, among others, the authority to appoint and dismiss members of the Board of Commissioners and Board of Directors, and to approve the Company's annual report including to ratify the Financial Statements and the Board of Commissioners Supervisory Report.

Pada tahun 2012, Perseroan menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS, sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2012 pada tanggal 26 Januari 2012, dengan agenda: (i) Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2012; (ii) Persetujuan Kontrak Manajemen tahun 2012; (iii) Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun 2012.
2. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 14 Juni 2012, dengan agenda: (i) Pengesahan Laporan Tahunan tahun buku 2011 yang terdiri dari pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2011, pengesahan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2011, pemberian acquit et de charge kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang telah dijalankan selama tahun buku 2011, dan persetujuan pencapaian kinerja manajemen sesuai Kontrak Manajemen tahun buku 2011; (ii) Menyetujui penetapan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2012, (iii) Menyetujui penggunaan atas laba Perseroan serta pembayaran tantiem, serta (iv) Menyetujui tata cara penetapan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2012.

In 2012, the Company held 2 (two) GMS, as follow:

1. General Meeting of Shareholders for 2012 Work and Budget Plan on January 26, 2012, with the agenda: (i) Approval of the 2012 Work and Budget Plan; (ii) Approval of the 2012 Management Contract; (iii) Approval of the 2012 Work and Budget Plan for the Partnership and Community Development Program.
2. Annual General Meeting of Shareholders on June 14, 2012, with the agenda: (i) Ratification of the Annual Report for fiscal 2011, comprising the ratification of the Company's Financial Statements for fiscal 2011, ratification of the Financial Statements of Partnership and Community Development Program for fiscal 2011, full release and discharge for all members of the Board of Commissioners and Board of Directors for their supervision and management actions during fiscal 2011, and approval of the achievement of management performance in accordance with Management Contract for fiscal 2011; (ii) Approval of the remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Directors for fiscal 2012, (iii) Approval of the allocation of the Company's net income and the payment of tantiem; and (iv) Approval of the procedure for the appointment of Public Accountant to perform the audit on the 2012 Financial Statements.

Dewan Komisaris

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk melakukan tugas-tugas pengawasan secara umum dan/atau khusus sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, memberikan nasehat dan mengawasi pelaksanaan rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi, serta memberikan masukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan terhadap Direksi, dan tidak terlibat dalam kegiatan operasional sehari-hari Perseroan.

Dalam menjalankan fungsi kepengawasannya, Dewan Komisaris berhak untuk memperoleh dari Direksi segala informasi yang diperlukan mengenai Perseroan. Apabila dipandang perlu, anggota Dewan Komisaris, baik secara sendiri-sendiri maupun kolektif, berhak untuk memeriksa kontrak-

Board of Commissioners

Duties, Responsibilities and Authority

The Board of Commissioners is responsible for general and/or specific supervisory duties as defined in the Company's Articles of Association, to provide advice and supervise the implementation of recommendations by the Board of Commissioners to the Board of Directors, and to provide input to the General Meeting of Shareholders. The Board of Commissioners acts in an oversight function to the Board of Directors and is not involved in the day-to-day operations of the Company.

In discharging its oversight function, the Board of Commissioners have the right to receive information about the Company from the Board of Directors. If deemed necessary, members of the Board of Commissioners, individually or collectively, may examine contracts, supporting documents, the

kontrak, dokumen pendukung, kondisi keuangan, transaksi pihak yang berelasi dan informasi lain, ataupun tindakan yang dilakukan Direksi, untuk memastikan bahwa Direksi telah menjalankan tanggung jawabnya secara semestinya. Apabila Dewan Komisaris menetapkan bahwa anggota Direksi, baik secara sendiri-sendiri maupun kolektif, telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan visi, misi dan Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris berhak memberhentikan sementara anggota Direksi dari tugas dan tanggung jawabnya. Penggantian anggota Direksi dan Komisaris hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS.

Komposisi Dewan Komisaris

Jumlah keanggotaan Dewan Komisaris haruslah memadai untuk memberikan manfaat dari keberagaman sudut pandang, keahlian dan latar belakang yang dimiliki.

Per akhir tahun 2012, keanggotaan Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 2 (dua) orang, sebagai berikut:

Jabatan	Nama Name	Position
Komisaris Utama	Freddy R. Saragih	President Commissioner
Komisaris	Ayu Sukorini	Commissioner

Profil singkat masing-masing anggota Dewan Komisaris disajikan di bab Data Perusahaan, halaman 144-145 dalam Laporan Tahunan ini.

Rapat Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2012, rapat Dewan Komisaris diselenggarakan sebanyak 11 (sebelas) kali, dengan tingkat kehadiran masing-masing Komisaris sebesar 100%.

Rapat-rapat tersebut juga dihadiri oleh anggota Direksi dan pejabat senior atau staf Perseroan lainnya sesuai dengan agenda yang dibahas dalam masing-masing rapat.

Remunerasi Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris menerima remunerasi berupa honorarium dan tunjangan/fasilitas lainnya serta tantiem atas pencapaian kinerja Perseroan.

Company's financial condition, transactions with related parties, or actions taken by the Board of Directors, in order to ensure that the Board of Directors have fulfilled its responsibilities. Should the Board of Commissioners determines that members of the Board of Directors, individually or collectively, have taken actions contrary to the Company's vision, mission and Articles of Association, the Board of Commissioners have the right to temporarily relieve the respective Director(s) from duties. Replacement of Commissioners and Directors can only be done with approval of the GMS.

Composition of the Board of Commissioners

The numbers of membership in the Board of Commissioners should be sufficient to benefit from the diversity of their point of views, skills and backgrounds.

As at year-end 2012, the composition of the Company's Board of Commissioners consists of 2 (two) members as follows:

Brief profiles of members of the Board of Commissioners are presented in the Corporate Data section, page 144-145 of this Annual Report.

Meetings of the Board of Commissioners

Throughout 2012, the Board of Commissioners held 11 (eleven) meetings, with 100% attendance of the respective Commissioners in each meeting.

These meetings were also attended by members of the Board of Directors and other senior staff or employee of the Company as needed according to the agenda of the respective meetings.

Remuneration of the Board of Commissioners

Members of the Board of Commissioners receive remuneration in the form of honorarium and other benefits/facilities as well as tantiem on the Company's performance.

Besarnya remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris tahun 2012 ditetapkan melalui Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan No. S-13/PT PII/DK/0512 tentang Penetapan Gaji/honorarium, Tunjangan dan Fasilitas yang Diberikan Kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris bertugas membantu kelancaran pelaksanaan aktivitas kerja anggota-anggota Dewan Komisaris sehari-hari, termasuk antara lain mengatur jadwal pertemuan, menangani korespondensi dengan pihak eksternal maupun internal perusahaan, serta kegiatan kesekretariatan lainnya.

Sampai dengan akhir tahun 2012, Sekretaris Dewan Komisaris dijabat oleh Nuning Sri Rejeki Wulandari, yang diangkat berdasarkan No: SK-001/KOM/HR/06/2011 tertanggal 1 Juni 2011.

Komite-Komite di Bawah Komisaris

Sesuai dengan kewenangannya, Dewan Komisaris telah membentuk struktur Komite Audit melalui Keputusan Dewan Komisaris Tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Nomor KEP-02/KOM/PT PII/10/2012. Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap regulasi, implementasi manajemen risiko dan pengendalian internal, serta terhadap perencanaan dan pelaksanaan audit termasuk oleh auditor eksternal.

Susunan keanggotaan Komite Audit Perseroan pada tahun 2012 terdiri dari seorang Ketua dan 1 (satu) orang anggota komite, sebagai berikut:

Jabatan	Nama Name	Position
Ketua	Ayu Sukorini	Chairman
Anggota	Iqbal Islami	Member

Anggota Komite Audit telah memenuhi persyaratan yang ada terkait independensi maupun kompetensi profesional yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Profil singkat anggota Komite Audit disajikan di bab Data Perusahaan, halaman 148 dalam Laporan Tahunan ini.

The amount of remuneration for members of the Board of Commissioners in 2012 was determined by Circular Decision of Shareholders No. S-13/PT PII/DK/0512 on the Determination of Salary/Honorarium, Benefits and Facilities for the Board of Directors and Board of Commissioners.

Secretary to the Board

The Secretary to the Board has the duty of assisting the smooth implementation of the daily work activities of members of the Board of Commissioners, including among others its appointment and meeting schedules, external as well as internal correspondences, and performing other secretarial activities.

Up to year-end 2012, the position of Secretary to the Board is served by Nuning Sri Rejeki Wulandari, who was appointed based on No: SK-001/KOM/HR/06/2011 dated 1 June 2011.

Committees under the Board of Commissioners

In accordance with its authority, the Board of Commissioners has established the Audit Committee through Board of commissioners Decree on the Appointment of Members of the Audit Committee of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) No. KEP-02/KOM/PT PII/10/2012. The Audit Committee serves to assist the Board of Commissioners in supervising and evaluating aspects of financial reporting, regulatory compliance, risk management and internal control implementation, and audit planning and implementation, including those of the external auditors.

Membership composition of the Company's Audit Committee in 2012 consists of a Chairperson and 1 (one) committee member, as follows:

Members of the Audit Committee have conformed with relevant requirements regarding their independence or professional competences needed to carry out their duties. Brief profiles of members of the Audit Committee are presented in the Corporate Data section, page 148 of this Annual Report.

Direksi

Tugas, Tanggung Jawab & Wewenang

Direksi adalah organ pengambil-keputusan utama dalam Perseroan. Anggota Direksi bekerja sama dengan jajaran manajemen utama dalam operasional sehari-hari untuk memastikan tercapainya tujuan-tujuan Perseroan. Anggota Direksi, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif, bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan dan wajib bertindak untuk kepentingan Perseroan.

Direksi memiliki kewenangan untuk antara lain bertindak dan menjalankan suatu transaksi atas nama Perseroan, dan mewakili Perseroan di dalam pengadilan. Dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya tersebut, Direksi berada di bawah pengawasan Dewan Komisaris.

Komposisi Direksi

Sampai dengan akhir tahun 2012, keanggotaan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama Name	Position
Direktur Utama	Sinthya Roesly	President Director
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Armand Hermawan	Director of Finance and Risk Management
Direktur Operasi	Yadi J. Ruchandi	Director of Operations

Profil singkat masing-masing anggota Direksi disajikan di bab Data Perusahaan, halaman 146-147 dalam Laporan Tahunan ini.

Pembagian Tugas Direksi

Pembagian tugas Direksi dimaksudkan untuk memungkinkan Direksi secara kolektif berfungsi efektif dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Direktur Utama:

Bertanggung jawab untuk memimpin Direksi, mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi-fungsi Direksi, dan memberikan arahan kepada anggota Direksi lain mengenai masalah-masalah yang dibahas dalam rapat-rapat Direksi.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko:

Bertanggung jawab atas pengelolaan dana, pricing dan pemrosesan klaim, treasury dan akuntansi, pengelolaan sumber daya manusia, serta aspek administrasi dan umum sebagai fungsi pendukung bagi aktivitas operasional sehari-hari Perseroan.

Board of Directors

Duties, Responsibilities and Authority

The Board of Directors is the primary decision-making body of the Company. Members of the Board of Directors work with key management personnel in day-to-day operational activities to achieve the Company's objectives. Members of the Board of Directors, individually or collectively, are responsible for the management of the Company and are required to act in the best interest of the Company.

The Board of Directors is authorized, among others, to act and carry out transactions on behalf of the Company, and to represent the Company in a court of law. In discharging its duties, responsibilities and authority, the Board of Directors is supervised by the Board of Commissioners.

Composition of the Board of Directors

Up to year-end 2012, memberships of the Board of Directors of the Company consist of:

Brief profiles of members of the Board of Directors are presented in the Corporate Data section, page 146-147 of this Annual Report.

Division of Duties among Directors

Division of duties among the Directors enables the effective functioning of the Board of Directors as a collective body in the implementation of its assigned duties and responsibilities.

President Director:

Responsible for leadership of the Board of Directors, to coordinate the implementation of different functions of the Directors, and to provide direction to other Directors regarding issues that are discussed in Board of Directors' meetings.

Director of Finance and Risk Management:

Responsible for fund management, pricing and claim processing, treasury and accountancy, human resources management, as well as general and administrative aspect as a support function in the Company's day-to-day operational activities.

Direktur Operasi:

Bertanggung jawab atas aktivitas bisnis Perseroan, termasuk aktivitas pengembangan usaha, konsultasi dan bimbingan kepada PJPk dan market serta melakukan appraisal proyek.

Rapat Direksi

Pada tahun 2012, Direksi mengadakan rapat sebanyak 17 (tujuhbelas) kali, dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Direksi sebesar 100%.

Remunerasi Direksi

Direksi menerima remunerasi berupa gaji bulanan, tunjangan/fasilitas berupa tunjangan perumahan, tunjangan cuti dan tunjangan hari raya, serta tantiem atas pencapaian kinerja Perseroan.

Besarnya remunerasi bagi anggota Direksi tahun 2012 ditetapkan melalui Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan No. S-13/PT PII/DK/0512 tentang Penetapan Gaji/honorarium, Tunjangan dan Fasilitas yang Diberikan Kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Pelatihan bagi Direksi

Sepanjang tahun 2012, Direksi telah mengikuti berbagai pelatihan, seminar dan konferensi nasional maupun internasional dengan topik berkaitan dengan bisnis penjaminan. Daftar pelatihan, seminar dan konferensi yang telah diikuti antara lain:

Director of Operations:

Responsible for the Company's business activities, including business development, providing consultation and guidance to CAs and the market, and for project appraisal.

Meetings of the Board of Directors

Throughout 2012, the Board of Directors held 17 (seventeen) meetings, with 100% attendance of the respective Directors in each meeting.

Remuneration of the Board of Directors

Members of the Board of Directors receive monthly salaries, benefits/facilities comprising housing allowance, leave allowance and Annual Holiday Allowance as well as incentive for Company performance.

The amount of remuneration for members of the Board of Directors in 2012 was determined by Circular Decision of Shareholders No. S-13/PT PII/DK/0512 on the Determination of Salary/Honorarium, Benefits and Facilities for the Board of Directors and Board of Commissioners.

Training for Directors

Throughout the year 2012, the Board of Directors have attended various guarantee business related topics trainings, seminars and conferences nationally and internationally. List of trainings, seminars and conferences that have attended, among others:

Pelatihan Direksi Training for Directors		
	Tanggal Date	Acara Events
1	29 - 30 April 2012	Asia Finance and Risk Mitigation Forum 2012 - Makati City, the Philippines
2	4 - 6 June 2012	18th Coaltrans Asia Conference - Bali
3	18 June 2012	2nd Annual PPP in Emerging Market Summit - Kuala Lumpur
4	10 October 2012	9th ASEAN Finance Ministers Investor Seminar (AFMIS) - Hong Kong
5	12 - 19 October 2012	Aspen Institute Executive Seminar - Colorado, US
6	29 - 31 October 2012	Project Management for Water Industry - Singapore
7	5 November 2012	Unleashing Women Leadership - McKinsey
8	15 - 16 November 2012	5th Annual Asia & Middle East Government Funds Roundtable - Singapore
9	28 November - 1 December 2012	Global Infrastructure Initiative - Turkey
10	1 - 9 December 2012	Leadership Training, Harvard Business School - US

Internal Audit

Unit Internal Audit bertanggung jawab untuk membantu Direksi mewujudkan sistem pengendalian internal yang dapat menjamin pelaksanaan tugas Perseroan sesuai mandat yang diterima dan peraturan yang berlaku, dengan mengacu pada prinsip efisiensi dan efektivitas serta prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan kewajaran. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, Internal Audit bersifat independen terhadap unit-unit kerja dan fungsional lainnya di Perseroan. Unit Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, dan telah dilengkapi dengan Piagam Audit Internal dan Prosedur Audit Internal sebagai dasar dari pelaksanaan tugas-tugasnya.

Unit Internal Audit melaksanakan pekerjaan audit yang ditetapkan setiap awal tahun dalam Rencana Pekerjaan Audit Tahunan yang disusun bersama Direktur Utama. Di tahun 2012 Internal Audit telah melaksanakan penugasan audit sebagai berikut:

1. Business Development
2. Cash Management
3. Procurement
4. Treasury
5. Human Resources

Selama tahun 2012, Internal Audit telah melaksanakan audit atas fungsi-fungsi operasional dan pendukung dengan memperhatikan bagaimana Perusahaan merancang dan melaksanakan Internal Control System atas penanganan terhadap risiko-risiko finansial, operasional dan strategik.

Pemimpin unit Internal Audit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama. Sampai dengan akhir tahun 2012, unit Internal Audit dipimpin oleh I Gede Susila Aryana, CISA, yang diangkat berdasarkan SK Karyawan tetap: SK-012/DIR/HR/KT/08/2011 tertanggal 5 November 2011.

Internal Audit

The Internal Audit unit assists the Board of Directors in establishing internal control systems within the Company to ensure the fulfilment of corporate missions according to the mandate and prevailing regulations, with due regards to efficiency and effectiveness as well as the principles of GCG, namely transparency, accountability, responsibility, independence and fairness. In discharging its duties and functions, Internal Audit is independent of other work and functional units within the Company, and reports directly to the President Director. The Internal Audit unit has been equipped with an Internal Audit Charter as the basis for the implementation of its duties and function.

The Internal Audit unit implements the audit work as set out at the beginning of each year in the Annual Audit Work Plan developed together with the President Director. In 2012, Internal Audit engaged in audit work on a number of functions or activities within the Company, comprising:

1. Business Development
2. Cash management,
3. Procurement
4. Treasury
5. Human Resources.

During 2012, Internal Audit has performed audit work on operational and support function, with emphasis on the design and implementation of Internal Control Systems related to the handling of financial, operational and strategic risks.

The Head of Internal Audit is appointed and dismissed by the President Director. Up to year-end 2011, Internal Audit is led by I Gede Susila Aryana, CISA, who was appointed based on Decision Letter SK-012/DIR/HR/KT/08/2011, dated 5 November 2011.

Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan membantu Direksi memantau penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Perseroan, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan program komunikasi perusahaan kepada pemangku kepentingan eksternal maupun internal, program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dan kegiatan kesekretariatan perusahaan.

Sampai dengan akhir tahun 2012, Sekretaris Perusahaan Perseroan dijabat oleh Adita Irawati, yang diangkat berdasarkan SK Karyawan Tetap: SK-015/DIR/HR/KT/11/2011 tertanggal 1 September 2011.

Corporate Secretary

The Corporate Secretary is responsible for assisting the Board of Directors in monitoring the implementation of Good Corporate Governance at the Company, in addition to the implementation of corporate communications programs to internal and external stakeholders, Corporate Social Responsibility programs, and corporate secretariat activities.

Up to year-end 2012, the position of Corporate Secretary is served by Adita Irawati, who was appointed based on Decision Letter: SK-015/DIR/HR/KT/11/2011, dated 1 September 2011.

Perkara Hukum

Selama tahun 2011, tidak terdapat perkara hukum yang melibatkan Perseroan ataupun anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Akses terhadap Informasi atas Perusahaan

Dalam rangka keterbukaan informasi, Perseroan menyediakan akses publik kepada informasi mengenai Perseroan di situs web Perseroan, www.iigf.co.id. Melalui situs web Perseroan, pemangku kepentingan dan masyarakat umum juga dapat mengakses berbagai publikasi mengenai Perseroan, termasuk Profil Perusahaan, Laporan Tahunan, dan dokumen-dokumen resmi lainnya.

Dari waktu ke waktu, Perseroan juga mengeluarkan siaran pers terkait dengan perkembangan penting yang terjadi di Perseroan.

Legal Proceedings

Throughout 2011, there was no legal proceeding involving either the Company or members of the Board of Commissioners and Board of Directors.

Access to Information on the Company

In the interest of information disclosure, the Company provides a public access to information on the Company in its corporate web site, www.iigf.co.id. In this web site, stakeholders and the interested public can also access a variety of Company publications including Company Profile and Annual Reports, as well as other official company documents.

From time to time, the Company also issues press releases concerning current significant developments within the Company.

Ringkasan Siaran Pers Press Releases Highlights		
Acara	Tanggal Date	Events
PT PII dan PT PLN menandatangani Nota Kesepahaman tentang kerjasama persiapan Proyek PLTU Mulut Tambang.	28 February 2012	IIGF and PT PLN signed a MoU on cooperation for the preparation of Mine-mouth Coal-fired Power Plant project.
Penyelenggaraan Workshop Untuk Penyempurnaan Acuan Kategori dan Distribusi Risiko Infrastruktur dalam menunjang Implementasi Proyek Infrastruktur Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS).	14 March 2012	Workshop for Improvement to Reference for Category and Distribution of Infrastructure Risks in Support of Public Private Partnership (PPP) Infrastructure Project Implementation.
ICIEC dan PT PII menandatangani Nota Kesepahaman untuk mendukung investor di Indonesia.	30 April 2012	ICIEC and IIGF sign an MOU to enhance support to investors in Indonesia.
Penandatanganan Deklarasi Komitmen terhadap Transportasi Batu Bara yang Berkelanjutan di Kalimantan Tengah.	12 July 2012	Signing of Declaration of Commitment for Sustainable Coal Transportation in Central Kalimantan.
Nota Kesepahaman antara PT PII dengan The Overseas Private Investment Corporation mengenai Kerjasama untuk Mendukung Proyek Infrastruktur.	13 November 2012	Memorandum of Understanding between IIGF and The Overseas Private Investment Corporation on Cooperation in Support of Infrastructure Projects.
Indonesia Infrastructure Roundtable dan Soft Launching IIGF Institute.	27 November 2012	Indonesia Infrastructure Roundtable and the soft launch of IIGF Institute.

Pedoman Kode Etik Perusahaan

Suatu langkah maju yang penting bagi terselenggaranya praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik di lingkungan Perseroan adalah diterbitkannya dokumen Pedoman Kode Etik perusahaan pada tahun 2011. Dokumen Pedoman Kode Etik berisi sekumpulan standar etika perilaku dalam menjalankan bisnis di Perseroan, yang diharapkan dapat mempengaruhi dan membentuk interaksi internal (organ/unit dan karyawan Perseroan) maupun eksternal (mitra usaha, afiliasi dan stakeholder lainnya) yang konsisten berdasarkan prinsip-prinsip berkesadaran etis, berpikir etis dan berperilaku etis.

Kebijakan Perilaku Perusahaan

Merupakan pedoman berperilaku bagi Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan dalam berinteraksi, bersikap dan bertindak sesuai etika dan ketentuan yang ada, antara lain dalam hal:

- penyalahgunaan jabatan
- etika dalam berhubungan dengan pemangku kepentingan
- kepedulian terhadap lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja
- kesempatan kerja yang adil
- standar etika hubungan antara Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan
- integritas Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan
- hak atas kekayaan intelektual
- kebijakan pengungkapan informasi

Company Code of Conduct

The publication of the Company's Code of Conduct document in 2011 represented a major progress towards the implementation of Good Corporate Governance practices within the Company. The Code of Conduct document compiles a set of standard ethical behavior in doing business at the Company. These standards are expected to guide and shape all internal (organ/units and employees of the Company) as well as external (business partners, affiliations and other stakeholders) interactions in a consistent manner, based on the principles of ethical sensibility, ethical reasoning and ethical conduct.

Policies on Ethical Conduct

Provides a guideline for the interactions, attitude and actions of the Board of Commissioners, Board of Directors and employees of the Company, in line with ethical standards and prevailing rules, concerning:

- abuse of power
- ethics in interacting with stakeholders
- concern for environment and work health and safety
- equal opportunity employment
- ethics in the interactions among Commissioners, Directors and employees
- integrity of Commissioners, Directors and employees
- intellectual rights
- policies on information disclosure
- giving and receipt of gifts and donations

- pemberian dan penerimaan hadiah dan donasi
- informasi orang dalam
- keterlibatan dalam aktivitas politik
- perlindungan dan penggunaan aset secara efisien
- citra Perseroan
- larangan kepemilikan dan penggunaan alkohol dan/atau narkoba, psikotropika dan zat aditif

Pelaporan Pelanggaran Kode Etik

Pihak yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran Kode Etik dapat menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan/atau SVP Legal/Compliance seperti diatur dalam Operations Manual PT PII. Pihak pelapor harus mengungkapkan identitas yang jelas dan akan dilindungi kerahasiaannya.

Konsekuensi Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran terhadap Kode Etik akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Perseroan.

Komitmen Kepatuhan

Direksi dan seluruh karyawan Perseroan telah menandatangani Komitmen Kepatuhan dalam menerapkan Pedoman Kode Etik Perusahaan.

Pernyataan Benturan Kepentingan

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah menandatangani dokumen Pernyataan Benturan Kepentingan yang diperbaharui setiap tahun.

Auditor Independen

Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2012 telah diaudit oleh auditor independen Drs. Haryanto Sahari, CPA, dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana & Rekan. Auditor independen dan KAP tersebut juga telah melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2011.

- insider information
- involvement in political activities
- maintenance and efficient utilization of assets
- corporate reputation
- prohibition from possession and use of alcoholic beverages and/or narcotic, psychotropic and addictive substances.

Reporting Violation of Code of Conduct

A person with knowledge of, or a reasonable suspicion of, a violation of the Code of Conduct may report such knowledge or suspicion to the President Director and/or the SVP of Legal/Compliance as described in IIGF Operations Manual. The reporting party shall disclose his/her identity, which will remain confidential.

Penalty for Violation of Code of Conduct

Violation to the Code of Conduct will incur a penalty in accordance with prevailing Company regulations.

Statement of Compliance

Members of the Board of Directors and all employees of the Company have signed a Statement of Compliance expressing the commitment to abide by the Code of Conduct.

Statement of Conflict of Interest

Members of the Board of Commissioners and Board of Directors have signed a Statement of Conflict of Interest, which will be updated annually.

Independent Auditor

The Company's Financial Statements for the fiscal year ending 31 December 2012 have been audited by independent auditor Drs. Haryanto Sahari, CPA, from the Public Accountant Firm (KAP) Tanudiredja, Wibisana & Partners. The same independent auditor and KAP have also performed the audit on the Company's Financial Statements for fiscal year ending 31 December 2011.

Diagnostic Assessment Pelaksanaan GCG

Perseroan bekerja sama dengan Badan Pengawas Pembangunan dan Keuangan (BPKP) melakukan diagnostic assessment terhadap penerapan GCG di Perseroan untuk periode tahun 2011, yang telah diselesaikan pada pertengahan tahun 2012. Diagnostic assessment dilakukan atas lima aspek tata kelola yaitu hak dan tanggung jawab pemegang saham/RUPS, kebijakan GCG, penerapan GCG, pengungkapan informasi, dan komitmen. Hasil assessment menunjukkan kondisi penerapan GCG di Perseroan dinilai 'cukup' (dari lima kemungkinan tingkatan yaitu sangat baik, baik, cukup, kurang dan sangat kurang).

Dari kelima aspek pengujian terhadap penerapan GCG di Perseroan, pencapaian penilaian terbaik adalah pada aspek pengungkapan informasi, yaitu dengan penilaian 'sangat baik'. Aspek ini antara lain ditunjang oleh ketersediaan informasi perusahaan kepada pemangku kepentingan berikut media untuk penyampaian, serta Laporan Tahunan yang telah dipublikasikan dengan muatan yang cukup.

Hasil diagnostic assessment tersebut juga mencakup rekomendasi BPKP kepada organ-organ utama dan organ pendukung Perseroan untuk menindaklanjuti aspek-aspek yang masih memerlukan perbaikan. Sesuai dengan sumber daya Perseroan saat ini, langkah-langkah perbaikan dibagi menjadi beberapa tingkatan prioritas, dengan jangka waktu maksimum tindak lanjut antara 9 bulan (prioritas utama), 12 bulan (prioritas sedang) dan 15 bulan (prioritas rendah). Perseroan kemudian telah mengundang BPKP untuk melakukan pendampingan dan konsultasi pelaksanaan GCG di Perseroan sampai dengan akhir tahun 2012.

Diagnostic Assessment on GCG Implementation

In 2011, the Company cooperated with the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) in conducting a diagnostic assessment on the implementation of GCG at the Company. This has been completed by mid-2012. The diagnostic assessment covers five aspects of governance, namely the rights and responsibility of shareholders/GMS, GCG policies, GCG implementation, information disclosure, and commitment. By the result of the assessment, GCG implementation at the Company was evaluated as 'fair' (from the five possible ranking of 'excellent', 'good', 'fair', 'less adequate', and 'poor').

From the five aspects of GCG implementation at the Company that were assessed, the highest score was on the aspect of information disclosure with a ranking of 'excellent'. Positive marks in information disclosure include the availability of company information to interested stakeholders along with the media of communication, and the Annual Report that has been published with adequate contents.

The results of the diagnostic assessment also include recommendations by BPKP to the Company's primary and support organs to follow-up on a number of areas that need improvement. Based on considerations of current company resources, improvement measures are categorized into different priority categories, with maximum follow-up period of 9 months (high priority), 12 months (medium priority) and 15 months (low priority). The Company has subsequently invited BPKP to assist the implementation of GCG at the Company through mentoring and consultation services until the end of 2012.

Pengelolaan Risiko

Risk Management

PT PII menempatkan fungsi pengelolaan risiko melalui kerangka Enterprise Risk Management (ERM) sebagai salah satu fokus utama operasionalisasi organisasinya. Lebih jauh, fungsi kepatuhan terhadap prosedur merupakan aspek penting lainnya yang menjadi bagian dari pengelolaan risiko secara komprehensif oleh PT PII.

IIGF places the function of risk management through an Enterprise Risk Management (ERM) framework as the main focus of its organizational operations. Moreover, process compliance function is another important aspect of comprehensive risk management at IIGF.

IDENTIFIKASI RISIKO

Dalam menjalankan peran yang diembannya, PT PII menghadapi risiko yang dapat berpengaruh negatif terhadap kelancaran usaha, pendapatan usaha maupun kondisi keuangannya. PT PII merupakan suatu entitas risiko (risk entity), yang bertanggung jawab untuk menanggung risiko dimana pihak lain (PJPK) tidak melaksanakan kewajiban kontraktualnya dalam suatu pelaksanaan proyek infrastruktur.

Berikut adalah uraian mengenai risiko-risiko utama yang dihadapi PT PII dan upaya mitigasi yang dapat dilakukan.

Risiko Legalitas dan Regulasi

Sebagai suatu entitas milik negara, PT PII memiliki eksposur terhadap perubahan status legalitas dan regulasi yang menjadi dasar kegiatan operasional perusahaan. Perubahan tersebut bisa berbentuk pengurangan, perluasan, tidak berlakunya kewajiban, wewenang dan tanggung jawab PT PII dari apa yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sebagai suatu risiko yang pemicu dan faktor risikonya berada di luar kendali PT PII, upaya mitigasi yang dapat dilakukan adalah membangun pemahaman yang lebih baik terhadap peran yang dapat dilakukan PT PII dalam percepatan pembangunan infrastruktur kepada para pemangku kepentingan.

Saat ini, dasar pembentukan dan operasionalisasi PT PII diatur dalam Peraturan Pemerintah No 35/2010, Peraturan Presiden No 13/2010, Peraturan Presiden No 78/2010 dan Peraturan Menteri Keuangan No 260/2010. Mengacu kepada kerangka regulasi tersebut, PT PII merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) yang bertanggung jawab dalam penyediaan Penjaminan Infrastruktur kepada proyek yang dikerjasamakan antara Pemerintah dan Badan Usaha.

Risiko Keuangan Perusahaan

Risiko keuangan terutama timbul sebagai akibat ketidakmampuan PT PII mencapai sasaran pendapatan hasil usaha, kerugian dari penempatan dana investasi, serta ketidakmampuan PT PII memperoleh pendanaan baru dari pihak kreditor maupun pemegang saham. Mitigasi atas risiko tersebut diupayakan dengan (i) mengamankan serta memastikan sumber-sumber pendapatan PT PII, (ii) memilih investasi portfolio secara berhati-hati

RISK IDENTIFICATION

In the execution of its role, IIGF deals with various risks that can negatively affect the continuity of its business, the business income or its financial condition. In particular, IIGF is a risk entity responsible for managing risks, in case another party (in this case, the Contracting Agency) fails to perform its contractual obligations when implementing an infrastructure project.

The following are descriptions of the main risks faced by IIGF and the efforts made to mitigate those risks.

Legality and Regulation Risks

As a state-owned entity, IIGF has exposures to changes in legality status and regulations applied as the basis of operational activities of the Company. These changes can be in the form of the reduction, expansion, invalidation of the obligations, authorities and responsibilities of IIGF from what were previously set. As a risk that both the triggers and the risk factors are beyond the IIGF's control, the possible mitigation efforts may include building better understanding to the stakeholders on the role IIGF in accelerating the infrastructure development.

Currently, the basis for the establishment and operation of IIGF is regulated in Governmental Regulation No. 35/2010, Presidential Regulation No. 13/2010, Presidential Regulation No. 78/2010 and Regulation of the Minister of Finance No. 260/2010. Referring to these regulation frameworks, IIGF is a state-owned enterprise (SOE) appointed as a Business Entity for Infrastructure Guarantee (BUPI) responsible for providing Infrastructure Guarantee to projects made in partnership between the Government and Project Company.

Corporate Financial Risk

Financial risk mainly arise from the inability of IIGF to achieve its revenue target, losses incurred from the placement of investment funds, and the inability of IIGF to obtain new funding, whether from creditors or from shareholders. Mitigation of these risks is attempted by: (i) securing and ensuring IIGF's sources of revenue, (ii) careful selection of investment portfolio, with minimum risk factors, (iii) maintaining good relations with various financial

dengan faktor risiko yang minimal, (iii) menjalin hubungan baik dengan berbagai lembaga keuangan termasuk lembaga multilateral, baik sebagai pihak kreditur maupun sebagai mitra dalam meningkatkan kapasitas penjaminan.

Risiko Operasional Perusahaan

Risiko operasional terutama berkaitan dengan ketidakmampuan PT PII beroperasi secara efisien sehingga mengakibatkan kerugian operasional. Berbagai faktor risiko operasional antara lain adalah sumber daya manusia, struktur organisasi dan sistem operasional yang kurang andal; peralatan kerja yang tidak memadai; pengawasan intern yang lemah; tindakan yang melanggar hukum oleh personil PT PII. Upaya mitigasi dilakukan antara lain melalui perekrutan dan pelatihan personil secara profesional; penetapan organisasi, manual dan metode operasi sesuai best practice; penggunaan alat dan perlengkapan kantor yang memadai; serta pengembangan checks and balances yang memadai di setiap jenjang operasi.

Risiko Portofolio Penjaminan

Risiko portofolio penjaminan merupakan risiko yang terkait tugas PT PII sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI). Risiko ini meliputi terjadinya klaim atas penjaminan yang diberikan dan tidak efektifnya mekanisme regres yang menjadi dasar ganti rugi pembayaran klaim kepada PT PII, serta dipicu oleh cakupan dan tingkat risiko yang melekat pada setiap proyek yang dijamin oleh PT PII. Risiko proyek tersebut antara lain terkait dengan perubahan lanskap politik, pergantian pemerintahan, perubahan peraturan dan perundang-undangan, wanprestasi kewajiban kontraktual PJKP, dalam hal mana sebagian atau keseluruhan faktor-faktor risiko tersebut dapat berdampak negatif terhadap kelayakan ekonomis proyek infrastruktur yang bersangkutan.

Dalam pengelolaan risiko ini (termasuk upaya mitigasinya), PT PII melakukan, antara lain, analisis terhadap probabilitas dan eksposur dari setiap peristiwa risiko yang tercakup dalam perjanjian penjaminan, mengevaluasi rencana mitigasi risiko yang diusulkan PJKP, memastikan alokasi risiko proyek yang optimal serta memberlakukan imbal jasa yang memadai untuk setiap penjaminan yang diberikan. Risiko penjaminan ini pada dasarnya merupakan bagian dari risiko proyek KPS yang dikelompokkan dalam suatu kategori risiko ("Kategori Risiko KPS"), sebagaimana diuraikan pada halaman 76.

institutions including multilateral institutions, both as creditor as well as partner in enhancing the guarantee capacity.

Corporate Operational Risk

Operational risk is generally related to the inability of IIGF to operate efficiently, which causes operational losses. Various factors of operational risk include: human resources; an unreliable organizational structure and operational system; inadequate working equipment; weak internal monitoring or violations of the law perpetrated by IIGF personnel. Mitigation efforts that can be implemented include, among others: professional recruitment and training of personnel; best practices in determining organization, manuals and methods of operation; utilization of adequate office tools and equipment; and development of adequate checks and balances at every level of its operation.

Project Portfolio Risk

Project portfolio risk relates to the role of IIGF as the Business Entity for Infrastructure Guarantee (BUPI). The risk includes the occurrence of guarantee claims and the ineffectiveness of the recourse mechanism as the basis of repayment of claims to IIGF, which is triggered by the scope and level of inherent risk of each project guaranteed by IIGF. These project risks may be related to changes in the political landscape, changes in the government, changes in rules and regulations or default of the contractual obligations of CA of which the risk factors may have negative impact on the economic viability of the relevant infrastructure project, whether a whole or partially.

In managing these risks (including the mitigation efforts), IIGF performs, among other actions, analysis of the probability and exposure of each risk event covered in the Guarantee Agreement, evaluating the risk mitigation plan proposed by the CA, ensuring optimum risk allocation of the project, and applying appropriate fees to each guarantee provided. This guarantee provisioning risks are basically a subset of the PPP project risk, classified in a risk category ("PPP Risk Category"), as described in the page 76.

PENILAIAN RISIKO

Sebagai bagian dari pengelolaan risiko oleh PT PII, penilaian risiko dilakukan terhadap keseluruhan risiko PT PII yang telah teridentifikasi sebelumnya.

Pada dasarnya, penjaminan infrastruktur oleh PT PII menjamin kewajiban finansial PJPK dalam suatu perjanjian KPS, dimana kewajiban ini timbul akibat risiko yang disebabkan oleh peristiwa penyebab (triggering events) berikut:

- a) tindakan atau tiadanya tindakan PJPK atau Pemerintah selain PJPK dalam hal-hal yang menurut hukum atau peraturan perundangan - PJPK atau Pemerintah selain PJPK memiliki kewenangan atau otoritas untuk melakukan tindakan tersebut;
- b) kebijakan PJPK atau Pemerintah selain PJPK;
- c) keputusan sepihak dari PJPK atau Pemerintah selain PJPK;
- d) ketidakmampuan PJPK dalam melaksanakan suatu kewajiban yang ditentukan kepadanya oleh Badan Usaha berdasarkan Perjanjian Kerjasama (breach of contract).

Penilaian Risiko untuk Penjaminan Infrastruktur

Keputusan PT PII dalam penyediaan penjaminan risiko infrastruktur dalam suatu proyek KPS dibuat setelah mengevaluasi, antara lain, kesesuaian draft perjanjian KPS dengan prinsip alokasi risiko, seperti digambarkan dalam diagram pada halaman 75.

PEMANTAUAN RISIKO

Sesuai struktur organisasi PT PII, Risk and Compliance (RAC) adalah divisi yang salah satu tugasnya memonitor pelaksanaan ERM perusahaan. Sebagai pemilik kerangka pengelolaan risiko di PT PII, terhadap risiko penjaminan proyek, RAC akan memberikan sudut pandang yang independen terhadap risiko terkait penilaian proyek dan klaim penjaminan. Secara khusus, RAC akan melakukan tinjauan independen terhadap kepatuhan proses penilaian dan memberikan komentar independen dari perspektif risiko institusi (baik batas-batas tertentu dilampaui, atau jika ada masalah institusi yang tidak ditangani, dan sebagainya) yang berasal dari tahap evaluasi proyek (appraisal) sebelum dilanjutkan kepada Komite Underwriting.

RISK ASSESSMENT

As part of risk management by IIGF, risk assessment is performed against all of the previously identified IIGF risks.

Basically, Infrastructure Guarantee by IIGF guarantees the financial obligations of CA in a certain PPP agreement, wherein these the obligation occurs due to the risks caused by the following triggering events:

- a) Action or inaction of CA or government other than CA concerning issues that, according to laws or regulations, the CA or government other than CA have the power or authority to exercise those actions;
- b) Policies of CA or government other than CA;
- c) Unilateral decision from CA or government other than CA; and
- d) Inability of CA in executing an obligation set upon it by the Project Company based on the Cooperation Agreement (breach of contract).

Risk Assessment for Infrastructure Guarantee

The decision by IIGF to provide guarantee for risks in a PPP project is made after analyzing, among others the conformity of the draft PPP Agreement with the risk allocation principles, as depicted in the diagram on page 75.

RISK MONITORING

According to the organizational structure of IIGF, Risk and Compliance (RAC) is the division that performs, among others, monitoring the execution of the Company's Enterprise Risk Management (ERM). As owner of the IIGF risk management framework, on the project portfolio risk, the RAC will provide an independent review on risks related to the project and claim assessment. Specifically, RAC will carry out independent reviews on the compliance of the assessment process, and will provide independent comments from the perspective of institutional risk (whether if certain limits were exceeded, or if there are institutional problems that are not managed, etc.) arising from the project evaluation stage (appraisal), before proceeding to the Underwriting Committee.

Mekanisme pemantauan penjaminan proyek harus dijalankan untuk mengidentifikasi seluruh eksposur risiko, jika ada sebelum mereka berubah menjadi klaim. Dalam hal ini, PT PII melalui divisi Project Monitoring and Claim (PMC) akan memantau kinerja eksposur risiko terhadap proyek-proyek secara periodik. Mekanisme pemantauan akan membantu PT PII untuk mengambil tindakan perbaikan dan membatasi terjadinya klaim.

Terhadap risiko operasional, PT PII sebagai sebuah institusi perlu memantau eksposur peristiwa risiko, antara lain:

- risiko personil utama
- kecurangan internal (*internal fraud*):
- kecurangan eksternal (*external fraud*)
- praktik kerja
- kerusakan aset fisik
- gangguan usaha
- pengelolaan eksekusi, penyelesaian dan proses
- keselamatan kerja

Terhadap risiko keuangan perusahaan yang terkait dengan ketidakpastian pasar, PT PII melalui divisi Treasury and Investment (TRI) menerapkan kebijakan investasi yang bijaksana untuk pengelolaan dana dan untuk mencapai hasil optimal. Investasi dana yang belum dicadangkan untuk penjaminan proyek akan mengikuti norma-norma yang diatur dalam kebijakan internal perusahaan. Norma-norma tersebut dirumuskan untuk memberikan fleksibilitas yang cukup untuk mengoptimalkan pengembalian investasi tanpa mengambil risiko yang berlebihan.

FUNGSI KEPATUHAN PROSEDUR

Standar operasional prosedur yang berbasis risiko dibangun untuk mengelola risiko dalam operasional PT PII. Kajian atas kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur internal dilakukan untuk mengawasi dan mengelola isu kepatuhan dalam organisasi, serta memastikan bahwa perusahaan dan karyawannya mematuhi kebijakan dan prosedur internal yang ada. Kajian ini dilakukan secara independen untuk memastikan isu kepatuhan dalam organisasi dievaluasi, diinvestigasi dan dilaporkan secara tepat. Berbeda dengan fungsi internal audit yang ditempatkan setelah transaksi, kajian atas kepatuhan dirancang sebagai salah satu alat pengelolaan risiko sebelum transaksi. Unit kepatuhan memberikan peringatan awal kepada manajemen dalam pengawasan isu kepatuhan.

The monitoring mechanism of project guarantee must be executed to identify all of the risk exposures, if any, before they turned into claims. In this case, IIGF through the Project Monitoring and Claim (PMC) division will periodically monitor the performance of risk exposure to projects. The monitoring mechanism will help PT PII to take corrective actions and to limit the occurrence of claims.

Regarding operational risks, IIGF as an institution must monitor risk exposures, such as:

- Key personnel risk
- Internal fraud
- External fraud
- Labor practice
- Damage to physical assets
- Business disruptions
- Management of execution, delivery and process
- Work safety

On the corporate financial risks related to market uncertainty, IIGF through its Treasury and Investment division (TRI) applies a prudent investment policy for the management of funds as well as to achieve optimal returns. The investment of funds not allocated to project guarantee (idle funds) will follow the norms laid down in this policy. These norms have been formulated to provide sufficient flexibility with which to optimize returns from the invested funds without taking excessive risks.

PROCESS COMPLIANCE FUNCTION

Risk-based standard operational procedures are developed to manage risk in IIGF operations. Reviews on compliance to internal policies and procedures are performed to monitor and manage compliance issues within the organization, and to ensure that the organization and its employees are complying with internal policies and procedures. Reviews are performed independently to ensure compliance issues within the organization are being appropriately evaluated, investigated and reported. In contrast to the internal audit function that is placed after the transaction, the review on compliance is designed as a tool of risk management prior to the transaction. The Compliance unit provides early warning to management in monitoring compliance issues.

1. Konsultasi & Bimbingan
Consulting & Guidance

2. Penyaringan
Screening

3. Evaluasi
Appraisal

4. Penyusunan Struktur
Structuring

Aktivitas Appraisal Lainnya Other Activities in Appraisal

Penilaian Risiko | Risk Assessment

Usulan Penjaminan (UP)
Guarantee Proposal (GP)

- 1 Draft Perjanjian KPS
Draft PPP Agreement
- Dokumentasi Lainnya
Other Documentation

Sesuai Prinsip
Alokasi Risiko?
Principles of
Risk Allocation?

Ya
Yes

Risiko dipertimbangkan
untuk di jamin oleh PT PII
Risk coverage considered
to be guaranteed by IIGF

Tidak
No

Tidak dapat dijamin
Not eligible for guarantee

2

Acuan Risiko PT PII Kategori
Risiko KPS & Matriks Risiko KPS
IIGF Risk Reference, PPP Risk Category &
PPP Risk Matrix

Kerangka Regulasi KPS dan Penjaminan Infrastruktur Regulatory Framework for PPP and Infrastructure Guarantee

Perpres 67/2005 jo
13/2012 (Infrastruktur
KPS)
Presidential
Regulation 67/2005
j.o 13/2012 (PPP
Infrastructure)

Perpres 78/2010
(Penjaminan
Infrastruktur)
Presidential
Regulation
78/2010
(Infrastructure
Guarantee)

PMK 260/2012
(Juklak Perpres
28/2012)
Finance Minister
Regulation
260/2012
(Implementing
Regulation on
Presidential
Regulation 28/2012)

Prinsip Alokasi Risiko
Principles of Risk Allocation

Kategori Risiko KPS

Kategori Risiko KPS dikembangkan sebagai suatu daftar kelompok risiko yang generik, yang dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi peristiwa-peristiwa risiko spesifik kepada setiap proyek KPS.

Peristiwa-peristiwa risiko yang teridentifikasi tersebut dapat digunakan lebih jauh untuk tahapan penilaian risiko dan pengembangan matriks/strategi alokasi risiko.

Kategori risiko ini tidak bermaksud untuk menjadi suatu daftar risiko yang menyeluruh dan berlaku pada setiap proyek KPS. Perbedaan situasi dan kondisi spesifik dalam suatu proyek KPS perlu juga dipertimbangkan.

1. Risiko Lokasi adalah kelompok risiko dimana lahan proyek tidak tersedia atau tidak dapat digunakan sesuai jadwal yang sudah ditentukan dan dalam biaya yang diperkirakan, atau bahwa lokasi dapat menimbulkan suatu beban atau kewajiban bagi pihak tertentu. Dengan demikian, risiko-risiko yang termasuk kategori ini adalah:
 - a). Risiko pembebasan lahan;
 - b). Risiko ketidaksesuaian lokasi lahan;
 - c). Risiko lingkungan.
2. Risiko Desain, Konstruksi dan Uji Operasi adalah risiko desain, konstruksi atau uji operasi suatu fasilitas proyek atau elemen dari prosesnya, dilakukan dengan cara yang menyebabkan dampak negatif terhadap biaya dan pelayanan proyek. Dengan demikian, risiko yang termasuk dalam kategori ini adalah:
 - a). Risiko perencanaan ;
 - b). Risiko desain;
 - c). Risiko penyelesaian;
 - d). Risiko kenaikan biaya;
 - e). Risiko uji operasi.
3. Risiko Sponsor adalah risiko dimana Badan Usaha dan/atau sub-kontraktornya tidak dapat memenuhi kewajiban kontraktualnya kepada PJPK.
4. Risiko Finansial adalah risiko-risiko terkait aspek kelayakan finansial proyek. Risiko-risiko tersebut dapat berupa:
 - a). Risiko ketidakpastian pembiayaan;
 - b). Risiko parameter finansial;
 - c). Risiko struktur finansial;
 - d). Risiko asuransi.

PPP Risk Category

The PPP Risk Category is developed as a generic list of risk groupings, which is expected to be helpful in identifying possible risk events in each specific PPP project.

The identified risk events can be used further in the risk assessment stage and for the development of a risk allocation matrix/strategy.

The checklist of risk categories is not meant to be exhaustive and applicable for each and every PPP project. The particular circumstances in each specific PPP project should also be considered.

1. Site Risk is the risk that the project land will be unavailable or unable to be used at the required time, in the manner or at the cost anticipated, or that the site will generate unanticipated liabilities for certain parties. Thus, risks included into this category are:
 - a). Land acquisition risk;
 - b). Landsite unsuitability risk;
 - c). Environmental risk.
2. Design, Construction and Commissioning Risk is the risk that the design, construction or commissioning of the facility or certain elements of each of these processes, are carried out in a way which results in adverse cost and/or project delivery consequences. Thus, risks included into this category are:
 - a). Planning risk;
 - b). Design risk;
 - c). Completion risk;
 - d). Cost overrun risk;
 - e). Commissioning risk;
3. Sponsor Risk is the risk where the Project Company and/or its sub-contractors are unable to fulfil their contractual obligations to the CA.
4. Financial Risk is the risks related to financial viability aspects of the project. This may refers to any of the following:
 - a). Financial uncertainty risk;
 - b). Financial parameter risk; and
 - c). Financial structure risk.
 - d). Insurance risk.

- | | |
|---|---|
| <p>5. Risiko Operasional adalah risiko dimana proses penyediaan layanan infrastruktur sesuai kontrak - atau suatu elemen dari proses tersebut (termasuk input yang digunakan atau sebagai bagian dari proses itu) - akan terpengaruh dengan cara yang menghalangi Badan Usaha dalam menyediakan layanan kontrak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dan/atau sesuai proyeksi biaya. Dengan demikian, risiko termasuk dalam kategori ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a). Risiko ketersediaan layanan; b). Risiko pemeliharaan; c). Risiko cacat tersembunyi (latent defect); d). Risiko teknologi; e). Risiko utilitas; f). Risiko sumber daya atau input; g). Risiko hubungan industri. | <p>5. Operating Risk is the risk that the process for delivering the contracted services – or an element of that process (including the inputs used within or as part of that process) – will be affected in a way which prevents the Project Company from delivering the contracted services according to the agreed specifications and/or within the projected costs. Thus, risks included into this category are:</p> <ul style="list-style-type: none"> a). Service availability risk; b). Maintenance risk; c). Latent defect risk; d). Technology risk; e). Utilities risk; f). Resource or input risk; g). Industrial relations risk. |
| <p>6. Risiko Pendapatan adalah risiko bahwa pendapatan proyek tidak dapat memenuhi proyeksi tingkat kelayakan finansial, karena perubahan yang tak terduga baik permintaan proyek atau tarif yang disepakati atau kombinasi keduanya. Karenanya, risiko termasuk dalam kategori ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a). Risiko permintaan; dan b). Risiko tarif. | <p>6. Revenue Risk is the risk that the project revenue is unable to meet the projected level of financial viability, due to the unexpected changes to either the project demand or the agreed tariff or combination of both. Thus, risks included into this category are:</p> <ul style="list-style-type: none"> a). Demand risk; or b). Tariff risk |
| <p>7. Risiko Konektivitas Jaringan adalah risiko terjadinya dampak negatif akibat perubahan dari kondisi jaringan saat ini atau rencana masa depan. Risiko yang termasuk dalam kategori ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a). Risiko konektivitas dengan jaringan eksisting; b). Risiko pengembangan jaringan; c). Risiko fasilitas pesaing. | <p>7. Network Connectivity Risk is the risk of negative impact due to changes in existing network(s) or those planned for the future. Thus, risks included into this category are:</p> <ul style="list-style-type: none"> a). Connectivity with the existing network risk; b). Network development risk; c). Competing facility risk. |
| <p>8. Risiko Interface adalah risiko dimana metode atau standar penyediaan layanan akan menghalangi atau mengganggu penyediaan layanan yang dilakukan sektor publik atau sebaliknya. Risiko ini termasuk ketika kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah tidak sesuai/tidak cocok dengan yang dilakukan oleh Badan Usaha, atau sebaliknya.</p> | <p>8. Interface Risk is the risk that the method or standard of delivery of the contracted services will prevent or in some way frustrate the delivery of services by the public sector or vice versa. The risk includes when the quality of work done by the Government does not conform or not suitable with those done by the Project Company, or vice versa.</p> |
| <p>9. Risiko Politik adalah risiko yang dipicu tindakan/tiadanya tindakan PJP yang tidak dapat diprediksi sebelumnya yang merugikan secara material dan mempengaruhi pengembalian ekuitas dan pinjaman di pihak Badan Usaha. Risiko yang termasuk kategori ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a). Risiko mata uang yang tidak dapat dikonversi atau ditransfer; | <p>9. Political Risk is the risk of unforeseeable action/inaction by the CA that materially and adversely affects the expected Return on Equity and debt service of the Project Company. Thus, risks included into this category are:</p> <ul style="list-style-type: none"> a). Currency inconvertibility and non-transfer risk; |

- b). Risiko pengambilalihan;
- c). Risiko perubahan regulasi dan perundangan;
- d). Risiko sub-sovereign atau parastatal;
- e). Risiko perijinan;
- f). Risiko perubahan tarif pajak.

- b). Expropriation risk;
- c). Change in Law (legislative and government policy) risk;
- d). Sub-sovereign or Parastatal risk;
- e). Regulatory consent risk;
- f). Tax rate change risk;

10. Risiko Kahar adalah risiko terjadinya kejadian kahar (force majeure) yang sepenuhnya di luar kendali kedua belah pihak (misalnya bencana alam atau akibat manusia) dan akan mengakibatkan penundaan atau default oleh Badan Usaha dalam pelaksanaan kewajiban kontraknya.

10. Force Majeure Risk is the risk that a specified event entirely outside the control of either party (e.g. act of god, man-made catastrophic event) will occur and will result in a delay or default by the Project Company in the performance of its contractual obligations.

11. Risiko Kepemilikan Aset adalah risiko terjadinya peristiwa seperti kejadian kehilangan (misalnya hilangnya kontrak, force majeure), perubahan teknologi, dan lainnya, yang menyebabkan nilai ekonomi aset menurun, baik selama atau pada akhir masa kontrak.

11. Asset ownership risk is the risk that events such as loss events (e.g. contract loss, force majeure), technological change, and others, resulting in the decline of the economic value of the asset, either during or at the end of the contract period.

Prinsip Alokasi Risiko

Penentuan kewajiban PJPK dalam Perjanjian Kerja Sama proyek KPS perlu memenuhi prinsip alokasi risiko. Alokasi risiko yang optimal penting demi memaksimalkan value for money.

Prinsip yang lazim diterapkan untuk alokasi risiko adalah bahwa risiko sebaiknya dialokasikan kepada pihak yang relatif lebih mampu mengelolanya atau dikarenakan memiliki biaya terendah untuk menyerap risiko tersebut. Jika prinsip ini diterapkan dengan baik, diharapkan dapat menghasilkan premi risiko dan biaya proyek yang lebih rendah sehingga berdampak positif bagi pemangku kepentingan proyek.

Cakupan Risiko Penjaminan Infrastruktur

Secara umum, berikut adalah daftar sebagian dari risiko-risiko (merupakan kewajiban finansial PJPK dalam Perjanjian KPS) yang dapat dijamin oleh PT PII:

Principles of Risk Allocation

Determination of the CA's obligations in a PPP Agreement needs to conform with the risk allocation principles. An optimal risk allocation is vital in maximizing the value for money.

The common principle often implemented in risk allocation is that a risk should be allocated to the party that is relatively more capable in managing the risk (or having the least cost of absorbing such risk). If this principle is implemented properly, it is expected that the risk premium and the project cost would be lower in order to have positive impact to project stakeholders.

Risk Coverage of Infrastructure Guarantee

In general, the following non-exhaustive list are some of the risks (from the CA's financial obligation in the PPP Agreement) that can be covered by IIGF:

No	Risiko Risk	Deskripsi Description
1.	Lisensi, Izin dan Persetujuan Licenses, permits, and approvals	Cakupan terhadap risiko akibat keterlambatan atau kegagalan dalam memberikan lisensi, izin atau persetujuan (keterlambatan yang berdampak negatif terhadap biaya konstruksi, biaya pendanaan dan dimulai perolehan pendapatan). Coverage for delay or failure to grant licenses, permits, and approvals (delays that would have adverse effects on construction costs, financing charges, and the commencement of revenue).
2.	Keterlambatan/Kegagalan Financial Close Financial close delay/failure	Cakupan terhadap risiko keterlambatan atau kegagalan financial close yang diakibatkan tindakan/tidak bertindakannya PJPK (selain isu lahan dan isu perijinan). Coverage for any delay/failure of financial closure due to any other action/inaction on the part of the CA (beyond land and licenses/permits/approvals)

No	Risiko Risk	Deskripsi Description
3.	Perubahan Regulasi dan Perundangan Change in law/regulations	Cakupan terhadap kerugian sebagai dampak dari perubahan regulasi/ perundangan yang berdampak negatif terhadap proyek, seperti peraturan pajak, struktur tarif, atau peraturan yang mempengaruhi spesifikasi teknis proyek dan menyebabkan perubahan biaya. Berlaku hanya jika kontrak secara eksplisit terhadap dan terikat dengan regulasi/ perundangan yang berlaku (melindungi terhadap perubahan regulasi/ perundangan), dimana lazim bagi PJPK untuk menanggung risiko perubahan regulasi/ perundangan yang bersifat diskriminatif. Coverage for impact of change in law/regulation in event that change in law adversely affects project, such as tax law, law on tariff structure, or law that affects project's technical specifications and results in changes in costs. Applies only if contract is explicit (not silent) in its basis on and ties with existing law (i.e., protects from changes in law), where it is common for CA to bear the risk of discriminatory change of law.
4.	Wanprestasi Breach of contract	Cakupan terhadap tindakan/tidak bertindak PJPK yang melanggar kontrak, atau merubah kontrak secara sepihak. Coverage for CA's action/inaction in violation of contract, or CA's changing clauses of contract unilaterally
5.	Integrasi dengan Jaringan Integration with network	Cakupan terhadap tindakan/tidak bertindak PJPK (atau otoritas yang berwenang) yang mempengaruhi operasional/ pendapatan proyek karena kegagalan (atau tidak memadainya) integrasi dengan jaringan eksisting atau yang direncanakan. Coverage for actions/inaction that affect project operations/revenue by failure (or inadequate) integration with existing or future networks
6.	Risiko Fasilitas Pesaing Competing facility risk	Cakupan terhadap risiko adanya fasilitas/infrastruktur sejenis yang dibangun dan akan bersaing dengan penyediaan layanan yang diperjanjikan. Coverage for the risk that other similar facility/infrastructure is built which eventually competes with the delivery of the contracted services
7.	Risiko Pendapatan Revenue risk	Cakupan terhadap pemenuhan/penerapan kewajiban PJPK terhadap pendapatan proyek. Cakupan berlaku hanya jika PJPK secara kontraktual menyetujui pembayaran atas layanan infrastruktur/proyek (anuitas/dukungan fiskal terhadap kesenjangan kelayakan/pendapatan minimum). Coverage to fulfill/enforce CA's obligations on revenue. Coverage applies only to CA's contractually agreed payments (annuity/viability gap/minimum revenue)
8.	Risiko Permintaan Demand risk	Cakupan terhadap perubahan, yang ditanggung BU akibat tindakan CA, yang mempengaruhi permintaan layanan proyek. Coverage for change, borne of CA's actions, that have an influence on demand for the project's services
9.	Risiko Harga Pricing risk	Cakupan terhadap pemenuhan tingkat pendapatan yang tidak tercapai akibat perubahan tarif secara sepihak. Coverage to fulfil level of revenue that was not reached due to unilateral change of tariff
10.	Risiko Ekspropriasi Expropriation Risk	Cakupan terhadap tindakan pengambilalihan proyek oleh CA atau otoritas lainnya yang menyebabkan berakhirnya kontrak proyek. Coverage for takeover by CA or other public agencies causing end of project contract
11.	Risiko Tidak Dapat dilakukannya Konversi dan Transfer Mata Uang Currency inconvertibility & non-transfer risk	Cakupan terhadap risiko pendapatan/profit dari proyek tidak dapat dikonversi ke mata uang asing dan/atau tidak dapat direpatriasi ke negara asal investor. Coverage for risk that the revenue/profit from the project could not be converted to the foreign currency and /or repatriated to the investor's home country
12.	Risiko Parastatal atau Sub-nasional Sub-sovereign or Parastatal risk	Cakupan terhadap risiko suatu entitas sub-nasional atau parastatal yang bertindak sebagai CA pada suatu proyek yang gagal memenuhi pembayaran kontraktual atau kewajiban materiil lainnya (karena keputusan sepihak) Coverage for risk that the subsovereign or parastatal entity which act as the CA in the project has fail to perform its contractual payment or other material obligations (i.e. due to unilateral decision)
13.	Risiko Kahar yang Mempengaruhi PJPK Force majeure risk affecting CA	Cakupan terhadap risiko bahwa suatu kejadian di luar kendali kedua belah pihak (bencana alam atau akibat tindakan manusia) yang akan terjadi dan dapat menyebabkan keterlambatan atau kegagalan CA untuk memenuhi kinerja kewajiban kontraktual. Coverage for risk that a specified event entirely outside the control of either party (e.g. act of god, man-made catastrophic event) will occur and will result in a delay or default by CA in the performance of its contractual obligations.
14.	Risiko Interface Interface risk	Cakupan terhadap risiko bahwa metode atau standar layanan sektor publik akan menghambat layanan kontraktual atau sebaliknya. Risiko ini termasuk jika kualitas pekerjaan oleh pemerintah tidak sesuai dengan apa yang telah dikerjakan Badan Usaha. Coverage for risk that the method or standard of delivery of the contracted services will prevent or in some way frustrate the delivery of the public sector delivered services or vice versa. The risk includes when the quality of works done by government not conform/suitable with those done by the PC, vice versa.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

Pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/ CSR) di PT PII merupakan bagian yang menyatu dan sejalan dengan arah bisnis Perusahaan dalam mendorong pengembangan infrastruktur di Indonesia.

Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) commitments at IIGF is integrated into, and is in line with, the activities and direction of the Company's business undertaking in promoting infrastructure development in Indonesia.



Program Bina Lingkungan

Pelaksanaan misi sosial melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan suatu kewajiban bagi PT PII sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagaimana diatur dalam UU No. 19 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007. Hingga tahun 2012, pelaksanaan PKBL oleh PT PII masih terbatas pada aktivitas yang termasuk dalam ruang lingkup Program Bina Lingkungan. Dengan Perusahaan masih harus lebih berkonsentrasi membangun landasan usahanya, sumber daya yang ada dapat digunakan secara maksimal dalam mencapai tujuan-tujuan misi sosial PT PII.

Sumber dana untuk program Bina Lingkungan diambil dari penyisihan laba setelah pajak. Pada tahun 2012, alokasi dana PKBL adalah Rp 1.450.000.000, yaitu kurang lebih sekitar 1% dari laba bersih Perusahaan tahun 2011.

Pemberdayaan Guru Sekolah

PT PII berupaya mewujudkan tujuan program Bina Lingkungan untuk memberdayakan kondisi sosial masyarakat melalui aktivitas dukungan bidang pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Sejak tahun 2011, PT PII telah

Community Development Program

Contribution to social missions is mandatory for IIGF as a State-Owned Enterprise (SOE), and is implemented through the Partnership Program and Community Development Program (PKBL) as regulated in Law No. 19 Year 2003 and in Regulation of State Minister for SOE No. PER-05/MBU/2007. Up until 2012, implementation of PKBL at IIGF is still limited in scope to activities in the Community Development Program. As the Company is concentrating more on building its business foundation, this allows optimum utilization of available company resources towards the achievement of IIGF social missions.

Funding for the Community Development Program is set aside from the Company's net income. In 2012, IIGF allocated Rp 1,450 million for the program, representing approximately 1% of the Company's net income in 2011.

Empowering School Teachers

IIGF strives to realize the objectives of the Community Development program in improving the social welfare of communities by focusing its efforts on educational support, and especially on basic and secondary level education. Since 2011, IIGF

mengembangkan program peningkatan kapasitas guru Sekolah Dasar di wilayah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dan Kotamadya Bandar Lampung, Lampung. Pemilihan lokasi tersebut sesuai dengan kebijakan internal PT PII untuk memfokuskan program atau aktivitas tanggung jawab sosialnya dikaitkan dengan pengembangan infrastruktur dan dilaksanakan di sekitar lokasi proyek yang sedang ditangani.

Pada tahun 2012, sebagai kelanjutan dari program tahun sebelumnya, PT PII kembali menyelenggarakan program pengembangan kapasitas guru melalui pelaksanaan lokakarya 2-hari bekerjasama dengan lembaga Teachers Guide. Program kegiatan tersebut dilaksanakan dua kali pada tahun 2012, yaitu tanggal 30-31 Oktober 2012 di Bandar Lampung dan tanggal 18-19 Desember 2012 di Semarang. Sebanyak 51 guru Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bandar Lampung serta 54 guru SD dari Kabupaten Batang berpartisipasi dalam kedua lokakarya tersebut. Pelatihan dilakukan dengan konsep kreatif dan interaktif dimana peserta aktif terlibat mengembangkan proses pembelajaran yang lebih menarik yang selanjutnya dapat diterapkan di sekolah mereka masing-masing.

has had an ongoing program of capacity building for elementary school teachers in Batang Regency, Central Java, and in Bandar Lampung, Lampung. These locations are selected in accordance with IIGF internal policy to focus its corporate social responsibility commitments on programs or activities that are related to infrastructure development and carried out around the sites of ongoing projects.

In continuation of the previous year's program, IIGF in 2012 organized a 2-day workshop program of capacity building for teachers in collaboration with the Teachers Guide institution. The program was conducted twice in 2012, taking place on 30-31 October 2012 in Bandar Lampung and on 18-19 December 2012 in Semarang. Some 51 elementary school and junior high school teachers from Bandar Lampung, as well as 54 elementary school teachers from Batang Regency, participated at the two respective workshops. Training is given in a creative and interactive environment with active involvement of participants in developing more interesting learning processes that can be easily applied back at their respective schools.



PT PII juga memberikan bantuan sarana pendidikan berupa perangkat komputer, proyektor dan buku-buku untuk perpustakaan sekolah. Bantuan diberikan kepada sekolah-sekolah yang telah berpartisipasi dalam lokakarya pengembangan kapasitas guru, sehingga para guru tersebut dapat lebih efektif dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolahnya.

Kegiatan Donasi

Pada bulan Agustus 2012, sebagai bagian dari rangkaian acara internal perusahaan selama bulan suci Ramadhan, PT PII memberikan donasi bagi anak yatim dan kaum dhuafa di 10 panti asuhan di wilayah Jabodetabek. Kegiatan semacam ini merupakan yang pertama kali diadakan, dengan partisipasi dari seluruh karyawan Perusahaan.

IIGF also provides donations of teaching facilities in the form of personal computers, projectors, and books for school libraries. These are distributed to schools whose teachers that have participated in the workshops, so that these teachers can use the facilities effectively in improving the quality of learning processes in their schools.

Charitable Activities

In August 2012, as part of internal company activities during the holy month of Ramadhan, IIGF distributed donations for orphans and the destitute at 10 foster homes in the Greater Jakarta Area. IIGF employees participated in the event, which was the first of such activity to be conducted by the Company.

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2012 PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

Statement of the Board of Commissioners and Directors Regarding Responsibility over the 2012 Annual Report of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam laporan tahunan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) tahun 2012 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, hereby declare that all information in the annual report of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund for the year 2012 have been presented in their entirety and that we assume full responsibility for the accuracy of the contents of the Company's annual report.

This statement is duly made in all integrity.

Jakarta, May 2013

Dewan Komisaris Board of Commissioners

Freddy Rikson Saragih
Komisaris Utama
President Commissioner

Ayu Sukorini
Komisaris
Commissioner

Direksi Board of Directors

Sinthya Roesly
Direktur Utama
President Director

Yadi J. Ruchandi
Direktur Operasi
Director of Operations

Armand Hermawan
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Director of Finance and Risk Management

Laporan Keuangan

Financial Statements

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR
INDONESIA (PERSERO)**

**LAPORAN KEUANGAN/
*FINANCIAL STATEMENTS***

**31 DESEMBER 2012 DAN 2011/
*31 DECEMBER 2012 AND 2011***

**PERNYATAAN DIREKSI
PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR
INDONESIA (PERSERO)**

Sesuai dengan keputusan Direksi PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) ("Perusahaan"), kami menyatakan bahwa:

- (a) laporan keuangan Perusahaan menyajikan secara wajar posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, hasil usaha, dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut; dan
- (b) laporan keuangan Perusahaan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR
INDONESIA (PERSERO)**

In accordance with resolution of the Board of Directors of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (the "Company"), in the opinion of the Board of Directors:

- (a) *the financial statements of the Company are drawn up so as to present fairly the financial position as at 31 December 2012 and 2011, and the results of its operations, and its cash flows for the years then ended; and*
- (b) *the financial statements of the Company have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

Atas nama dan mewakili Direksi/*For and on behalf of the Board of Directors*

Jakarta
7 Maret/March 2013



Sinthya Roesly
Presiden Direktur/*President Director*



Armand Hermawan
Direktur Keuangan/*Finance Director*



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

**INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
TO THE SHAREHOLDERS OF**

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) ("Perusahaan") pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, dan hasil usaha serta arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

We have audited the accompanying statements of financial position of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (the "Company") as at 31 December 2012 and 2011, and the related statements of comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the years ended 31 December 2012 and 2011. These financial statements are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audits.

We conducted our audits in accordance with auditing standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statements presentation. We believe that our audits provides a reasonable basis for our opinion.

In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) as at 31 December 2012 and 2011, and the results of its operations and its cash flows for the years ended 31 December 2012 and 2011, in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards.

Jakarta
7 Maret/March 2013

Drs. Haryanto Sahari, CPA

Surat Izin Praktek Akuntan Publik/Licence of Public Accountant No. AP.0223

NOTICE TO READERS

The accompanying financial statements are not intended to present the financial position, results of operations and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. The standards, procedures and practices utilized to audit such financial statements may differ from those generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. Accordingly, the accompanying financial statements and the auditor's report thereon are not intended for use by those who are not informed about Indonesian accounting principles and auditing standards, and their application in practice.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan

Plaza 89, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-7 No.6 Jakarta 12940 - INDONESIA, P.O. Box 2473 JKP 10001
T: +62 21 5212901, F: + 62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id

Nomor Izin Usaha: KEP-151/KM.1/2010.

A130307002/DC2/HSH/III/2013

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 1 - Schedule

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2012 AND 2011**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2012</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2011</u>	
ASET				ASSETS
Kas dan setara kas	2,746,643,432	5	2,632,388,309	Cash and cash equivalents
Investasi	2,142,262,853	6	1,078,119,828	Investments
Piutang usaha	15,448,222	7	9,837,824	Account receivables
Piutang lainnya	268,645		59,130	Other receivables
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	1,637,312		1,117,579	Prepaid expenses and advances
Aset tetap	3,164,505	8	3,344,874	Fixed assets
Aset tak berwujud	189,461	9	-	Intangible assets
Beban tangguhan	41,460,284	10	10,494,214	Deferred expenses
Pajak dibayar dimuka	505,858	12a	-	Prepaid income tax
Aset pajak tangguhan	14,353,366	12d	2,699,782	Deferred tax asset
Uang jaminan yang dapat dikembalikan	903,398		569,587	Refundable deposits
JUMLAH ASET	<u>4,966,837,336</u>		<u>3,738,631,127</u>	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Utang usaha	2,596,065	11	1,379,309	Account payables
Utang pajak	1,730,402	12b	1,894,210	Taxes payable
Biaya yang masih harus dibayar, penyesuaian dan utang lain-lain	21,463,333	13	8,591,363	Accrued expenses, provisions and other payables
Pendapatan tangguhan	22,312,500	14	22,312,500	Unearned income
Liabilitas imbalan pasca kerja	1,617,771	15	665,266	Employee benefit obligation
JUMLAH LIABILITAS	<u>49,720,071</u>		<u>34,842,648</u>	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - modal dasar, 9.000.000 lembar (2011: 4.000.000 lembar), ditempatkan disetor penuh 4.500.000 lembar (2011: 3.500.000 lembar), dengan nilai nominal Rp 1.000.000 (jumlah penuh) per saham	4,500,000,000	16	3,500,000,000	Share capital - authorised, 9,000,000 shares (4,000,000 shares), issued and fully paid 4,500,000 shares (2011: 3,500,000 shares), with par value of Rp 1,000,000 (full amount) per share
Laba belum direalisasi atas kepemilikan aset keuangan tersedia untuk dijual	1,917,096		516,379	Unrealised gain from available-for-sale financial assets
Saldo laba				Retained earnings
Ditentukan penggunaannya	10,150,000	17	2,300,000	Appropriated
Tidak ditentukan penggunaannya	405,050,169		200,972,100	Unappropriated
JUMLAH EKUITAS	<u>4,917,117,265</u>		<u>3,703,788,479</u>	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	<u>4,966,837,336</u>		<u>3,738,631,127</u>	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 2 - Schedule

**LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2012 AND 2011**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2012</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2011</u>	
Pendapatan				Revenues
Pendapatan penjaminan				Revenue from guarantee
- Pendapatan provisi dan komisi	-		45,227,438	Fees and commission -
- Pendapatan premi	-		-	Premium income -
Pendapatan pengelolaan dana, kotor	<u>312,240,468</u>		<u>183,121,806</u>	Income from investment, gross
	<u>312,240,468</u>	18	<u>228,349,244</u>	
Beban usaha				Operating expenses
Penjaminan	(13,700,207)	19	(13,130,939)	Guarantee
Administrasi dan umum	(32,622,495)	19	(24,627,858)	General and administrative
Pengembangan	(2,635,416)	19	(1,729,954)	Development
Penyusutan	(2,108,212)	19	(1,280,770)	Depreciation
Amortisasi	(65,974)	19	-	Amortisation
Penghasilan keuangan, kotor	909,896		3,748,482	Finance income, gross
Kerugian kurs, bersih	(72,424)		(115,866)	Foreign exchange loss, net
Lain-lain	<u>(371,548)</u>		<u>(81,534)</u>	Others
	<u>(50,666,380)</u>		<u>(37,218,439)</u>	
Laba sebelum pajak penghasilan	261,574,088		191,130,805	Profit before income tax
Beban pajak penghasilan	<u>(48,196,019)</u>	12c	<u>(33,989,716)</u>	Income tax expense
Laba tahun berjalan	213,378,069		157,141,089	Profit for the year
Laba/(beban) komprehensif lain:				Other comprehensive income/ (expense):
- Perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	2,039,749		516,379	Change in fair value of - available-for-sale financial assets
- Pajak penghasilan terkait dengan pendapatan komprehensif lain	<u>(639,032)</u>		<u>-</u>	Income tax related to other - comprehensive income
Laba komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak	<u>1,400,717</u>		<u>516,379</u>	Other comprehensive income for the year, net of tax
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	<u>214,778,786</u>		<u>157,657,468</u>	Total comprehensive income for the year

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 3 - Schedule

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali
dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2012 AND 2011**
(Expressed in thousand of Rupiah, unless
otherwise stated)

		Modal saham/ <i>Share capital</i>	Laba belum direalisasi atas kepernilikan aset keuangan tersedia untuk dijual/ <i>Unrealised gain from available- for-sale financial assets</i>	Saldo laba/Retained earnings	Jumlah/ Total	
	Catatan/ Notes			Ditentukan penggunaannya/ <i>Appropriated</i>	Tidak ditentukan penggunaannya/ <i>Unappropriated</i>	
Saldo 1 Januari 2011		2.000.000,000	-	-	46.597,011	2.046.597,011 Balance at 1 January 2011
Penambahan modal saham	16	1.500.000,000	-	-	-	1.500.000,000 <i>Increase of share capital</i>
Pencadangan saldo laba	17	-	-	2.300,000	(2.300,000)	- <i>Appropriation retained earnings</i>
Program kemitraan dan bina lingkungan yang dialokasikan dari laba tahun 2010	17	-	-	-	(466,000)	(466,000) <i>Corporate social responsibility programme allocated from profit for the year 2010</i>
Laba komprehensif tahun berjalan		-	516,379	-	157,141,089	157,657,468 <i>Comprehensive income for the year</i>
Saldo 31 Desember 2011		3.500.000,000	516,379	2.300,000	200,972,100	3.703.788,479 Balance at 31 December 2011
Penambahan modal saham	16	1.000.000,000	-	-	-	1.000.000,000 <i>Increase of share capital</i>
Pencadangan saldo laba	17	-	-	7.850,000	(7.850,000)	- <i>Appropriation retained earnings</i>
Program kemitraan dan bina lingkungan yang dialokasikan dari laba tahun 2011	17	-	-	-	(1,450,000)	(1,450,000) <i>Corporate social responsibility programme allocated from profit for the year 2011</i>
Laba komprehensif tahun berjalan		-	1.400,717	-	213,378,069	214.778,786 <i>Comprehensive income for the year</i>
Saldo 31 Desember 2012		4.500.000,000	1,917,096	10.150,000	405,050,169	4.917.117,265 Balance at 31 December 2012

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part
of these financial statements.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 4 - Schedule

**LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2012 AND 2011**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	
Arus kas dari aktivitas operasi			Cash flows from operating activities
Laba sebelum pajak penghasilan	261,574,088	191,130,805	<i>Profit before income tax</i>
Ditambah unsur yang tidak mempengaruhi arus kas:			<i>Add items not affecting cash flows:</i>
- Beban penyusutan	2,108,212	1,268,727	<i>Depreciation -</i>
- Beban amortisasi	65,974	12,043	<i>Amortization -</i>
- Beban penyesuaian imbalan pasca kerja	<u>952,505</u>	<u>438,226</u>	<i>Provision for employee benefits obligation</i>
Arus kas operasi sebelum perubahan modal kerja	<u>264,700,779</u>	<u>192,849,801</u>	<i>Operating cash flows before changes in working capital</i>
Perubahan modal kerja:			<i>Changes in working capital:</i>
- Piutang usaha	(5,610,398)	(1,464,564)	<i>Account receivables -</i>
- Piutang lainnya	(209,515)	(59,130)	<i>Other receivables -</i>
- Biaya dibayar di muka dan uang muka	(575,940)	(381,923)	<i>Prepaid expenses and advances</i>
- Beban tangguhan	(30,966,070)	(5,090,395)	<i>Deferred expenses -</i>
- Utang usaha	1,216,756	(68,735)	<i>Account payables -</i>
- Utang pajak	(163,808)	1,818,204	<i>Taxes payable -</i>
- Biaya masih harus dibayar dan utang lain-lain	12,200,143	3,559,244	<i>Accrued expenses and other payables</i>
- Pendapatan tangguhan	-	22,312,500	<i>Unearned income -</i>
- Pembayaran pajak final	(60,488,635)	(36,603,304)	<i>Payment for final income tax -</i>
- Pembayaran pajak dibayar di muka	<u>(449,651)</u>	<u>-</u>	<i>Payment for prepaid tax -</i>
	<u>(85,047,118)</u>	<u>(15,978,103)</u>	
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	<u>179,653,661</u>	<u>176,871,698</u>	Net cash flow provided from operating activities
Arus kas dari aktivitas investasi			Cash flows from investing activities
Penempatan investasi	(1,062,103,276)	(1,047,603,449)	<i>Placement for investment</i>
Pembelian aset tetap dan aset tak berwujud	(2,183,278)	(2,599,052)	<i>Acquisition of fixed assets and intangible assets</i>
Penempatan uang jaminan yang dapat dikembalikan	<u>(333,811)</u>	<u>(270,784)</u>	<i>Refundable deposit</i>
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	<u>(1,064,620,365)</u>	<u>(1,050,473,285)</u>	Net cash flow used in investing activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan			Cash flows from financing activities
Penerimaan modal saham	1,000,000,000	1,500,000,000	<i>Share capital received</i>
Pembayaran program kemitraan dan bina lingkungan	<u>(778,173)</u>	<u>(7,235)</u>	<i>Payment for corporate social responsibility programme</i>
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	<u>999,221,827</u>	<u>1,499,992,765</u>	Net cash flow provided from financing activities
Kenaikan bersih kas dan setara kas	114,255,123	626,391,178	Net increase in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas awal tahun	<u>2,632,388,309</u>	<u>2,005,997,131</u>	Cash and cash equivalents at beginning of year
Kas dan setara kas akhir tahun	<u>2,746,643,432</u>	<u>2,632,388,309</u>	Cash and cash equivalents at end of year

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/1 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris Lolani Kurniati Irdham-Idroes, SH, LLM No. 29 tanggal 30 Desember 2009. Anggaran Dasar Perusahaan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.AHU-04444.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 27 Januari 2010.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, Perusahaan bergerak dalam hal memberikan penjaminan pada proyek-proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta ("KPS") di bidang infrastruktur.

Perusahaan adalah Badan Usaha Penjamin Infrastruktur (BUPI) yang beroperasi sebagai suatu entitas "*single window*" dalam melakukan proses, penilaian (*appraisal*) dan penyusunan struktur (*structuring*) untuk semua penjaminan yang diberikan pemerintah pada proyek infrastruktur yang diajukan oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK). Perusahaan dapat menerapkan berbagai jenis dan struktur penjaminan – yang disokong (*backstop*) oleh, bila diperlukan, neraca Perusahaan, Pemerintah Republik Indonesia, lembaga keuangan multilateral, atau kombinasinya – untuk mewujudkan fleksibilitas operasional yang lebih baik dalam penyediaan penjaminan infrastruktur.

Tujuan utama dari Perusahaan adalah untuk:

- a) Memastikan proyek infrastruktur yang didukung memiliki struktur yang baik sehingga dapat meningkatkan kelayakan kredit dan proyek infrastruktur;
- b) Memfasilitasi pengembangan proyek Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (yaitu Kementerian/ Lembaga, BUMN, Pemerintah Daerah) dengan menyediakan instrumen finansial untuk meningkatkan kelayakan proyek infrastruktur dan jasa konsultasi terkait;
- c) Mengembangkan tata kelola yang baik dari implementasi penyediaan instrumen finansial untuk meningkatkan kelayakan proyek infrastruktur;
- d) Memagari kewajiban kontinjensi Pemerintah sehubungan dengan pemberian jaminan Pemerintah.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2012 AND 2011

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (the "Company") was established based on Notarial Deed of Lolani Kurniati Irdham-Idroes, SH, LLM No. 29 dated 30 December 2009. The Articles of Association were approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his decree No.AHU-04444.AH.01.01.Tahun 2010, dated 27 January 2010.

In accordance with Article 3 of the Articles of Association, the Company is engaged to provide the guarantees for the Public Private Partnership ("PPP") projects in the infrastructure sector.

The Company operates as a "single window" entity for the processing, appraisal and structuring of all guarantees provided to infrastructure projects proposed by the Government's Contracting Agencies ("CA"). The Company employs various types and structures of guarantees – back-stopped, as necessary, by the Company balance sheet, the Government of Indonesia ("GOI") balance sheet, a multilateral financing agency or a combination thereof – for greater operational flexibility in providing guarantees for infrastructure projects.

The primary objective of the Company is to:

- a) Ensuring the proper structuring of infrastructure projects in order to improve creditworthiness and quality of the respective infrastructure projects;
- b) Facilitating the deal flow for Contracting Agencies (i.e. Ministries, SOEs, Regional Governments) through the provision of financial instruments to improve project creditworthiness, as well as related project consultation services;
- c) Developing good governance practices in the provision of financial instruments in order to improve project viability;
- d) To ring-fence the Government's contingent liabilities related to the provision of guarantees by the Government.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/2 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2012 AND 2011

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

Perusahaan berdomisili di Indonesia, berkedudukan di Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai 14, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta. Perusahaan mulai beroperasi pada tahun 2010.

Pada 31 Desember 2012 and 2011, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

The Company is domiciled in Indonesia, its office is located at Sampoerna Strategic Square, North Tower, 14th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta. The Company started its commercial operations in 2010.

As at 31 December 2012 and 2011, the members of the Company's Board of Commissioners and Directors were as follows:

2012/2011

Komisaris Utama	Freddy Rikson Saragih	President Commissioner
Komisaris	Ayu Sukorini	Commissioner
Direktur Utama	Sinthya Roesly	President Director
Direktur	Armand Hermawan Yadi Jaya Ruchandi	Directors

Pada 31 Desember 2012, Perusahaan memiliki 48 tenaga kerja (2011: 36 tenaga kerja) (tidak diaudit).

As at 31 December 2012, the Company had 48 manpower (2011: 36 manpower) (unaudited).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Laporan keuangan Perusahaan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi dan diselesaikan pada tanggal 7 Maret 2013.

Berikut ini adalah ikhtisar kebijakan akuntansi penting yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

These financial statements were authorised to be issued by the Directors on 7 March 2013.

Presented below are the principal accounting policies adopted in preparing the Company's financial statements.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Dasar penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan konsep harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

a. Basis of preparation of the financial statements

The financial statements of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared under the accrual basis. The financial statements have been prepared under the historical cost convention, except for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)**

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas meliputi kas, kas di bank, deposito yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan khusus, dibulatkan menjadi dan disajikan dalam ribuan Rupiah yang terdekat. Seluruh angka dalam mata uang selain Rupiah dinyatakan dalam jumlah penuh.

Kecuali dinyatakan dibawah ini, kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan tahunan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 4.

Perubahan pada pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi pernyataan standar akuntansi keuangan

Pada tanggal 1 Januari 2012, Perusahaan menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) dan interpretasi standar akuntansi keuangan (ISAK) baru dan revisi yang efektif sejak tanggal tersebut. Perubahan kebijakan akuntansi Perusahaan telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2012 AND 2011**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**a. Basis of preparation of the financial statements (continued)**

The cash flows statement is prepared based on the indirect method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities. For the purpose of the cash flows, cash and cash equivalents include cash on hand, cash in banks, deposits held at call with banks and short-term investment with remaining maturities of three months or less.

Figures in the financial statements are rounded to and expressed in thousands of Rupiah unless otherwise stated. Amounts in currencies other than Rupiah are stated in full amount.

Except as described below, the accounting policies applied are consistent with those of the annual financial statements for the year ended 31 December 2011, which conform to the Indonesian Financial Accounting Standards.

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Company's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 4.

Changes to the statement of financial accounting standards and interpretation of the statement of financial accounting standards

On 1 January 2012, the Company adopted new and revised statements of financial accounting standards ("SFAS") and interpretations of statements of financial accounting standards ("ISFAS") that are mandatory for application from that date. Changes to the Company's accounting policies have been made as required, in accordance with the transitional provisions in the respective standards and interpretations.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)**

Penerapan standar dan interpretasi baru atau revisi, yang relevan dan memberikan dampak pada laporan keuangan Perusahaan, adalah sebagai berikut:

PSAK No. 24 (Revisi 2010), "Imbalan Kerja"

Beberapa revisi penting pada standar ini yang relevan pada Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan keuntungan/(kerugian) aktuarial

Standar yang direvisi ini memperkenalkan alternatif metode baru untuk mengakui keuntungan/(kerugian) aktuarial, yaitu dengan mengakui seluruh keuntungan/(kerugian) melalui pendapatan komprehensif lainnya.

2. Persyaratan pengungkapan

Standar yang direvisi ini mengemukakan beberapa persyaratan pengungkapan, antara lain:

- Persentase atau jumlah setiap kategori utama yang membentuk nilai wajar dari aset program;
- Deskripsi naratif mengenai dasar yang digunakan untuk menentukan ekspektasi tingkat imbal hasil aset program keseluruhan;
- Jumlah atas nilai kini liabilitas imbalan pasti dan nilai wajar aset program untuk periode tahun berjalan dan periode tahun sebelumnya; dan
- Jumlah penyesuaian pengalaman yang muncul atas liabilitas program dan aset program untuk periode tahun berjalan dan periode tahun sebelumnya.

Perusahaan telah memilih untuk tetap menggunakan pendekatan koridor dalam pengakuan keuntungan/(kerugian) aktuarial. Perusahaan telah memberikan pengungkapan tambahan pada Catatan 15.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2012 AND 2011**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**a. Basis of preparation of the financial statements (continued)**

The adoption of the following new or revised standards and interpretations, which are relevant to and resulted in an effect on the Company's financial statements, as follows:

SFAS 24 (Revised 2010), "Employee benefits"

Several notable revisions which relevant to the Company are as follows:

1. Recognition of actuarial gains/(losses)

The revised standard introduces a new alternative method to recognise actuarial gains/(losses), that is to recognise all actuarial gains/(losses) in full through other comprehensive income.

2. Disclosure requirements

The revised standard introduces a number of disclosure requirements including disclosure of:

- The percentage or amount of each major category of investment making up total plan assets;
- A narrative description of the basis used to determine the overall expected rate of return on assets;
- The amounts for the current annual period and the previous annual period of present value of the defined benefit obligation and fair value of the plan assets; and
- The amounts for the current annual period and the previous annual period of experience adjustments arising on the plan liabilities and plan assets.

The Company has elected to continue to use the corridor approach in the recognition of actuarial gains/(losses). The Company has added additional disclosures in Note 15.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)****a. Dasar penyusunan laporan keuangan
(lanjutan)****PSAK 60, "Instrumen Keuangan:
Pengungkapan"**

Standar yang baru memperkenalkan pengungkapan baru terkait instrumen keuangan dan tidak memiliki dampak pada klasifikasi dan valuasi dari instrumen keuangan Perusahaan.

Perusahaan telah menyertakan pengungkapan yang dipersyaratkan PSAK 60 untuk laporan keuangan.

Penerapan dari standar, interpretasi baru/ revisi dan pencabutan standar berikut, tidak menimbulkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan efek material jumlah yang dilaporkan atas periode berjalan atau periode sebelumnya:

- PSAK 10 (Revisi 2010), "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing"
- PSAK 13 (Revisi 2011), "Properti Investasi"
- PSAK 16 (Revisi 2011), "Aset Tetap"
- PSAK 18 (Revisi 2010), "Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya"
- PSAK 26 (Revised 2011), "Biaya Pinjaman"
- PSAK 28 (Revisi 2010), "Akuntansi untuk Asuransi Kerugian"
- PSAK 30 (Revisi 2011), "Sewa"
- PSAK 33 (Revisi 2011), "Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pertambangan Umum"
- PSAK 34 (Revisi 2010), "Kontrak Konstruksi"
- PSAK 36 (Revisi 2010), "Akuntansi untuk Asuransi Jiwa"
- PSAK 45 (Revisi 2011), "Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba"
- PSAK 46 (Revisi 2010), "Pajak Penghasilan"
- PSAK 50 (Revisi 2010), "Instrumen Keuangan: Penyajian"
- PSAK 53 (Revisi 2010), "Pembayaran Berbasis Saham"
- PSAK 55 (Revisi 2011), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran"
- PSAK 56 (Revisi 2011), "Laba Per Saham"

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2012 AND 2011**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)****a. Basis of preparation of the financial
statements (continued)****SFAS 60, "Financial Instrument:
Disclosures"**

The new standard introduces new disclosures relating to financial instruments and does not have any impact on the classification and valuation of the Company's financial instruments.

The Company has incorporated disclosure requirements of SFAS 60 in the financial statements.

The adoption of these new and revised standards and interpretations did not result in substantial changes to the Company's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior years financial statement:

- SFAS 10 (Revised 2010), "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates"
- SFAS 13 (Revised 2011), "Investment Property"
- SFAS 16 (Revised 2011), "Fixed Assets"
- SFAS 18 (Revised 2010), "Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans"
- SFAS 26 (Revised 2011), "Borrowing Costs"
- SFAS 28 (Revised 2010), "Accounting for Loss Insurance"
- SFAS 30 (Revised 2011), "Leases"
- SFAS 33 (Revised 2011), "Stripping Activities and Environmental Management in General Mining"
- SFAS 34 (Revised 2010), "Construction Contracts"
- SFAS 36 (Revised 2010), "Accounting for Life Insurance"
- SFAS 45 (Revised 2011), "Financial Reporting for Non-Profit Organisations"
- SFAS 46 (Revised 2010), "Income Taxes"
- SFAS 50 (Revised 2010), "Financial Instrument: Presentation"
- SFAS 53 (Revised 2010), "Share-Based Payment"
- SFAS 55 (Revised 2011), "Financial Instrument: Recognition and Measurement"
- SFAS 56 (Revised 2011), "Earnings per Share"

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2012 AND 2011**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)**

- PSAK 61, "Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah"
- PSAK 62, "Kontrak Asuransi"
- PSAK 63, "Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi"
- PSAK 64, "Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Mineral"
- ISAK 13, "Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri"
- ISAK 15 – PSAK 24, "Batasan Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya"
- ISAK 16, "Perjanjian Konsesi Jasa"
- ISAK 18, "Bantuan Pemerintah - Tidak Ada Relasi Spesifik dengan Aktivitas Operasi"
- ISAK 19, "Aplikasi Pendekatan Penyajian Kembali pada PSAK 63: Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi"
- ISAK 20, "Pajak Penghasilan - Perubahan dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang Saham"
- ISAK 22, "Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan"
- ISAK 23, "Sewa Operasi - Insentif"
- ISAK 24, "Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan suatu Bentuk Legal Sewa"
- ISAK 25, "Hak atas Tanah"
- ISAK 26, "Penilaian Ulang Derivatif Melekat"

Pencabutan standar dan interpretasi ini tidak menyebabkan perubahan signifikan terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak berdampak material atas jumlah yang dilaporkan atas periode berjalan atau periode sebelumnya:

- PSAK 11, "Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing"
- PSAK 27, "Akuntansi Koperasi"
- PSAK 29, "Akuntansi Minyak dan Gas Bumi"
- PSAK 39, "Akuntansi Kerjasama Operasi"
- PSAK 44, "Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estate"
- PSAK 47, "Akuntansi Tanah"
- PSAK 52, "Akuntansi Mata Uang Pelaporan"

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**a. Basis of preparation of the financial statements (continued)**

- SFAS 61, "Accounting for Government Grants and Disclosures of Government Assistance"
- SFAS 62, "Insurance Contracts"
- SFAS 63, "Financial Reporting in Hyperinflationary Economies"
- SFAS 64, "Exploration and Evaluation of Mineral Resources"
- ISFAS 13, "Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation"
- ISFAS 15 – SFAS 24, "The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction"
- ISFAS 16, "Service Concession Arrangements"
- ISFAS 18, "Government Assistance - No Specific Relation to Operating Activities"
- ISFAS 19, "Applying the Restatement Approach under SFAS 63: Financial Reporting in Hyperinflationary Economies"
- ISFAS 20, "Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders"
- ISFAS 22, "Service Concession Arrangements: Disclosure"
- ISFAS 23, "Operating Leases - Incentives"
- ISFAS 24, "Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease"
- ISFAS 25, "Land Use Rights"
- ISFAS 26, "Reassessment of Embedded Derivatives"

The withdrawals of these standards and interpretations did not result in significant changes to the Company's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial period:

- SFAS 11, "Translation of Financial Statements in Foreign Currencies"
- SFAS 27, "Accounting for Cooperatives"
- SFAS 29, "Accounting for the Oil and Gas"
- SFAS 39, "Accounting for Joint Operations"
- SFAS 44, "Accounting for Real Estate Development Activities"
- SFAS 47, "Accounting for Land"
- SFAS 52, "Reporting Currency"

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/7 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan
(lanjutan)**

- ISAK 4, "Alternatif Perlakuan yang Dijijinkan atas Selisih Kurs"
- ISAK 5, "Pelaporan Perubahan Nilai Wajar Investasi Efek dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual"

b. Penjabaran mata uang asing

a. Mata uang fungsional dan penyajian

Item yang disertakan dalam laporan keuangan Perusahaan diukur menggunakan mata uang yang sesuai dengan lingkungan ekonomi utama dimana Perusahaan beroperasi ("mata uang fungsional").

Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah (Rp) yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Perusahaan.

b. Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs penutup yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan kurs yang berlaku pada tanggal pelaporan. Keuntungan dan kerugian dari selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing, diakui pada laporan laba rugi.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2012 AND 2011**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**a. Basis of preparation of the financial
statements (continued)**

- ISFAS 4, "Allowed Alternative Accounting Treatment on Exchange Difference"
- ISFAS 5, "Reporting Changes in Fair Value of Securities included in Available for Sale Investment"

b. Foreign currency translation

a. Functional and presentation currency

Items included in the financial statements of the Company are measured using the currency of the primary economic environment in which the Company operates (the "functional currency").

The financial statements are presented in "Rupiah" (Rp), which is the functional currency of the Company.

b. Transactions and balances

Transactions denominated in foreign currency are converted into Rupiah using the closing exchange rate prevailing at the date of the transactions. At the reporting date, foreign currency monetary assets and liabilities are translated using the closing exchange rate prevailing at that date. Foreign exchange gains and losses arising from transactions in foreign currencies and from the translation of foreign currency monetary assets and liabilities are recognised in the profit or loss.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas meliputi kas, kas di bank, deposito yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

d. Aset keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori sebagai berikut: diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo, atau yang tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan ini pada saat awal pengakuannya.

- (i) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan, jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Perusahaan tidak memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok yang diperdagangkan.

- (ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pinjaman yang diberikan dan piutang perusahaan terdiri dari kas dan setara kas, investasi dalam deposito berjangka dan *security deposit*.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2012 AND 2011**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents includes cash on hand, cash in banks, deposits held at call with banks and other short-term highly liquid investments with remaining maturities of three months or less.

d. Financial assets

The Company classifies its financial assets in the following categories: at fair value through profit or loss, loans and receivable, held-to-maturity investments, or available-for sale. The classification depends on the purpose for which the financial assets were acquired. Management determines the classification of its financial assets at initial recognition.

- (i) *Financial assets at fair value through profit or loss*

Financial assets at fair value through profit or loss are financial assets held for trading, which is acquired principally for the purpose of selling or repurchasing it in the short term. The Company has no financial assets that are classified as held for trading.

- (ii) *Loans and receivables*

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. Loans and receivables are initially recognised at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method. The Company's loans and receivables comprise cash and cash equivalents, investment in time deposits and security deposits.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/9 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset keuangan (lanjutan)

(iii) Aset keuangan tersedia untuk dijual

Investasi dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditentukan pada kategori ini atau tidak diklasifikasikan pada kategori yang lain. Setelah pengukuran awal, aset keuangan ini diukur pada nilai wajar dan keuntungan atau kerugiannya diakui dalam laporan perubahan ekuitas hingga dihentikan pengakuannya. Investasi pada obligasi tertentu diklasifikasikan dalam kategori ini.

(iv) Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo

Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta manajemen mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Pada saat pengakuan awal, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif. Investasi pada obligasi tertentu di klasifikasikan dalam kategori ini.

e. Aset tetap

Aset tetap diakui sebesar harga perolehan, dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap, sebagai berikut:

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2012 AND 2011**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial assets (continued)

(iii) Available-for-Sale ("AFS") financial assets

AFS financial assets are non-derivative financial assets that are either designated in this category or not classified in any other categories. After initial measurement, AFS financial assets are measured at fair value with unrealised gains or losses recognised in stockholders' equity until the financial assets are derecognised. The Company's investment in certain bonds is classified in this category.

(iv) Held-to-Maturity ("HTM") investments

HTM investments are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities that management has the positive intention and ability to hold them to maturity. These financial assets are initially recognised at fair value including transaction costs and subsequently measured at amortised cost, using the effective interest method. The Company's investment in certain bonds is classified in this category.

e. Fixed assets

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation. Depreciation is computed using the straight-line method over the following estimated useful lives:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2012 AND 2011**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)****e. Aset tetap (lanjutan)****e. Fixed assets (continued)**

	<u>Tahun/Years</u>	
Prasarana kantor	3	<i>Leasehold improvement</i>
Peralatan komputer	3	<i>Computer equipments</i>
Peralatan kantor, perabotan dan perlengkapan	3	<i>Office equipments, furnitures and fixtures</i>

Nilai sisa aset dan masa manfaat aset tetap ditelaah, dan disesuaikan bila perlu, pada setiap akhir periode pelaporan

The assets' residual values and useful lives are reviewed, and adjusted if appropriate, at the end of each reporting period.

Biaya-biaya setelah perolehan awal diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah hanya apabila kemungkinan besar Perusahaan akan mendapatkan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Jumlah tercatat komponen yang diganti tidak lagi diakui. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi selama periode dimana biaya-biaya tersebut terjadi.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognised. All other repairs and maintenance are charged to profit or loss during the financial period in which they are incurred.

Perusahaan melakukan penelaahan untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai aset pada akhir tahun. Jika indikasi tersebut terjadi, Perusahaan memperkirakan kembali nilai perolehan aset tersebut dan mengakui penurunan nilai aset sebagai beban dalam laporan laba rugi.

The Company conducts a review to determine whether there is any indication of asset value impairment at the end of the year. If any such indications exist, the Company estimates the recoverable amount of their assets and recognises the impairment in asset values as an expense in the statement of income.

Jika aset tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutan yang berhubungan dengan aset tersebut dikeluarkan dari laporan keuangan, dan keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi.

When fixed assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values and the related accumulated depreciation are eliminated from the financial statements, and the resulting gains and losses on the disposal of fixed assets are recognised in the statement of income.

f. Aset tak berwujud**f. Intangible assets**

Biaya yang terkait dengan pemeliharaan program piranti lunak komputer diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang dapat secara langsung diatribusikan kepada desain dan pengujian produk piranti lunak yang dapat diidentifikasi dan unik yang dikendalikan oleh Perusahaan diakui sebagai aset tak berwujud.

Costs associated with maintaining computer software programs are recognised as an expense as incurred. Development costs that are directly attributable to the design and testing of identifiable and unique software products controlled by the Company are recognised as intangible assets.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2012 AND 2011**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**f. Aset tak berwujud (lanjutan)**

Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dikapitalisasi sebagai bagian produk piranti lunak mencakup beban pekerja pengembang piranti lunak dan bagian *overhead* yang relevan.

Pengeluaran pengembangan yang lain yang tidak memenuhi kriteria ini diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang sebelumnya diakui sebagai beban tidak dapat diakui sebagai aset pada periode berikutnya.

Biaya pengembangan piranti lunak komputer diakui sebagai aset yang diamortisasi sebagai aset yang diamortisasi selama estimasi masa manfaat, yang tidak lebih dari empat tahun.

g. Perpajakan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas. Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan.

Pajak penghasilan tangguhan diakui dengan menggunakan metode *balance sheet liability*, untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya dalam laporan keuangan. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah diberlakukan atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan berlaku pada saat aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah penghasilan kena pajak di masa yang akan datang akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat dimanfaatkan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**f. Intangible assets (continued)**

Directly attributable costs that are capitalised as part of the software product include the software development employee costs and an appropriate portion of relevant overheads.

Other development expenditures that do not meet these criteria are recognised as an expense as incurred. Development costs previously recognised as an expense are not recognised as an asset in a subsequent period.

Computer software development costs recognised as assets are amortised over their estimated useful lives, which does not exceed four years.

g. Taxation

Tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in the profit or loss, except to the extent it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity. The current income tax is calculated using tax rates that have been enacted at the reporting date.

Deferred income tax is provided in full using the balance sheet liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements. Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or substantially enacted as at reporting period and is expected to apply when the related deferred income tax assets is realised or the deferred income tax liability is settled.

Deferred income tax assets are recognised to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2012 AND 2011**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Perpajakan (lanjutan)

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan dicatat ketika surat ketetapan pajak diterima atau, jika mengajukan keberatan/banding, ketika hasil keberatan/banding diputuskan.

Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

h. Liabilitas imbalan kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan.

Imbalan pensiun

Perusahaan diharuskan menyediakan imbalan pensiun minimum yang diatur dalam UU No. 13/2003, yang merupakan kewajiban imbalan pasti. Jika imbalan pensiun sesuai dengan UU No. 13/2003 lebih besar dari program pensiun yang ada, selisih tersebut diakui sebagai bagian dari liabilitas imbalan pensiun.

Liabilitas imbalan pensiun tersebut merupakan nilai kini liabilitas pasti pada tanggal pelaporan dikurangi dengan nilai wajar aset program yang berasal dari program pensiun yang ada dan penyesuaian atas keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Liabilitas imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga Obligasi Pemerintah jangka panjang pada tanggal pelaporan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan mata uang di mana imbalan tersebut akan dibayarkan dan yang memiliki jangka waktu yang sama dengan liabilitas imbalan pensiun yang bersangkutan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Taxation (continued)

Amendments to taxation obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed against, when the results of the appeal are determined.

Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretations. Where appropriate, it established provisions based on the amounts expected to be paid to the tax authorities.

h. Employee benefits obligation

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits are recognised when they are accrued to the employees.

Pension benefits

The Company is required to provide a minimum pension benefit as stipulated in Law No.13/2003, which represents an underlying defined benefit obligation. If the pension benefits based on Law No. 13/2003 are higher, the difference is recorded as part of the overall pension benefits obligation.

The liability recognised in the statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the balance sheet date less the fair value of plan assets, together with adjustments for unrecognised actuarial gains or losses and past services cost. The defined benefits obligation is calculated annually by an independent actuary using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of reporting date of Government Bonds that are denominated in the currency in which the benefit will be paid, and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension liability.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)****h. Liabilitas imbalan kerja (lanjutan)****Imbalan pensiun (lanjutan)**

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial yang jumlahnya lebih besar dari 10% dari nilai wajar aset program atau 10% dari nilai kini liabilitas imbalan pasti, dibebankan atau dikreditkan ke laporan laba rugi selama sisa masa kerja rata-rata yang diharapkan dari karyawan tersebut.

Biaya jasa lalu diakui secara langsung di laporan laba rugi, kecuali perubahan terhadap program pensiun tersebut mensyaratkan karyawan tersebut untuk bekerja selama periode waktu tertentu. Dalam hal ini, biaya jasa lalu akan diamortisasi secara garis lurus sepanjang periode tersebut.

Biaya jasa kini dibebankan pada saat terjadinya.

Perusahaan memiliki program iuran pasti yang merupakan program pensiun dimana Perusahaan membayar sejumlah iuran tertentu kepada entitas (dana) yang terpisah. Untuk program iuran pasti, Perusahaan membayar iuran program pensiun baik karena diwajibkan, berdasarkan kontrak atau sukarela. Namun karena Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 mengharuskan entitas membayar jumlah tertentu kepada para pekerja yang telah memasuki usia pensiun yang ditentukan berdasarkan masa kerja, Perusahaan rentan terhadap kemungkinan untuk membayar kekurangan apabila iuran kumulatif kurang dari jumlah tertentu. Sebagai akibatnya untuk tujuan pelaporan keuangan, program iuran pasti secara efektif diberlakukan seolah-olah sebagai program imbalan pasti.

Imbalan jangka panjang lainnya

Perusahaan memberikan manfaat imbalan cuti panjang. Hak atas imbalan ini pada umumnya diberikan kepada karyawan yang bekerja hingga mencapai masa waktu tertentu berdasarkan Peraturan Perusahaan. Estimasi biaya imbalan ini diakui sepanjang masa kerja karyawan dengan menggunakan metode akuntansi yang pada dasarnya sama dengan metode yang digunakan dalam perhitungan imbalan pasca-kerja lainnya.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2012 AND 2011**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)****h. Employee benefits obligation (continued)****Pension benefits (continued)**

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions when exceeding 10% of defined benefit or 10% of fair value of the programme's asset are charged or credited to income over the average remaining service lives of the relevant employees.

Past-service costs are recognised immediately in the statements of income, unless the changes to the pension plan are conditional on the employees' vesting period. In this case, the past-service costs are amortised on a straight-line basis over the vesting period.

Current service costs are expensed in the prevailing period.

The Company has defined contribution plans, a pension plan under which the Company pays fixed contributions into a separate entity. For defined contribution plans, the Company pays contributions to pension plans on a mandatory, contractual or voluntary basis. However, since Labour Law No. 13 of 2003 requires an entity to pay to a worker entering into pension age a certain amount based on, the worker's length of service, the Group is exposed to the possibility of having to make further payments to reach that certain amount in particular when the cumulative contributions are less than that amount. Consequently for financial reporting purposes, defined contribution plans are effectively treated as if they were defined benefit plans.

Other long-term benefits

The Company provides long service leave. The entitlement to this benefit is usually based on the completion of a certain service period by the employee in accordance with the Company's regulations. The estimated costs of these benefits are recognised over the period of employment, using an accounting method similar to that for other post-employment benefits.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2012 AND 2011**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)****i. Utang usaha dan lain-lain**

Utang usaha dan lain-lain merupakan liabilitas keuangan. Utang usaha dan lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

i. Account and other payables

Account and other payables are financial liabilities. Account and other payable is recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

j. Penyisihan

Provisi diakui saat Perusahaan memiliki kewajiban (hukum atau konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu; terdapat kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya, dan jumlah liabilitas tersebut dapat diukur secara andal. Provisi tidak diakui untuk kerugian operasi masa depan.

j. Provisions

Provisions are recognised when the Company has a present obligation (legal or constructive) as a result of past events, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefit will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. Provisions are not recognised for future operating losses.

k. Pendapatan dan beban

Pendapatan dari penjaminan terdiri dari pendapatan premi, dan pendapatan provisi dan komisi.

Pendapatan premi terdiri dari *guarantee fee* dan *processing fee*. Pendapatan dari *guarantee fee* diakui berdasarkan jangka waktu dari periode penjaminan tergantung dari pengaturan dalam kontrak. Pendapatan dari *processing fee* diakui pada saat pendapatan diperoleh.

k. Revenue and expenses

Revenue from guarantee consists of premium income, and fees and commissions.

Premium income consists of guarantee fee and processing fee. Revenue from guarantee fee is recognised based on the duration of guarantee period depending on the arrangement in the contract. Revenue from processing fee is recognised when earned.

(i) *Guarantee fee* dibebankan karena jaminan yang diberikan kepada penerima manfaat berdasarkan jaminan *exposure* oleh perusahaan.

(i) *Guarantee fee* is charged due to the guarantee provided to the beneficiaries on the basis of guarantee exposure of the company.

(ii) *Processing fee* dibebankan karena adanya aktivitas pemrosesan yang dilakukan jika klaim disampaikan kepada pihak penjamin.

(ii) *Processing fee* is charged due to process activity if the claim is delivered to the guarantor.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/15 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Pendapatan dan beban (lanjutan)

Pendapatan provisi dan komisi terdiri dari *arranging fee*, *ceded commission*, dan pendapatan provisi dan komisi lainnya. *Arranging fee* terdiri dari bagian yang dapat dikembalikan dan bagian yang tidak dapat dikembalikan. Pendapatan dari bagian yang tidak dapat dikembalikan dari *arranging fee* diakui pada saat kontrak penjaminan ditandatangani, sementara pendapatan dari bagian yang dapat dikembalikan dari *arranging fee* diakui pada saat proyek dimulai (*financial close*), terlepas dari kelangsungan penjaminan proyek itu sendiri di masa yang akan datang. *Ceded commission* adalah pendapatan dari peningkatan struktur penjaminan yang dilakukan dengan pihak penjamin lain. Pendapatan dari *ceded commission* dan fees dan pendapatan komisi lainnya diakui pada saat diperoleh.

Pendapatan dari pendapatan bunga dan investasi pendapatan tetap diakui pada saat diperoleh.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan dasar akrual.

l. Transaksi dengan pihak berelasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 (revisi 2010), tentang "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi".

Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan pada laporan keuangan.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2012 AND 2011**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Revenue and expenses (continued)

Fees and commissions consist of arranging fee, ceded commission, and other fees and commissions. Arranging fee consists of a refundable and non-refundable fee portion. Revenue from a non-refundable portion of arranging fee is recognised upon signing of the guarantee contract, while revenue from a refundable portion of arranging fee is recognised upon the commencement of the project (financial close), regardless the continuance of the guarantee projects itself in the future. Ceded commission is revenue from the enhancement of guarantee structure with other guarantee/insurance parties. Revenue from ceded commission and other fees and commissions is recognised when earned.

Revenue from interest income of time deposits and investment in fixed income are recognised when earned.

Expenses are recognised on an accrual basis.

l. Transactions with related parties

The Company has transactions with related parties. The definition of related parties used is in accordance with Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 7 (revised 2010), "Related Party Disclosures".

All significant transactions with related parties are disclosed in the notes to the financial statements.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

a. Faktor risiko keuangan

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Perusahaan adalah risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Manajemen menelaah dan menetapkan kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko. Perusahaan menerapkan kebijakan manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian pasar terhadap kinerja keuangan Perusahaan. Berikut ini ringkasan kebijakan dan pengelolaan manajemen risiko tersebut:

(1) Risiko pasar

(i) Risiko nilai tukar mata uang asing

Perusahaan tidak mempunyai risiko yang signifikan terhadap nilai tukar mata uang asing karena kebanyakan transaksi utama Perusahaan dilakukan menggunakan mata uang fungsional. Pada tanggal 31 Desember 2012, Perusahaan tidak memiliki aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam mata uang asing dalam jumlah yang material. Oleh karena itu perubahan nilai tukar dari mata uang asing terhadap mata uang fungsional pada tanggal pelaporan tidak akan berdampak signifikan terhadap laba rugi setelah pajak perusahaan untuk tahun berjalan.

(ii) Risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana arus kas atau nilai wajar di masa datang atas instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2012 AND 2011**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

a. Financial risk factors

The main risks arising from the Company's financial instruments are market risk (including foreign exchange risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. Management reviews and agrees policies for managing each of these risks. The Company applies the financial risk management policies to minimise the impact of the unpredictability of financial markets on the Company's financial performance. The summary of the financial risk management policies are as follows:

(1) Market risk

(i) Foreign currency exchange rate risk

The Company has no significant foreign exchange risks since most of the Company's transactions are performed using the Company's functional currency. As at 31 December 2012, the Company has not material financial assets and financial liabilities denominated in foreign currencies. Therefore, changes in foreign exchange against the Company's functional currency will not significantly impact to the Company's current year profit after tax.

(ii) Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/17 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2012 AND 2011**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Faktor risiko keuangan (lanjutan)

(1) Risiko pasar (lanjutan)

(ii) Risiko suku bunga (lanjutan)

Aset perusahaan yang terekspos dengan risiko suku bunga adalah investasi. Investasi perusahaan terutama terdiri dari deposito dan investasi dengan pendapatan tetap. Perubahan kenaikan atau penurunan tingkat suku bunga pasar tidak akan berpengaruh secara signifikan bagi pendapatan bunga perusahaan. Karena sebagian besar deposito perusahaan memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun, sementara investasi perusahaan semua terdiri dari investasi dengan pendapatan tetap (*fixed income*).

Lebih lanjut, perubahan tingkat suku bunga tidak akan berpengaruh terhadap nilai wajar yang dilaporkan dalam laporan laba rugi perusahaan dikarenakan investasi perusahaan dikategorikan sebagai investasi tersedia untuk dijual dan investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo.

(2) Risiko kredit

Perusahaan tidak mempunyai risiko kredit yang signifikan karena dalam tahun berjalan piutang perusahaan dominan berasal dari pendapatan bunga dari penempatan deposito.

Deposito bank jangka pendek diklasifikasikan pada kas dan setara kas dan investasi, ditempatkan dalam bank-bank domestik yang memiliki reputasi yang tinggi dengan rating AAA Rp 786.991.782; AA Rp 2.174.526.103 dan A Rp 1.101.500.000 pada 31 Desember 2012.

Untuk investasi yang ditempatkan pada efek utang dengan pendapatan tetap, Perusahaan membatasi investasinya pada surat berharga utang dengan peringkat paling rendah AA untuk korporasi dan peringkat paling rendah A untuk Badan Usaha Milik Negara.

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

a. Financial risk factors (continued)

(1) Market risk (continued)

(ii) Interest rate risk (continued)

The Company's financial assets which are exposed to interest rate risk are investments. The Company's investments are mostly consist of time deposit and fixed income investment. The changes due to higher or lower interest rate in market will not significantly impact the Company's time deposit which will be matured within one year (short term). Well all the investment represents fixed rate investment.

Moreover, the changes in interest rate will not impact the Company's profit and loss due to the financial assets are classified as available-for-sale investments and held-to-maturity investments

(2) Credit risk

The Company has no significant credit risk because in the current year the Company's receivables predominantly arise from interest income from placement of time deposits.

Short-term bank deposits classified as cash and cash equivalent and investment are placed with highly reputable domestic banks which are rated AAA Rp 786,991,782; AA Rp 2,174,526,103 and A Rp 1,101,500,000 as at 31 December 2012.

For placement of investment in fixed income debt securities, the Company limits its placement on debt securities with minimum rating of AA for corporate and minimum rating of A for state-owned enterprise.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2012 AND 2011**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Faktor risiko keuangan (lanjutan)

(2) Risiko kredit (lanjutan)

Eksposur maksimum risiko kredit atas aset keuangan perusahaan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp 2.142.262.853 untuk investasi, Rp 15.448.222 untuk piutang bunga, dan Rp 2.746.643.432 untuk kas dan setara kas.

Semua aset keuangan perusahaan pada tanggal 31 Desember 2012 belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai sehingga perusahaan tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai.

(3) Risiko likuiditas

Perusahaan tidak mempunyai risiko likuiditas yang signifikan. Risiko likuiditas timbul ketika Perusahaan mengalami kesulitan dalam memperoleh pendanaan. Manajemen pengelolaan risiko likuiditas termasuk di dalamnya menjaga kecukupan kas dan setara kas. Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan memantau arus kas perkiraan dan aktual dan menyesuaikan profil tanggal jatuh tempo dari aset keuangan dan aset liabilitas.

Pada saat tanggal pelaporan keuangan 31 Desember 2012 dan 2011, liabilitas keuangan perusahaan terutama terdiri dari utang usaha yang jumlahnya tidak material terhadap total likuiditas perusahaan. Perusahaan memiliki likuiditas yang tinggi dalam bentuk kas dan setara kas dan investasi.

b. Manajemen risiko modal

Tujuan perusahaan dalam pengelolaan permodalan adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha Perusahaan guna memberikan imbal hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemangku kepentingan lainnya serta menjaga struktur modal yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

a. Financial risk factors (continued)

(2) Credit risk (continued)

The maximum credit risk on the Company's financial assets as at 31 December 2012 are consist of Rp 2,142,262,853 for investment, Rp 15,448,222 for interest receivable, and Rp 2,746,643,432 for cash and cash equivalents.

All the company's financial assets as at 31 December 2012 are neither past due nor impaired. Therefore, the company has provided no allowances for impairment losses.

(3) Liquidity risk

The Company has no significant liquidity risk. Liquidity risk arises in situations where the Company has difficulties in obtaining funding. Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and cash equivalents. The Company manages liquidity risk by continuously monitoring forecast and actual cash flows and matching the maturity profiles of financial assets and liabilities.

As at reporting date, 31 December 2012 and 2011, most of the Company's financial liability is consist of account payable which amount is immaterial to the Company's liquidity. The Company is highly liquid as it has financial instruments in form of cash and cash equivalents and investment.

b. Capital risk management

The Company's objective when managing capital is to safeguard its ability to continue as a going concern in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2012 AND 2011**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**b. Manajemen risiko modal (lanjutan)**

Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Perusahaan dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayar kepada pemegang saham, mengembalikan modal kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau menjual aset untuk mengurangi jumlah utang.

Perusahaan menelaah dan mengelola struktur permodalannya untuk memastikan struktur modal dan imbal hasil yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang dan efisiensi modal dari Perusahaan, keuntungan masa lalu dan proyeksi masa depan, proyeksi arus kas operasional, proyeksi pengeluaran modal dan proyeksi kesempatan investasi strategis. Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Perusahaan dapat menggunakan pendanaan internal untuk mengurangi utang.

c. Estimasi nilai wajar

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset dan kewajiban keuangan yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya dikarenakan jatuh temponya dalam jangka pendek atau dikarenakan instrumen keuangan tersebut dikenakan tingkat suku bunga pasar.

Tabel di bawah ini menganalisis instrumen keuangan yang dicatat pada nilai wajar berdasarkan tingkatan metode penilaian. Perbedaan dijelaskan sebagai berikut:

- Harga dikutip (tidak disesuaikan) dari pasar yang aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- Input selain harga yang dikutip dari pasar yang disertakan pada Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (yaitu sebagai sebuah harga) atau secara tidak langsung (yaitu sebagai turunan dari harga) (Tingkat 2);
- Input untuk aset atau liabilitas yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi (informasi yang tidak dapat diobservasi) (Tingkat 3).

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)**b. Capital risk management (continued)**

In order to maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the amount of dividends paid to shareholders, return capital to shareholders, issue new shares or sell assets to reduce debt.

The Company periodically reviews and manages its capital structure to ensure optimal capital structure and shareholder returns, taking into consideration the future capital requirements and capital efficiency of the Company, prevailing and projected profitability, projected operating cash flows, projected capital expenditures and projected strategic investment opportunities. In order to maintain or adjust the capital structure, the Company may use internal funding to reduce debt.

c. Fair value estimation

Management considers that the carrying amounts of financial assets and financial liabilities recorded at amortised cost in the financial statements approximate their fair values either because of their short-term maturities or their carry market rates of interest.

The table below analyses financial instruments carried at fair value, by level of valuation method. The different levels of valuation methods have been defined as follows:

- *Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (Level 1);*
- *Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (that is, as prices) or indirectly (that is, derived from prices) (Level 2);*
- *Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (that is, unobservable inputs) (Level 3).*

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2012 AND 2011**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)****c. Estimasi nilai wajar (lanjutan)****c. Fair value estimation (continued)**

Tabel berikut menyajikan aset dan liabilitas Perusahaan yang diukur sebesar nilai wajar pada 31 Desember 2012 dan 2011.

The following table presents the Company's asset and liabilities that are measured at fair value at 31 December 2012 and 2011.

2012				
Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Jumlah/ Total	
Aset keuangan tersedia untuk dijual				Available-for-sale financial assets
- Investasi pada instrumen utang	- 257,219,302	-	257,219,302	Debt Investments -
Reksadana	- 104,686,245	-	104,686,245	Mutual funds
Jumlah Aset	- 361,905,547	-	361,905,547	Total Assets
2011				
Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Jumlah/ Total	
Aset keuangan tersedia untuk dijual				Available-for-sale financial assets
- Investasi pada instrumen utang	- 102,911,379	-	102,911,379	Debt Investments -
Reksadana	-	-	-	Mutual funds
Jumlah Aset	- 102,911,379	-	102,911,379	Total Assets

4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING**4. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS**

Estimasi dan pertimbangan terus dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lain, termasuk ekspektasi peristiwa masa depan yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada. Hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Estimasi dan asumsi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas diungkapkan di bawah ini.

Estimates and judgments are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances. Actual results may differ from these estimates. The estimates and assumptions that have a significant effect on the carrying amounts of assets and liabilities are disclosed below.

Liabilitas imbalan kerja**Employee benefits obligation**

Nilai kini liabilitas imbalan kerja tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan dengan menggunakan sejumlah asumsi aktuarial. Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya bersih untuk pensiun termasuk tingkat pengembalian jangka panjang yang diharapkan atas aset program dan tingkat diskonto yang relevan. Setiap perubahan dalam asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat liabilitas imbalan kerja.

The present value of the employee benefits obligation depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost for pensions include the expected long-term rate of return on the relevant plan assets and the discount rate. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of employee benefits obligation.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/21 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2012 AND 2011**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

**4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN
AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

Liabilitas imbalan kerja (lanjutan)

Asumsi tingkat pengembalian yang diharapkan atas aset program ditentukan secara seragam, dengan mempertimbangkan pengembalian historis jangka panjang, alokasi aset dan perkiraan masa depan atas pengembalian investasi jangka panjang.

Asumsi penting lainnya untuk liabilitas imbalan kerja sebagian didasarkan pada kondisi pasar saat ini.

Beban tangguhan

Perusahaan secara berkesinambungan mengevaluasi keseluruhan bukti obyektif bahwa beban tangguhan masih dapat direalisasikan sebagai pendapatan penjaminan pada setiap akhir periode pelaporan. Perusahaan menggunakan pertimbangan dalam menentukan apakah proyek-proyek yang sedang berlangsung dapat mencapai penandatanganan perjanjian, yang terutama berdasarkan kondisi terkini yang ada pada akhir tiap periode pelaporan.

4. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS (continued)

Employee benefits obligation (continued)

The expected return on plan assets assumption is determined on a uniform basis, taking into consideration long-term historical returns, asset allocation and future estimates of long-term investment returns.

Other key assumptions for employee benefits obligation are based in part on current market conditions.

Deferred charges

The Company continually evaluates objective evidences of deferred charges that could be recognised as revenues as at the end of each reporting period. The Company uses its judgement to assess whether the project will achieve financial close, that are mainly based on latest conditions existing at the end of each reporting period.

5. KAS DAN SETARA KAS

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	
Kas	125,547	81,955	Cash on hand
Bank	4,742,885	8,675,870	Cash in banks
Deposito	<u>2,741,775,000</u>	<u>2,623,630,484</u>	Time deposit
	<u>2,746,643,432</u>	<u>2,632,388,309</u>	

Deposito yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang saat perolehan menghasilkan pendapatan dengan tingkat suku bunga berkisar antara 5,75% - 8,50% per tahun di 2012 (2011: 8,50% - 9,25%).

Informasi terkait pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 20.

Time deposits with remaining maturities of three months or less earned interest rates ranging between 5.75% - 8.50% per annum in 2012 (2011: 8.50% - 9.25%).

Information in respect of related party is disclosed in Note 20.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/22 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2012 AND 2011**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

6. INVESTASI

6. INVESTMENTS

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	
Deposito	1,316,500,000	760,082,346	<i>Time deposits</i>
Investasi dengan pendapatan tetap			<i>Fixed Income</i>
- Investasi tersedia untuk dijual	257,219,302	102,911,379	<i>Available-for-sale investments -</i>
- Investasi dimiliki hingga jatuh tempo	463,857,306	215,126,103	<i>Held-to-maturity investments -</i>
Reksadana	<u>104,686,245</u>	<u>-</u>	<i>Mutual funds</i>
	<u>2,142,262,853</u>	<u>1,078,119,828</u>	

Informasi terkait pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 20.

Information in respect of related party is disclosed in Note 20.

a) Deposito

a) Time deposits

Deposito dengan periode jatuh tempo lebih dari 3 bulan sampai dengan 6 bulan dan menghasilkan pendapatan dengan tingkat suku bunga berkisar antara 7,00% - 9,00% per tahun di 2012 (2011: 9,00% - 10,00%).

Time deposits with remaining maturities more than 3 months and up to 6 months period and earned interest rates ranging between 7.00% - 9.00% per annum in 2012 (2011: 9.00% - 10.00%).

b) Investasi dengan pendapatan tetap

b) Fixed income

- Investasi tersedia untuk dijual

- Available-for-sale investments

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	
Obligasi Badan Usaha			
Milik Negara	118,842,402	60,580,950	<i>State-owned enterprise bonds</i>
Obligasi korporasi	75,000,000	3,412,665	<i>Corporate bonds</i>
Obligasi bank dan subordinasi	<u>63,376,900</u>	<u>38,917,764</u>	<i>Bank and subordinated bonds</i>
	<u>257,219,302</u>	<u>102,911,379</u>	

- Investasi dimiliki hingga jatuh tempo

- Held-to-maturity investments

Investasi pada obligasi dengan periode jatuh tempo 3 – 20 tahun dan menghasilkan pendapatan dengan tingkat suku bunga berkisar antara 9,60% - 9,70% per tahun.

Investment in bonds with 3 - 20 years maturities and earned interest rates ranging between 9.60% - 9.70% per annum.

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	
Obligasi pemerintah	40,966,573	41,036,500	<i>Government bonds</i>
Obligasi Badan Usaha			
Milik Negara (BUMN)	168,350,869	75,518,000	<i>State-owned enterprise bonds</i>
Obligasi korporasi	-		<i>Corporate bonds</i>
Obligasi bank dan subordinasi	<u>254,539,864</u>	<u>98,571,603</u>	<i>Bank and subordinated bonds</i>
	<u>463,857,306</u>	<u>215,126,103</u>	

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/23 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2012 AND 2011**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

6. INVESTASI (lanjutan)

Manajemen berkeyakinan bahwa semua investasi dapat dipulihkan, dan tidak ada cadangan kerugian yang diperlukan atas penurunan nilai investasi pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011.

6. INVESTMENTS (continued)

Management believes that all investment are recoverable, and no provision for impairment of investment is necessary as at 31 December 2012 and 2011.

7. PIUTANG USAHA

Piutang usaha terutama terdiri dari piutang atas pendapatan bunga deposito dan obligasi yang belum diterima.

7. ACCOUNT RECEIVABLES

Account receivables mainly represent interest receivables from time deposits and bonds.

8. ASET TETAP

8. FIXED ASSETS

2012						
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pelepasan/ <i>Disposals</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassifications</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
Aset kepemilikan langsung:						Direct ownership assets:
Harga perolehan:						Acquisition cost:
Prasarana kantor	3,521,571	1,793,469	-	-	5,315,040	Leasehold improvement
Peralatan komputer	243,053	266,254	-	745,555	1,254,862	Computer equipments
Peralatan kantor, perabotan dan perlengkapan	1,245,842	98,542	-	(988,608)	355,776	Office equipments, furnitures and fixtures
	5,010,466	2,158,265	-	(243,053)	6,925,678	
Akumulasi Penyusutan:						Accumulated depreciation:
Prasarana kantor	(1,107,523)	(1,646,372)	-	-	(2,753,895)	Leasehold improvement
Peralatan komputer	(12,630)	(358,440)	-	(433,505)	(804,575)	Computer equipments
Peralatan kantor, perabotan dan perlengkapan	(545,439)	(103,400)	-	446,136	(202,703)	Office equipments, furnitures and fixtures
	(1,665,592)	(2,108,212)	-	12,631	(3,761,173)	
Nilai buku	3,344,874				3,164,505	Net book value

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/24 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2012 AND 2011**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

8. ASET TETAP (lanjutan)

8. FIXED ASSETS (continued)

	2011					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pelepasan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance	
Aset kepemilikan langsung:						Direct ownership assets:
Harga perolehan:						Acquisition cost:
Prasarana kantor	1,370,668	2,150,903	-	-	3,521,571	Leasehold improvement
Peralatan komputer	14,108	228,945	-	-	243,053	Computer equipments
Peralatan kantor, perabotan dan perlengkapan	<u>1,026,638</u>	<u>219,204</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,245,842</u>	Office equipments, furnitures and fixtures
	<u>2,411,414</u>	<u>2,599,052</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5,010,466</u>	
Akumulasi Penyusutan:						Accumulated depreciation:
Prasarana kantor	(190,371)	(917,152)	-	-	(1,107,523)	Leasehold improvement
Peralatan komputer	(588)	(12,042)	-	-	(12,630)	Computer equipments
Peralatan kantor, perabotan dan perlengkapan	<u>(193,863)</u>	<u>(351,576)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(545,439)</u>	Office equipments, furnitures and fixtures
	<u>(384,822)</u>	<u>(1,280,770)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(1,665,592)</u>	
Nilai buku	<u><u>2,026,592</u></u>				<u><u>3,344,874</u></u>	Net book value

9. ASET TAK BERWUJUD

9. INTANGIBLE ASSETS

	2012					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pelepasan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan:						Acquisition cost:
Piranti lunak	-	25,013	-	243,053	268,066	Software
	-	25,013	-	243,053	268,066	
Akumulasi amortisasi:						Accumulated amortisation:
Piranti lunak	-	(65,974)	-	(12,631)	(78,605)	Software
	-	(65,974)	-	(12,631)	(78,605)	
Nilai buku	<u><u>-</u></u>				<u><u>189,461</u></u>	Net book value

Aset tak berwujud diakui sebesar harga perolehan, dikurangi dengan akumulasi amortisasinya. Amortisasi aset tak berwujud dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis selama 4 tahun.

Intangible assets are stated at cost less accumulated amortisation. Amortisation is computed using the straight-line method over the estimated useful lives of 4 years.

10. BEBAN TANGGUHAN

10. DEFERRED EXPENSES

Beban tangguhan terutama merupakan biaya *advisory* yang terkait langsung dengan kegiatan pemrosesan dan pengaturan penjaminan jangka panjang dan akan dibebankan pada saat pendapatan dari penjaminan tersebut diakui.

Deferred expenses mainly represent advisory costs which directly attributable to the processing and arranging activities in obtaining long-term guarantees and will be expensed upon the recognition of such fees.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/25 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2012 AND 2011**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

10. BEBAN TANGGUHAN (lanjutan)

Manajemen berkeyakinan bahwa proyek-proyek yang sedang berlangsung, yang terkait dengan beban tangguhan, akan dapat mencapai penandatanganan perjanjian penjaminan. Oleh karena itu beban tangguhan terus diakui di laporan posisi keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011.

10. DEFERRED EXPENSES (continued)

Management believes that outstanding projects, related to deferred expenses, could achieve the signing of guarantee of the project. Therefore, the deferred expenses continue to be recognised in the Company's statement of financial position as at 31 December 2012 and 2011.

11. UTANG USAHA

Utang usaha terutama merupakan pembayaran yang belum dilakukan untuk jasa konsultasi terkait dengan provisi penjaminan.

11. ACCOUNT PAYABLES

Account payables mainly represent payables for advisory related to the guarantee provision.

12. PERPAJAKAN

12. TAXATION

a. Pajak dibayar dimuka

a. Prepaid income tax

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	
Pajak penghasilan:			Corporate income tax:
- Badan	<u>505,858</u>	<u>-</u>	The Company -

b. Utang pajak

b. Taxes payable

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	
Pajak penghasilan:			Income tax:
- Pasal 21	1,422,032	1,118,427	Article 21 -
- Pasal 23 dan 4(2)	165,797	526,477	Article 23 and 4(2) -
- Pajak Pertambahan Nilai	<u>142,573</u>	<u>249,306</u>	Value Added Tax -
	<u>1,730,402</u>	<u>1,894,210</u>	

c. Beban/(manfaat) pajak penghasilan

c. Income tax expense/(benefit)

Beban/(manfaat) pajak Perusahaan terdiri dari sebagai berikut:

Tax expenses/(benefit) of the Company consist of the following:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	
Pajak penghasilan final	60,488,635	36,603,304	Final income tax
Pajak kini	-	-	Current tax
Manfaat pajak tangguhan	<u>(12,292,616)</u>	<u>(2,613,588)</u>	Deferred tax benefit
	<u>48,196,019</u>	<u>33,989,716</u>	

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/26 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2012 AND 2011**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

12. TAXATION (continued)

c. Beban/(manfaat) pajak penghasilan (lanjutan)

c. Income tax expense/(benefit) (continued)

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the tax expense and the amounts computed by applying the prevailing tax rates to profit before income tax is as follows:

	2012	2011	
Laba sebelum pajak penghasilan	<u>261,574,088</u>	<u>191,130,805</u>	<i>Profit before income tax</i>
Beban pajak dihitung dengan tarif yang berlaku	65,393,522	47,782,701	<i>Tax calculated at applicable tax rate</i>
Pengaruh atas:			<i>Effects of:</i>
- Pendapatan yang sudah dikenakan pajak final	(78,287,591)	(46,717,572)	<i>Revenues subjected to - final income tax</i>
- Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan	601,453	141,827	<i>Non-deductible expenses -</i>
- Pengakuan rugi pajak tahun lalu	<u>-</u>	<u>(3,820,544)</u>	<i>Recognition of prior year tax loss -</i>
	(12,292,616)	(2,613,588)	
Pajak penghasilan final	<u>60,488,635</u>	<u>36,603,304</u>	<i>Final income tax</i>
Beban pajak penghasilan	<u>48,196,019</u>	<u>33,989,716</u>	<i>Income tax expenses</i>

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan dan laba yang dikenakan pajak adalah sebagai berikut:

A reconciliation between profit before income tax and the Company's taxable income is as follow:

	2012	2011	
Laba sebelum pajak penghasilan	261,574,088	191,130,805	<i>Profit before income tax</i>
Beda waktu	4,921,834	4,162,258	<i>Timing differences</i>
Beda tetap	2,405,850	567,267	<i>Permanent differences</i>
Pendapatan yang sudah dikenakan pajak final	<u>(313,150,364)</u>	<u>(186,870,288)</u>	<i>Revenues subjected to - final income tax</i>
Laba/(Rugi) kena pajak	(44,248,592)	8,990,042	<i>Taxable income/(Tax loss)</i>
Rugi pajak yang bisa dikompensasi	<u>(6,292,131)</u>	<u>(15,282,173)</u>	<i>Tax loss carry forward</i>
Kerugian pajak	<u>(50,540,723)</u>	<u>(6,292,131)</u>	<i>Tax loss</i>

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/27 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2012 AND 2011**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

12. TAXATION (continued)

d. Aset pajak tangguhan

d. Deferred tax asset

		2012			
			Dikreditkan ke laporan laba rugi/ <i>Credited to statements of income</i>		
	1 Januari/ January 2012	Dikreditkan ke ekuitas/ Credited to equity		31 Desember/ December 2012	
Rugi pajak yang bisa dikompensasi	1,573,033	-	11,062,148	12,635,181	<i>Tax loss carry forward</i>
Penyisihan bonus	914,453	-	749,611	1,664,064	<i>Provision for bonus</i>
Beban penyisihan imbalan pasca kerja	166,307	-	238,136	404,443	<i>Provision for employee benefits obligation</i>
Perbedaan antara buku dan pajak dari nilai buku bersih aset tetap	45,989	-	242,721	288,710	<i>Differences between accounting and tax fixed assets net book value</i>
Perubahan bersih aset keuangan tersedia untuk dijual	-	(639,032)	-	(639,032)	<i>Change in fair value of available-for-sale financial asset</i>
	<u>2,699,782</u>	<u>(639,032)</u>	<u>12,292,616</u>	<u>14,353,366</u>	
		2011			
			Dikreditkan ke laporan laba rugi/ <i>Credited to statements of income</i>		
	1 Januari/ January 2012	Dikreditkan ke ekuitas/ Credited to equity		31 Desember/ December 2012	
Rugi pajak yang bisa dikompensasi	-	-	1,573,033	1,573,033	<i>Tax loss carry forward</i>
Penyisihan bonus	-	-	914,453	914,453	<i>Provision for bonus</i>
Beban penyisihan imbalan pasca kerja	56,760	-	109,547	166,307	<i>Provision for employee benefits obligation</i>
Perbedaan antara buku dan pajak dari nilai buku bersih aset tetap	29,434	-	16,555	45,989	<i>Differences between accounting and tax fixed assets net book value</i>
Perubahan bersih aset keuangan tersedia untuk dijual dan reksa dana	-	-	-	-	<i>Change in fair value of available-for-sale financial asset and mutual funds</i>
	<u>86,194</u>	<u>-</u>	<u>2,613,588</u>	<u>2,699,782</u>	

Pada tanggal 31 Desember 2012, Perusahaan mempunyai akumulasi kerugian pajak yang tidak digunakan senilai Rp 50,1 miliar (2011: Rp 6,3 miliar) (nilai penuh) dan diakui sebagai aset pajak tangguhan. Berdasarkan rencana bisnis yang telah disetujui, Perusahaan mempertimbangkan kemungkinan besar bahwa rugi pajak dan perbedaan temporer dapat dikompensasi dengan penghasilan kena pajak di masa yang akan datang.

As at 31 December 2012, the Company has unused accumulated tax losses from 2010 fiscal year amounting to Rp 50.1 billion (2011: Rp 6.3 billion) (full amount) and recognised as deferred tax assets. On the basis of the approved business plans, the Company considers it probable that the tax loss carry forward and temporary differences can be offset against future taxable profits.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/28 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2012 AND 2011**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

12. TAXATION (continued)

e. Administrasi pajak di Indonesia

e. Tax administration in Indonesia

Menurut Undang-undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perusahaan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang secara individu. Sebelum 2008, Direktur Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah jumlah pajak terutang dalam waktu sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak, atau sampai akhir tahun 2013, mana yang lebih dahulu.

Under the taxation laws of Indonesia, the Company submits tax returns on the basis of self-assessment. Prior to 2008, the Director General of Tax ("DGT") could assess or amend taxes within ten years of the tax becoming due, or until the end of 2013, whichever is earlier.

Undang-undang juga mengatur untuk tahun pajak 2008 dan seterusnya, DJP dapat menetapkan atau mengubah jumlah pajak terutang dalam waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

There are new rules applicable to fiscal year 2008 and subsequent years stipulating that the DGT may assess or amend taxes within five years of the time the tax becomes due.

13. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR, PENYISIHAN DAN UTANG LAIN-LAIN

13. ACCRUED EXPENSES, PROVISIONS AND OTHER PAYABLES

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	
Bonus dan gaji	6,656,255	3,935,536	<i>Bonus and salary</i>
Beban <i>advisory</i>	13,294,025	3,529,233	<i>Advisory fees</i>
Program kemitraan dan bina lingkungan	1,130,592	458,765	<i>Corporate social responsibility programme</i>
Lainnya	<u>382,461</u>	<u>667,829</u>	<i>Others</i>
	<u>21,463,333</u>	<u>8,591,363</u>	

14. PENDAPATAN TANGGUHAN

14. UNEARNED INCOME

Pendapatan tangguhan merupakan bagian dari *arranging fee* yang dapat dikembalikan dan akan diakui pada saat proyek dimulai (*financial close*).

Unearned income represents a portion from a refundable arranging fee and will be recognised upon the commencement of the project (financial close).

15. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

15. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION

Liabilitas imbalan pasca kerja diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Employee benefits obligations recognised in the statements of financial position are as follows:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	
Nilai saat ini dari liabilitas imbalan pasca kerja	2,403,080	904,321	<i>Present value of defined obligation</i>
Kerugian aktuarial yang belum diakui	<u>(785,309)</u>	<u>(239,055)</u>	<i>Unrecognised actuarial loss</i>
	<u>1,617,771</u>	<u>665,266</u>	

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/29 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2012 AND 2011**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

15. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA	15. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION
(lanjutan)	(continued)

Beban bersih yang diakui pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

Net expense recognised in profit or loss is as follows:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	
Biaya jasa kini	880,857	417,313	<i>Current service cost</i>
Beban bunga	60,776	20,913	<i>Interest cost</i>
Beban amortisasi kerugian aktuarial yang belum diakui	<u>10,872</u>	<u>-</u>	<i>Amortization of unrecognised actuarial loss</i>
	<u>952,505</u>	<u>438,226</u>	

Liabilitas imbalan pasca kerja per 31 Desember 2012 dan 2011 dihitung oleh PT Towers Watson Purbajaga, aktuaris independen pada laporannya masing-masing tertanggal 26 Februari 2013 dan 29 Februari 2012 menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

The employee benefits obligation as of 31 December 2012 and 2011 is computed by PT Towers Watson Purbajaga, an independent actuary whose reports dated 26 February 2013 and 29 February 2012, respectively, using the "Projected Unit Credit" method used the following assumptions:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	
Tingkat diskonto	6.15%	6.75%	<i>Discount rate</i>
Tingkat kenaikan gaji	8%	8%	<i>Salary increment rate</i>
Tingkat mortalita	TMI '11	TMI '99	<i>Mortality rate</i>
Usia pensiun normal	55	55	<i>Retirement age</i>

Pergerakan pada liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

The movement in the employee benefits obligation is as follows:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	
Saldo awal tahun	665,266	227,040	<i>Balance at the beginning of the year</i>
Provisi pada tahun berjalan	<u>952,505</u>	<u>438,226</u>	<i>Provision in the current year</i>
	<u>1,617,771</u>	<u>665,266</u>	

Penyesuaian pengalaman pada liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

The experience adjustment on employee benefits obligation is as follows:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	
Nilai saat ini dari liabilitas imbalan pasca kerja	2,403,080	904,321	<i>Present value of defined obligation</i>
Nilai wajar aset program	<u>-</u>	<u>-</u>	<i>Fair value of plan assets</i>
	<u>2,403,080</u>	<u>904,321</u>	

Penyesuaian pengalaman pada liabilitas imbalan pasca kerja

Experience adjustment on employee benefits obligation

Penyesuaian pengalaman pada aset program

Experience adjustment on plan assets

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/30 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2012 AND 2011

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

16. MODAL SAHAM

Komposisi pemegang saham Perusahaan pada 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

16. SHARE CAPITAL

The composition of Company shareholders as at 31 December 2012 and 2011 is as follows:

2012			
	Jumlah saham/ Number of shares	Kepemilikan/ Ownership (%)	Nilai/ Value
Pemerintah Republik Indonesia	4,500,000	100	4,500,000,000
			Government of the Republic of Indonesia
2011			
	Jumlah saham/ Number of shares	Kepemilikan/ Ownership (%)	Nilai/ Value
Pemerintah Republik Indonesia	3,500,000	100	3,500,000,000
			Government of the Republic of Indonesia

Pada tanggal 17 Desember 2012, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 68 tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan, telah disetorkan tambahan modal saham sebesar Rp 1 triliun (nilai penuh).

On 17 December 2012, in accordance with Government Regulation No. 68 Year 2012 regarding addition of Share Capital of the Government of Indonesia into share capital of the Company, share capital has increased by amounting to Rp 1 trillion (full amount).

Berdasarkan hasil keputusan pemegang saham yang dituangkan dalam akta notaris Aryanti Artisari, SH, MKn No. 145 tanggal 30 Agustus 2012, Pemerintah selaku pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar Perusahaan menjadi sebesar Rp 9 triliun (nilai penuh).

Based on the Circular Meeting of Stockholders as covered by notarial deed No. 145 of Aryanti Artisari, SH, MKn on 30 August 2012, The Government of Indonesia as the Company's Stockholder approved additional authorised Share Capital into Rp 9 trillion (full amount).

Pada tanggal 30 Desember 2011, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 55 tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan, telah disetorkan tambahan modal saham sebesar Rp 1,5 triliun (nilai penuh).

On 30 December 2011, in accordance with Government Regulation No. 55 Year 2011 regarding addition of Share Capital of the Government of Indonesia into share capital of the Company, share capital has increased by amounting to Rp 1.5 trillion (full amount).

Sebelumnya, modal saham telah disetorkan terdahulu dalam dua tahap, Pertama pada 31 Desember 2009 sebesar Rp 1 triliun (nilai penuh), berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Penjaminan Infrastruktur. Dan yang kedua pada 31 Desember 2010 sebesar Rp 1 triliun (nilai penuh), berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan.

Prior to that, the share capital was paid-in in two stages, the first on 31 December 2009 amounted to Rp 1 trillion (full amount), based on Government Regulation No. 35 Year 2009 regarding Share Capital of the Government of the Republic of Indonesia for establishment of a company (Persero) in the infrastructure sector. The second on 31 December 2010 amounted to Rp 1 trillion (full amount), based on Government Regulation No. 88 Year 2010 regarding addition of Share Capital of the Government of Indonesia into share capital of the Company.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/31 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2012 AND 2011**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

**17. SALDO LABA YANG DITENTUKAN
PENGGUNAANNYA DAN ALOKASI UNTUK
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA
LINGKUNGAN**

Berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, Perusahaan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba setiap tahun buku untuk cadangan apabila saldo laba positif sampai cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.

Pada tanggal 31 Desember 2012, Perusahaan telah mempunyai tambahan saldo laba yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp 7.850.000 sehingga saldo cadangan menjadi sebesar Rp 10.150.000. Cadangan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 20 Juli 2012. Manajemen bermaksud untuk meningkatkan cadangan tersebut di masa datang.

Pada tanggal 31 Desember 2011, Perusahaan telah mempunyai saldo laba yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp 2.300.000. Cadangan tersebut ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 11 Agustus 2011.

Pada tanggal 31 Desember 2012, Perusahaan mengalokasikan laba sebelum pajak tahun 2011 sebesar Rp 1.450.000 untuk program kemitraan dan bina lingkungan. Alokasi tersebut ditetapkan dalam Keputusan Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 20 Juli 2012.

Pada tanggal 31 Desember 2011, Perusahaan mengalokasikan laba sebelum pajak tahun 2010 sebesar Rp 466.000 untuk program kemitraan dan bina lingkungan. Alokasi tersebut ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 11 Agustus 2011.

**17. APPROPRIATED RETAINED EARNING AND
ALLOCATION FOR CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY PROGRAMME**

Based on Limited Liability Company Law No. 40 Year 2007, the Company shall appropriate a certain amount of its profit in each year for general reserve if there are available retained earnings, until the general reserve has reached at least 20% of the issued and paid-up capital.

As of 31 December 2012, the Company has made additional appropriation of retained earnings, amounting to Rp 7,850,000 as the reserve balance became Rp 10,150,000. This general reserve was approved in the Circular Decision Annual General Meeting of Shareholders dated 20 July 2012. Management intends to increase the general reserve in the future. Management intends to increase the general reserve in the future.

As of 31 December 2011, the Company has made appropriation of retained earnings, amounting to Rp 2,300,000. This general reserve was approved in the Annual General Meeting of Shareholders dated 11 August 2011.

As of 31 December 2012, the Company has allocated profit before tax year 2011 amounting to Rp 1,450,000 for corporate social responsibility programme. This allocation was approved in the Circular Decision Annual General Meeting of Shareholders dated 20 July 2012.

As of 31 December 2011, the Company has allocated profit before tax year 2010 amounting to Rp 466,000 for corporate social responsibility programme. This allocation was approved in the Annual General Meeting of Shareholders dated 11 August 2011.

18. PENDAPATAN

18. REVENUES

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	
Pendapatan provisi dan komisi	-	45,227,438	<i>Fees and commission</i>
Deposito	239,551,041	172,032,602	<i>Time deposit</i>
Investasi dengan pendapatan tetap			<i>Fixed income</i>
- Pendapatan bunga	54,929,669	11,089,204	<i>Interest income -</i>
- Laba atas penjualan obligasi	17,759,758	-	<i>Gain on sale of bonds -</i>
	<u>312,240,468</u>	<u>228,349,244</u>	

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/32 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2012 AND 2011**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

19. BEBAN USAHA

19. OPERATING EXPENSES

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	
Penjaminan:			Guarantee:
- Pegawai	12,008,840	9,356,131	Employee cost -
- Perjalanan dinas	1,600,850	891,449	Travelling -
- Rapat dan konferensi	90,517	214,404	Meeting and conference -
- Konsultan	-	2,668,955	Consultancy -
	<u>13,700,207</u>	<u>13,130,939</u>	
Administrasi dan umum:			General and administrative:
- Pegawai	20,508,740	13,719,889	Employee cost -
- Jasa profesional	4,092,908	3,040,832	Professional fees -
- Sewa	3,555,162	2,219,088	Rent -
- Perjalanan dinas	1,437,538	2,747,326	Travelling -
- Perlengkapan kantor	780,214	912,966	Office equipment -
- Pelatihan	736,068	194,318	Training -
- Rapat dan konferensi	542,511	691,272	Meeting and conference -
- Outsourcing	495,798	309,847	Outsourcing -
- Transportasi	180,284	121,060	Transportation -
- Komunikasi	149,191	189,833	Communication -
- Lainnya	144,081	481,427	Others -
	<u>32,622,495</u>	<u>24,627,858</u>	
Pengembangan:			Development:
- Loka-karya	1,587,971	1,290,446	Workshop -
- Iklan dan promosi	641,259	335,333	Advertising and promotion -
- Representasi	406,186	104,175	Representation -
	<u>2,635,416</u>	<u>1,729,954</u>	
Penyusutan	2,108,212	1,280,770	Depreciation
Amortisasi	65,974	-	Amortisation

20. INFORMASI PIHAK BERELASI YANG SIGNIFIKAN	20. SIGNIFICANT RELATED PARTY INFORMATION
---	--

Sifat pihak berelasi

Nature of relationship

- | | |
|---|--|
| <p>a. Pemerintah Republik Indonesia adalah pemegang saham Perusahaan.</p> <p>b. Direksi adalah orang-orang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk perencanaan, pengarahan dan pengendalian aktivitas-aktivitas Perusahaan.</p> <p>c. Bank dan Badan Usaha Milik Negara merupakan entitas sepengendali dimana Perusahaan melakukan penempatan investasi dalam bentuk deposito dan obligasi.</p> | <p>a. The government of the Republic of Indonesia is a shareholder of the Company.</p> <p>b. The directors are persons who have authority and responsibility for planning, directing and controlling the Company's activities.</p> <p>c. Banks and state-owned enterprise are entities under common controls where the Company places its investment in time deposits and bonds.</p> |
|---|--|

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/33 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2012 AND 2011**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

20. INFORMASI PIHAK BERELASI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)	20. SIGNIFICANT RELATED PARTY INFORMATION (continued)
--	--

Sifat pihak berelasi (lanjutan)

Nature of relationship (continued)

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi-transaksi tersebut meliputi antara lain:

In the normal course of business, the Company enters into certain transactions with related parties, including the following:

- a. Perusahaan menempatkan dana dalam bentuk deposito dan obligasi dari pihak-pihak berelasi yang dilakukan dengan syarat dan kondisi yang disepakati. Rincian pendapatan pengelolaan dana kepada pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

- a. The Company invested their funds in time deposit and bonds from related parties which were made according to agreed terms and conditions. The details of investment income from related parties is as follows:*

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	
Saldo yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi			Balances arising from related party transactions
Kas dan setara kas	1,540,827,884	2,249,155,516	Cash and cash equivalents
Investasi	860,199,095	714,147,827	Investment
Piutang Usaha	<u>7,786,266</u>	<u>7,052,460</u>	Account receivables
	<u>2,408,813,245</u>	<u>2,970,355,803</u>	
 Persentase terhadap jumlah aset	 <u>48.50%</u>	 <u>79.45%</u>	 <i>Percentage of total assets</i>
	<u>2012</u>	<u>2011</u>	
Pendapatan			Revenue
- Bank Nagari	35,608,075	-	Bank Nagari -
- Bank Jabar Banten	33,257,524	16,065,589	Bank Jabar Banten -
- Pemerintah Republik Indonesia	26,962,229	2,085,817	Government of Indonesia -
- Bank Syariah Mandiri	18,206,462	32,057,336	Bank Syariah Mandiri -
- PT BPD Sumatera Utara	17,333,678	14,812,483	PT BPD Sumatera Utara -
- Bank Tabungan Negara Syariah	15,851,141	-	Bank Tabungan Negara Syariah -
- PT Aneka Tambang	9,183,173	-	PT Aneka Tambang -
- Bank Rakyat Indonesia	9,053,400	4,206,104	Bank Rakyat Indonesia -
- PT BPD Jawa Timur	7,168,601	-	PT BPD Jawa Timur -
- Bank Tabungan Negara	6,065,426	11,800,597	Bank Tabungan Negara -
- PT Pembangkit Listrik Negara	2,992,180	1,655,708	PT Pembangkit Listrik Negara -
- PT Jasamarga	2,416,955	201,178	PT Jasamarga -
- PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	2,354,520	-	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) -
- Bank Mandiri	1,797,937	624,410	Bank Mandiri -
- PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	1,777,305	1,456,097	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk -
- Bank Bukopin	1,656,039	-	Bank Bukopin -
- PT Adhi Karya (Persero) Tbk	858,657	-	PT Adhi Karya (Persero) Tbk -
- Danareksa	211,891	-	Danareksa -
- PT Indosat	<u>167,795</u>	<u>21,196</u>	PT Indosat -
	<u>192,922,988</u>	<u>84,986,515</u>	
 Persentase terhadap jumlah pendapatan	 <u>61.79%</u>	 <u>37.22%</u>	 <i>Percentage of total revenue</i>

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/34 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2012 AND 2011

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

20. INFORMASI PIHAK BERELASI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Sifat pihak berelasi (lanjutan)

b. Perusahaan memberikan remunerasi dan fasilitas untuk keperluan tugas operasional Dewan Komisaris dan Direksi. Jumlah tersebut adalah sebesar Rp 9.253.586 dan Rp 8.232.851 untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011, dan mencerminkan 18,10% dan 21,85% dari jumlah beban operasi setiap tahunnya.

20. SIGNIFICANT RELATED PARTY INFORMATION (continued)

Nature of relationship (continued)

b. The Company provides remuneration and facilities to support the operational duties of their Board of Commissioners and Directors. The total of such benefits amounted to Rp 9,253,586 and Rp 8,232,851 for the year ended 31 December 2012 and 2011, representing 18.10% and 21.85% of the total expenses for each year.

21. PERJANJIAN PENTING

Perjanjian sewa kantor dengan PT Buana Sakti

Pada tanggal 20 April 2010 Perusahaan mengadakan perjanjian sewa dengan PT Buana Sakti. Periode sewa adalah untuk tiga (3) tahun dimulai dari 12 April 2010 dan berakhir pada 11 April 2013. Perjanjian sewa ini meliputi area yang digunakan untuk ruangan kantor. Berdasarkan perjanjian ini, Perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar sewa, jasa pemeliharaan dan biaya lainnya terkait sewa ke PT Buana Sakti. Pembayaran untuk seluruh jumlah sewa dan jasa pemeliharaan dilakukan di muka. Sebagai tambahan, Perusahaan juga membayar dimuka atas deposit sekuriti dan saluran telepon yang ditahan oleh PT Buana Sakti tanpa kewajiban untuk membayar bunga kepada perusahaan. Seluruh deposit tersebut akan dikembalikan pada waktu berakhirnya perjanjian sewa ini, jika Perusahaan tidak berniat untuk melanjutkan sewa.

Perjanjian penjaminan dengan Pemerintah Republik Indonesia dan PT Bhimasena Power Indonesia

Pada tanggal 6 Oktober 2011, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah") dan PT Bhimasena Power Indonesia ("Bhimasena") yang menegaskan bahwa Pemerintah dan Perusahaan, sebagai Penjamin, menyetujui untuk menjamin, beberapa hal yang tercantum di dalam perjanjian penjaminan sesuai dengan pasal 1837 dari Indonesian Civil Code, sesuai porsi masing-masing atas kewajiban keuangan tertentu dari PLN, sebagai Manajer proyek dari Central Java Coal Fired Steam Power Plant, kepada Bhimasena, sebagai entitas bisnis yang diberikan hak untuk mengimplementasikan proyek tersebut.

21. SIGNIFICANT AGREEMENTS

Rent office agreement with PT Buana Sakti

On 20 April 2010, the Company entered into a lease agreement with PT Buana Sakti. The lease period is for three (3) years starting from 12 April 2010 and expires on 11 April 2013. This lease agreement covers an area that is used for office space. Based on this agreement, the Company has an obligation to pay rent, service charges and other charges to PT Buana Sakti. Payment for the full amount of rent and service charges was made in advance. In addition, the Company also paid in advance for security and the telephone line deposit, which is held by the PT Buana Sakti without liability to the Company for interest. All deposits will be refunded on the expiration of this lease, if the Company does not intend to continue the lease.

Guarantee agreement between the Government of the Republic of Indonesia and PT Bhimasena Power Indonesia

On 6 October 2011, the Company entered into a guarantee agreement between the Government of the Republic of Indonesia (the "Government") and PT Bhimasena Power Indonesia ("Bhimasena") where the Company and the Government, as the Guarantors, have agreed to guarantee, on a several basis which is stated in the guarantee agreement in accordance with Article 1837 of the Indonesian Civil Code, their respective portions of the financial obligation of PLN, the Cooperation project Manager of the Central Java Coal Fired Steam Power Plant (the "Project"), to Bhimasena as the business entity which has been awarded the right to implement the Project.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/35 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2012 AND 2011**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

21. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian penjaminan dengan Pemerintah Republik Indonesia dan PT Bhimasena Power Indonesia (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima fee tertentu (*arranging fee, front-end fee, processing fee dan guarantee fee*) dari Bhimasena sejak ditandatanganinya perjanjian sampai 20 tahun kedepan masa penjaminan ketika kondisi-kondisi tertentu telah dipenuhi.

Penjaminan infrastruktur yang telah diberikan untuk proyek Central Java Coal Fired Steam Power Plant direncanakan baru akan efektif paling lambat pada tanggal 6 Oktober 2013, yaitu pada saat batas tanggal perolehan pembiayaan proyek. Untuk itu, pada saat ini belum terdapat kewajiban kontinjensi yang muncul atas penjaminan yang diberikan.

21. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee agreement between the Government of the Republic of Indonesia and PT Bhimasena Power Indonesia (continued)

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to received certain fees (*arranging fee, front-end fee, processing fee and guarantee fee*) from Bhimasena at the signing date for the next 20 years of the guarantee period when certain conditions are met.

Infrastructure guarantee given to the project of the Central Java Coal Fired Steam Power Plant is planned to be effective at the latest on 6 October 2013, upon the date of financial close. Therefore, there is no contingent liabilities arising from the guarantee.

22. LIABILITAS KONTINJENSI DAN KOMITMEN

Perusahaan tidak memiliki liabilitas kontinjensi dan komitmen yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011.

22. CONTINGENT LIABILITIES AND CAPITAL COMMITMENTS

The Company has no significant contingent liabilities and capital commitment as at 31 December 2012 and 2011.

23. TRANSAKSI NON-KAS

Informasi tambahan terkait laporan arus kas yang merupakan transaksi non-kas adalah sebagai berikut:

23. NON-CASH TRANSACTIONS

Supplemental cash flow information related to non-cash transactions is as follows:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	
Pencadangan saldo laba	7,850,000	2,300,000	<i>Appropriation retained earnings</i>
Perubahan nilai pasar atas aset keuangan tersedia untuk dijual	2,039,749	516,379	<i>Changes in fair value of financial assets available for sale</i>
Program kemitraan dan bina lingkungan	(671,827)	(458,765)	<i>Corporate social responsibility</i>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2012 AND 2011**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

24. STANDAR AKUNTANSI BARU

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menetapkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 21 tentang Perjanjian Konstruksi Real Estat serta Pencabutan PSAK (PPSAK) 51 tentang Akuntansi Kuasi Reorganisasi, dimana keduanya akan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2013.

Pada saat ini, tidak terdapat dampak signifikan atas penerapan ISAK dan PPSAK tersebut kepada Perusahaan.

**24. PROSPECTIVE ACCOUNTING
PRONOUNCEMENT**

Financial Accounting Standard Board of Indonesia Institute of Accountants (DSAK-IAI) has set Interpretation of Statement of Financial Accounting Standards (ISFAS) 21 about Real Estate Construction Agreement and the Revocation of SFAS 51 about Accounting Quasi-Reorganisation, whereas both will be effective as at 1 January 2013.

At this time, there is no significant impact on the application of those Interpretation of SFAS and Revocation of SFAS to the Company.

This page is intentionally left blank
Halaman ini sengaja dikosongkan

**PROGRAM KEMITRAAN DAN
BINA LINGKUNGAN/*PARTNERSHIP*
AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM –
PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA
(Persero)**

**LAPORAN KEUANGAN/
*FINANCIAL STATEMENTS***

**31 DESEMBER 2012 DAN 2011/
*31 DECEMBER 2012 AND 2011***



**PERNYATAAN KETUA PELAKSANA
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA
LINGKUNGAN
PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR
INDONESIA (PERSERO)**

**HEAD OF OPERATION'S STATEMENT
OF PARTNERSHIP AND COMMUNITY
DEVELOPMENT PROGRAM
PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR
INDONESIA (PERSERO)**

Sesuai dengan keputusan Pengurus Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) ("Organisasi"), kami menyatakan bahwa:

In accordance with resolution of the Committee of the Partnership and Community Development Program of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (the "Organisation"), in the opinion of the Committee:

- (a) laporan keuangan Organisasi menyajikan secara wajar posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, laporan aktivitas, dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut; dan
- (b) laporan keuangan Organisasi disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

- (a) *the financial statements of the Organisation are drawn up so as to present fairly the financial position as at 31 December 2012 and 2011, and the statements of activity, and its cash flows for the years then ended; and*
- (b) *the financial statements of the Organisation have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards for Non-Publicly-Accountable Entities.*

Atas nama dan mewakili Pengurus/*For and on behalf of the Committee*

Jakarta
26 April/April 2013

Pratomo Ismujatmika
Ketua Pelaksana/*Head of Operation*

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PENGURUS**

**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
TO THE COMMITTEE OF**

**PROGRAM KEMITRAAN BINA LINGKUNGAN/
PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM –
PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (Persero)**

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) ("Organisasi") pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, serta laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011. Laporan keuangan adalah tanggung jawab pengurus Organisasi. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh pengurus Organisasi, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Organisasi pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, dan aktivitas serta arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

We have audited the accompanying statements of financial position of Partnership and Community Development Program - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (the "Organisation") as at 31 December 2012 and 2011, and the related statements of activity and cash flows for the years ended 31 December 2012 and 2011. These financial statements are the responsibility of the Organisation's committee. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audits.

We conducted our audits in accordance with auditing standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statement is free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statement. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by Organisation's committee, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion.

In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of the Organisation as at 31 December 2012 and 2011, and the results of its activity and its cash flows for the years ended 31 December 2012 and 2011, in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards for Non-Publicly-Accountable Entities.

JAKARTA
26 April/April 2013



Drs. Haryanto Sahari, CPA

Surat Ijin Akuntan Publik/License of Public Accountant No. AP.0223

NOTICE TO READERS

The accompanying financial statements are not intended to present the financial position, results of activity and cash flows in accordance with accounting principles and practices for non-publicly-accountable entities in countries and jurisdictions other than Indonesia. The standards, procedures and practices utilized to audit such financial statements may differ from those generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. Accordingly, the accompanying financial statements and the auditors' report thereon are not intended for use by those who are not informed about Indonesian Accounting Standard for Non-Publicly-Accountable Entities and auditing standards and their application in practice.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan
Plaza 89, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-7 No.6 Jakarta 12940 - INDONESIA, P.O. Box 2473 JKP 10001
T: +62 21 5212901, F: + 62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN/
PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

Lampiran – 1 - Schedule

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2012 AND 2011**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2012</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2011</u>	
ASET				ASSETS
Aset Lancar				Current Assets
Piutang dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pembina	<u>1,130,591,693</u>	3	<u>458,765,200</u>	Stated Owned Enterprise (SOE) administrator
JUMLAH ASET	<u><u>1,130,591,693</u></u>		<u><u>458,765,200</u></u>	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN ASET NETO				LIABILITY AND NET ASSETS
LIABILITAS LANCAR				CURRENT LIABILITY
Beban yang masih harus dibayar	<u>20,737,841</u>	4	<u>78,973,170</u>	Accrued expenses
JUMLAH LIABILITAS	<u><u>20,737,841</u></u>		<u><u>78,973,170</u></u>	TOTAL LIABILITY
ASET NETO				NET ASSETS
Aset neto tidak terikat	<u>1,109,853,852</u>		<u>379,792,030</u>	Unrestricted net assets
JUMLAH ASET NETO	<u><u>1,109,853,852</u></u>		<u><u>379,792,030</u></u>	TOTAL NET ASSETS
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO	<u><u>1,130,591,693</u></u>		<u><u>458,765,200</u></u>	TOTAL LIABILITY AND NET ASSETS

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statement.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN/
PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

Lampiran – 2 - Schedule

**LAPORAN AKTIVITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF ACTIVITY
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2012 AND 2011**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2012</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2011</u>	
PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT				CHANGES IN UNRESTRICTED NET ASSETS
Pendapatan				Income
Alokasi bagian laba dari BUMN pembina	<u>1,450,000,000</u>	5	<u>466,000,000</u>	<i>Profit allocation from SOE administrator</i>
Beban				Expenses
Penyaluran bina lingkungan	(639,756,400)	6	(78,973,170)	<i>Community development program</i>
Beban umum dan administrasi	<u>(80,181,778)</u>		<u>(7,234,800)</u>	<i>General and administrative expenses</i>
KENAIKAN ASET NETO TIDAK TERIKAT	730,061,822		379,792,030	INCREASE IN UNRESTRICTED NET ASSETS
ASET NETO PADA AWAL TAHUN	<u>379,792,030</u>		<u>-</u>	NET ASSETS BEGINNING OF THE YEAR
ASET NETO PADA AKHIR TAHUN	<u>1,109,853,852</u>		<u>379,792,030</u>	NET ASSETS ENDING OF THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

*The accompanying notes form an integral part
of these financial statement.*

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN/
PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

Lampiran – 3 - Schedule

**LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2012 AND 2011**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	
AKTIVITAS OPERASI			OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dana BUMN pembina	778,173,498	7,234,800	<i>Funding from SOE administrator</i>
Penyaluran Bina Lingkungan	(697,991,720)	-	<i>Community development program</i>
Beban umum dan administrasi	<u>(80,181,778)</u>	<u>(7,234,800)</u>	<i>General and administrative expenses</i>
Kas neto yang diterima dari aktivitas operasi	<u>-</u>	<u>-</u>	<i>Net cash flows provided from operating activities</i>
KENAIKAN NETO DALAM KAS DAN SETARA KAS	<u>-</u>	<u>-</u>	<i>NET INCREASE OF CASH AND CASH EQUIVALENT</i>
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	<u>-</u>	<u>-</u>	<i>CASH AND CASH EQUIVALENT BEGINNING OF THE YEAR</i>
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>	<i>CASH AND CASH EQUIVALENT ENDING OF THE YEAR</i>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statement.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN/
PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

Lampiran 4/1 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris Lolani Kurniati Irdham-Idroes, SH, LLM No. 29 tanggal 30 Desember 2009. Anggaran Dasar Perusahaan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.AHU-04444.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 27 Januari 2010.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, Perusahaan bergerak dalam hal memberikan penjaminan pada proyek-proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta ("KPS") di bidang infrastruktur.

Perusahaan adalah Badan Usaha Penjamin Infrastruktur (BUPI) yang beroperasi sebagai suatu entitas "single window" dalam melakukan proses, penilaian (*appraisal*) dan penyusunan struktur (*structuring*) untuk semua penjaminan yang diberikan pemerintah pada proyek infrastruktur yang diajukan oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK). Perusahaan dapat menerapkan berbagai jenis dan struktur penjaminan – yang disokong (*backstop*) oleh, bila diperlukan, neraca Perusahaan, Pemerintah Republik Indonesia, lembaga keuangan multilateral, atau kombinasinya – untuk mewujudkan fleksibilitas operasional yang lebih baik dalam penyediaan penjaminan infrastruktur.

Pembentukan organisasi khusus pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) ("Organisasi") untuk mengelola Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) didirikan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No : SK-077/DIR/CRS/09/2011 pada tanggal 10 September 2011 dan merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, pada Bab II pasal 2 ayat (2) berbunyi "Persero harus melaksanakan PKBL dengan berpedoman pada keputusan yang di tetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)".

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2012 AND 2011**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (the "Company") was established based on Notarial Deed of Lolani Kurniati Irdham-Idroes, SH, LLM No. 29 dated 30 December 2009. The Articles of Association were approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his decree No.AHU-04444.AH.01.01.Tahun 2010, dated 27 January 2010.

In accordance with Article 3 of the Articles of Association, the Company is engaged to provide the guarantees for the Public Private Partnership ("PPP") projects in the infrastructure sector.

The Company operates as a "single window" entity for the processing, appraisal and structuring of all guarantees provided to infrastructure projects proposed by the Government's Contracting Agencies ("CA"). The Company employs various types and structures of guarantees – back-stopped, as necessary, by the Company balance sheet, the Government of Indonesia ("GOI") balance sheet, a multilateral financing agency or a combination thereof – for greater operational flexibility in providing guarantees for infrastructure projects.

The Partnership and Community Development Program - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) ("the Organisation") was established to manage Corporate Social Responsibility (CSR) Program was established based on Director Decision Letter No : SK-077/DIR/CRS/09/2011 on 10 September 2011 and part of the implementation of Regulation of the Minister of State Owned Enterprises No : PER-05/MBU/2007 dated 27 April 2007, concerning Partnership Programs between State Owned Enterprises (SOE) and Small Entity and Community Development Programs, of which chapter II article 2, paragraph 2 stated "Persero to implement the CSR Program based on decision of the General Meeting of Shareholders (RUPS)".

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN/
PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

Lampiran 4/2 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2012 AND 2011**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

Sumber dana yang digunakan untuk kegiatan PKBL adalah bersumber dari Saldo Dana Kemitraan posisi 31 Desember 2012 dan 2011 dari 1% dari laba bersih PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) tahun 2011 dan 2010.

Tujuan utama dari organisasi ini adalah untuk mengelola Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Organisasi berdomisili di Indonesia, berkedudukan di Sampoerna Strategic Square, North Tower, 14th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta dan mulai beroperasi pada tahun 2011.

Pada 31 Desember 2012 dan 2011, susunan kepengurusan adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

The source of funds used for the CSR Program is the Partnership Fund Balance on 31 Desember 2012 and 2011 which consisted of 1% of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)'s net profit in 2011 and 2010.

The objective of the organisation is to manage the Corporate Social Responsibility Program.

The organisation is domiciled in Indonesia, located at Sampoerna Strategic Square, North Tower, 14th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta, and started its activity in 2011.

As at 31 Desember 2012 and 2011, the organisation structure was as follows:

2012/2011

Ketua Pelaksana	:	Adita Irawati	:	Head of operation
Anggota	:	Widita Swastia Asti	:	Member

Pada tanggal 1 Februari 2013, Adita Irawati selaku ketua pelaksana telah mengundurkan diri dari jabatannya dan digantikan oleh Pratomo Ismujatmika yang mulai bertugas efektif per tanggal 1 April 2013.

On 1 February 2013, Adita Irawati as head of operations has resigned and replaced by Pratomo Ismujatmika effectively on 1 April 2013.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Laporan keuangan diotorisasi untuk terbit oleh Pengurus dan diselesaikan pada tanggal 26 April 2013.

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi penting yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan PKBL sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

These financial statements were authorised to be issued by the Committee on 26 April 2013.

Presented below are the principal accounting policies adopted in preparing the financial statements, which conform with the Indonesian Financial Accounting Standards for Non-Publicly-Accountable Entities.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN/
PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

Lampiran 4/3 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2012 AND 2011**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT
ACCOUNTING POLICIES (continued)**

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

**a. Basis of preparation of the financial
statements**

Laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dan sesuai dengan Surat Edaran nomor SE-02/MBU/Wk/2012, tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

These financial statements have been prepared and presented in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards for Non-Publicly-Accountable Entities and based on Circular Letter number SE-02/MBU/Wk/2012, of Declaration of Accounting Guidance for Corporate Social Responsibility Programs.

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas disajikan berdasarkan konsep biaya historis dan konsep akrual.

These financial statements, except for statement of cash flows, are prepared on historical cost basis and accrual basis.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar kegiatan operasi.

The statement of cash flows is prepared using direct method, by classifying cash flows on the basis of operating activities.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan khusus, disajikan dalam Rupiah.

Figures in the financial statements are expressed in Rupiah, unless otherwise stated.

b. Penjabaran mata uang asing

b. Foreign currency translation

a. Mata uang fungsional dan penyajian

a. Functional and presentation currency

Item yang disertakan dalam laporan keuangan Organisasi diukur menggunakan mata uang yang sesuai dengan lingkungan ekonomi utama dimana Organisasi beroperasi ("mata uang fungsional").

Items included in the financial statements of the Organisation are measured using the currency of the primary economic environment in which the Organisation operates (the "functional currency").

Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah (Rp) yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Organisasi.

The financial statements are presented in "Rupiah" (Rp), which is the functional currency of the Organisation.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN/
PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

Lampiran 4/4 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2012 AND 2011**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

b. Penjabaran mata uang asing (lanjutan)

b. Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs penutup yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan kurs yang berlaku pada tanggal pelaporan. Keuntungan dan kerugian dari selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing, diakui pada laporan aktivitas.

c. Piutang dari BUMN pembina

Piutang pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu. Penyisihan piutang ragu-ragu dibentuk berdasarkan evaluasi manajemen terhadap tingkat ketertagihan saldo piutang. Piutang dihapuskan dalam periode ketika piutang tersebut dipastikan tidak dapat ditagih.

Pemberian pinjaman kepada Mitra Binaan dicatat sebagai piutang sebesar pokok pinjaman yang diberikan dan jasa administrasi pinjaman yang jatuh tempo.

d. Beban yang masih harus dibayar

Beban yang masih harus dibayar adalah biaya – biaya yang masih harus dibayar karena diterimanya jasa / prestasi selama tahun berjalan tetapi belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi yang pembayarannya jatuh tempo pada tahun berikutnya.

Beban yang masih harus dibayar pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT
ACCOUNTING POLICIES (continued)**

b. Foreign currency translation (continued)

b. Transactions and balances

Transactions denominated in foreign currency are converted into Rupiah using the closing exchange rate prevailing at the date of the transactions. At the reporting date, foreign currency monetary assets and liabilities are translated using the closing exchange rate prevailing at that date. Foreign exchange gains and losses arising from transactions in foreign currencies and from the translation of foreign currency monetary assets and liabilities are recognised in the statement of activity.

c. Receivables from SOE Administrator

Receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost, less a provision for doubtful accounts. The provision for doubtful accounts is made by management estimation of the collectibility of receivables. A receivable is written off during the period when it is decided to be uncollectible.

A loan to CSR operation is recorded as receivable with the value of the main loan due.

d. Accrued expenses

Accrued expenses are expenses that need to be settled arising from service received during the year but not yet paid until the end of reporting period, which payment will due in the following year.

Accrued expenses are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN/
PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

Lampiran 4/5 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2012 AND 2011**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Pendapatan dan beban

Pendapatan PKBL dapat berasal dari:

- a. Alokasi bagian laba dari BUMN Pembina.
- b. Penerimaan pelimpahan dana dari PKBL lain.
- c. Penggantian beban operasional
- d. Sumbangan.
- e. Pendapatan jasa administrasi pinjaman
- f. Pendapatan bunga.
- g. Pendapatan lain-lain.

Pendapatan diakui pada saat terpenuhinya kondisi berikut:

- a. Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal.
- b. Kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas.

Beban diakui berdasarkan metode akrual.

f. Aset netto

Aset netto diklasifikasikan menjadi aset netto tidak terikat dan aset netto terikat. Aset netto tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu. Aset netto terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu atau tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasional.

3. PIUTANG DARI BUMN PEMBINA

Akun ini merupakan penerimaan dana PKBL yang masih ditempatkan di BUMN Pembina. Saldo piutang dari BUMN pembina pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar Rp 1.130.591.693 dan Rp 458.765.200.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Income and expenses

CSR income comes from:

- a. Net income allocation from the SOE Administrator.
- b. Transfer fund from another CSR program.
- c. Reimbursement of operational expenses.
- d. Charity.
- e. Revenue from administration of receivables.
- f. Interest income.
- g. Other income.

Revenue is recognised when the following condition are met:

- a. Revenue can be measured reliably.
- b. The economic benefits of a transaction will flow to the entity.

Expenses are recognised on an accrual basis.

f. Net assets

Net assets are classified as unrestricted net assets and restricted net assets. Unrestricted net assets represent resources that have no limitation in use. Restricted net assets represent resources that have limitation use for certain purpose or prohibited to be used for operating purpose.

3. RECEIVABLES FROM SOE ADMINISTRATOR

The balance represents receipt of CSR program funds which are still placed in the hand of SOE Administrator. The receivables from SOE administrator balance as at 31 Desember 2012 and 2011 amounted to Rp 1,130,591,693 and Rp 458,765,200, respectively.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN/
PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

Lampiran 4/6 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2012 AND 2011**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Beban yang masih harus dibayar terutama merupakan pembayaran yang belum dilakukan untuk pengeluaran terkait dengan penyaluran bina lingkungan.

4. ACCOUNT PAYABLES

Accrued expenses mainly represent unpaid disbursements related to the community development program.

5. PENDAPATAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) mengalokasikan laba bersih tahun 2011 sebesar Rp 1.450.000.000 (2010: Rp 466.000.000) untuk PKBL. Pada tahun 2012 dan 2011, alokasi tersebut ditetapkan berturut-turut dalam Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 20 Juli 2012 dan Surat Keputusan Direksi tanggal 10 September 2011.

5. INCOME FROM PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM

For the year ending 31 Desember 2012 and 2011, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) has allocated net profit for the year 2011 amounting to Rp 1,450,000,000 (2010: Rp 466,000,000) for the CSR Program. For year 2012 and 2011, this allocation was approved in Circular Meeting of Stockholders dated 20 July 2012 and the Director Decision Letter on 10 September 2011, respectively.

6. PENYALURAN PROGRAM

Pada tahun 2012, penyaluran bina lingkungan yang dilaksanakan adalah pelatihan guru-guru yang berlokasi di daerah Jawa Tengah dan Lampung dengan jumlah penyaluran masing-masing sebesar Rp 529.029.600 dan Rp 110.726.800. Pada tahun 2011, penyaluran bina lingkungan yang dilaksanakan adalah pelatihan guru-guru yang berlokasi di daerah Jawa Tengah dengan jumlah penyaluran sebesar Rp 78.973.170.

6. PROGRAM EXPENSES

In 2012, community development program held a workshop for teachers located in Central Java and Lampung with total disbursement of Rp 529,029,600 and Rp 110,726,800. In 2011, community development program held a workshop for teachers located in Central Java, with total disbursement of Rp 78,973,170.

7. TINGKAT KINERJA

7. PERFORMANCE

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	
Saldo dana per awal tahun	466,000,000	-	<i>Balance as of beginning year</i>
Penerimaan dana	<u>1,450,000,000</u>	<u>466,000,000</u>	<i>Funds received</i>
Jumlah dana tersedia	<u>1,916,000,000</u>	<u>466,000,000</u>	<i>Available funds</i>
Akumulasi penggunaan dana			<i>Accumulated implementation</i>
- Penyaluran dana bina Lingkungan	<u>718,729,570</u>	<u>78,973,170</u>	<i>Community development - program</i>
Efektivitas penyaluran dana	<u>38%</u>	<u>17%</u>	<i>Fund implementation effectiveness</i>

Data Perusahaan

Corporate Data

Dewan Komisaris

Board of Commissioners



Freddy Rikson Saragih

Komisaris Utama | President Commissioner

Freddy Rikson Saragih adalah Komisaris Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sebelumnya, selama hampir 25 tahun beliau telah mengabdikan diri dan bekerja di bidang pasar modal. Setelah menduduki berbagai jabatan, terakhir beliau menjabat Direktur Riset dan Manajemen Investasi, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK). Beliau merupakan figur yang cukup dikenal di kalangan industri pasar modal Indonesia dan sering diundang untuk menjadi pembicara dalam berbagai konferensi dan seminar bergengsi. Beliau memiliki gelar Master dalam bidang Profesional Accounting (MPAcc) dari Universitas Austin, Texas, Amerika Serikat. Beliau juga telah mengikuti berbagai pendidikan lanjutan dalam bidang Akuntansi dan Pasar Modal di berbagai institusi yang berbasis di Tokyo, Stockholm, Manila dan Washington DC.

Freddy Rikson Saragih is the President Commissioner of the Indonesia Infrastructure Guarantee Fund. He is currently the Head of the Center for Fiscal Risk Management at the Fiscal Policy Office, Ministry of Finance, Republic of Indonesia. He spent most of his professional life in the capital market industry for almost 25 years in various positions. His most recent position was the Director of the Investment Management and Research Bureau of the Indonesia Capital Market & Financial Institution Supervisory Board (BAPEPAM-LK). Mr. Saragih is a well-known figure in capital market in the industry in Indonesia and is a frequent speaker in many high-profile conferences and seminars. He has a Master's Degree in Professional Accounting (MPAcc.) from the University of Austin, Texas, USA. Mr. Saragih has also participated in many advanced professional trainings and courses in accounting and the capital market from various institutions based in Tokyo, Stockholm, Manila and Washington DC.



Ayu Sukorini

Komisaris | Commissioner

Selain menjabat Komisaris pada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), Ayu Sukorini adalah Direktur Pinjaman dan Hibah di Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Beliau telah bertugas selama hampir 20 tahun di Kementerian Keuangan dan ditugaskan di berbagai posisi di area Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Pengelolaan Obligasi serta Pengelolaan Utang terutama pada bidang Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan. Beliau terlibat secara langsung dalam eksekusi penerbitan Obligasi Negara sejak tahun 2003 sampai 2007 baik di pasar domestik dan internasional. Beliau memiliki gelar Master of Arts (MA) dalam bidang ekonomi dari Universitas Colorado, Denver, Amerika Serikat, dan gelar sarjana dalam bidang ekonomi dari Universitas Satya Wacana, Salatiga. Beliau juga telah mengikuti berbagai pendidikan profesional lanjutan yang diselenggarakan beberapa institusi di Singapura, Washington DC, Sydney dan Tokyo dalam area Kebijakan Fiskal, Manajemen Risiko dan Pasar Keuangan. Beliau juga berpartisipasi aktif sebagai penyaji dalam berbagai forum pertemuan pengelola utang di London, Washington, Tokyo dan kawasan regional.

In addition to her role as the Commissioner of the Indonesia Infrastructure Guarantee Fund, Ayu Sukorini is also the Director of Loans and Grants Portfolio of the Debt Management Office, Ministry of Finance, Republic of Indonesia. For almost 20 years, Ms. Sukorini has been assigned to many important duties in the Ministry of Finance, including in the areas of Fiscal Policy, Government Bond Policy Management and Debt Management, mainly for policy planning and development. She was also actively involved in the execution of the government's bond issuance in the domestic and international markets from 2003 to 2007. Ms. Sukorini has a Master of Arts degree in Economics from the University of Colorado at Denver, and a degree in Economics from Satya Wacana University, Salatiga, Central Java. She has participated in many advanced professional education courses in Fiscal Policy, Risk Management and Interest Rate Market at institutes in Singapore, Washington DC, Sydney and Tokyo. She is also active as a speaker in many international meetings on Debt Management including in London, Washington DC, Tokyo and in South East Asia region.

Direksi

Board of Director



Sinthya Roesly

Direktur Utama | President Director

Sinthya Roesly adalah Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Sebelumnya, beliau bekerja di PT PLN (Persero) selama lebih dari 16 tahun dengan berbagai penugasan mulai dari keuangan korporat, pendanaan, perencanaan korporat dan strategi, komersial, operasi sistem tenaga listrik dan transmisi, serta konstruksi proyek. Selama di PLN, beliau terlibat secara penuh dalam mendapatkan pembiayaan untuk proyek-proyek PLN baik dari lembaga multilateral dan bilateral, termasuk program percepatan pembangkit 10.000 MW, serta pembiayaan dari perbankan domestik dan internasional. Beliau juga terlibat secara aktif dalam pengembangan electricity trading mechanism untuk sistem Jawa-Bali, penyiapan sistem operasi untuk IPP generasi pertama di Indonesia pada akhir tahun 1990, selain keterlibatannya dalam berbagai proses restrukturisasi korporasi dan sektor ketenagalistrikan di Indonesia pada akhir 1990an sampai awal 2000an. Sinthya Roesly pernah menjadi Ketua Kelompok Kerja untuk Energy Market Reform - World Energy Council, Indonesia National Committee dari tahun 2005 – 2006. Sinthya Roesly memiliki gelar Master of Management dari IPMI Business School dan MBA dari Monash University, Australia; gelar MEngSc dalam Power Systems dari University of New South Wales, Australia; dan gelar Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Indonesia.

Sinthya Roesly is the President Director of the Indonesia Infrastructure Guarantee Fund. Prior to her current position, Ms. Roesly worked with PT PLN (Persero), the state-owned electricity corporation for more than 16 years. Her various positions ranged from corporate finance, funding, corporate planning and strategy, commerce, transmission and power system operations, as well as project construction. In PLN, Ms. Roesly was involved in securing the financing from multilateral and bilateral agencies for PLN projects, as well as for the 10,000 MW Fast Track Program, and bank loans involving domestic and international banks. She was also actively involved in the development of the electricity trading mechanism in the Java-Bali system, setting up system for operations of the first generation of IPP in Indonesia in the late 1990s, in addition to overseeing corporate and power sector restructuring in Indonesia in the late 1990s and early 2000s. Ms. Roesly was formerly the Head of the Energy Market Reform Working Group, Indonesia National Committee - World Energy Council, 2005-2006. She holds a Master of Management degree from IPMI Business School and an MBA from Monash University, Australia; an MEngSc in Power Systems from the University of New South Wales, Australia, and a Bachelor's degree in Electrical Engineering from the University of Indonesia.



Yadi J. Ruchandi

Direktur Operasi | Director of Operations

Yadi J. Ruchandi adalah Direktur Operasi dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Sebelumnya, beliau adalah Wakil Presiden Eksekutif dari sebuah integrated logistics and aviation group dan Direktur Keuangan dari sebuah Perusahaan Penerbangan Swasta. Beliau memiliki pengalaman yang luas di bidang keuangan dan investasi perbankan, serta bekerja di berbagai perusahaan dan organisasi terkemuka termasuk Bank American-Express dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional Bank Indonesia. Beliau telah memiliki berbagai pengalaman mulai dari Merger and Acquisition, negosiasi dan restrukturisasi hutang korporat, business turnaround dan pengembangan proyek. Yadi J. Ruchandi adalah seorang Chartered Financial Analyst (CFA) dan memiliki gelar dalam bidang teknik mesin dan MBA dari Thunderbird-American Graduate School of International Management, USA.

Yadi J. Ruchandi is the Director of Operations of the Indonesia Infrastructure Guarantee Fund. Prior to his current position, he was executive vice president of an integrated logistics and aviation group and CFO of a private airline. He brings broad experience in the financial sector and investment banking from working in high-profile companies and organizations, including American-Express Bank as well as the Indonesian Bank Restructuring Agency. He has considerable deal experiences ranging from merger and acquisition, debt and corporate restructuring and negotiation, business turnaround and project development. He is a CFA holder and has a Bachelor's degree in mechanical engineering from the University of Indonesia and an MBA from Thunderbird- American Graduate School of International Management, USA.



Armand Hermawan

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Director of Finance and Risk Management

Armand Hermawan adalah Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Sebelumnya, beliau menghabiskan kehidupan profesional di perusahaan telekomunikasi raksasa Indonesia, Indosat. Jabatan terakhir beliau di Indosat adalah Senior Vice President (SVP) dan Chief of Group Controlling Office. Selama di Indosat, beliau dipercaya untuk berperan penting dalam transaksi Merger and Acquisition dan aksi korporat lainnya seperti IPO dan penerbitan obligasi syariah. Pada saat beliau di divisi corporate strategy, Indosat mendapatkan award sebagai perusahaan dengan the best strategy dari Asia Money pada tahun 2005. Beliau adalah seorang akuntan terdaftar, memperoleh gelar Master of Commerce and Management (MCM) dari University of Lincoln, NZ dan PhD di bidang keuangan dari University of Newcastle, NSW, Australia.

Armand Hermawan is the Director of Finance and Risk Management of the Indonesia Infrastructure Guarantee Fund. Previously, he spent his professional life in Indonesia's major telecommunications company PT Indosat, Tbk. His final position in Indosat was Senior Vice President (SVP) and Chief of Group Controlling Office. During his tenure in Indosat, he was entrusted to lead M&A transaction and other corporate actions including IPO and Islamic Bond Issuance. During his period in the corporate strategy division, Indosat was selected as the company with the best business strategy by Asia Money in 2005. A registered accountant, Mr. Hermawan obtained a Master's Degree in Financial Econometrics from the University of Lincoln, New Zealand, and a PhD Degree in Finance from University of Newcastle, NSW, Australia.

Profil Komite Audit

Audit Committee Profile



Ayu Sukorini

Ketua | Chairman

Profil dalam dilihat di halaman 85

(Profil Dewan Komisaris)

The Profile could be seen on page 85

(Board of Commissioners' Profile)



Iqbal Islami

Anggota | Members

Iqbal Islami adalah Anggota Komite Audit PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Sebelumnya beliau juga pernah menjabat sebagai anggota komite audit di dua BUMN dan satu perusahaan terbuka. Selain itu, saat ini beliau juga menjabat sebagai Widyaiswara di Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan setelah sebelumnya selama lebih dari 20 tahun bertugas sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Selama bertugas sebagai dosen di STAN, selain mengajar, beliau juga sering diminta untuk menjadi konsultan, dalam bidang keuangan dan akuntansi, oleh berbagai perusahaan baik BUMN, BUMD, ataupun swasta. Manajemen Strategik, Finance, dan Sistem Informasi Manajemen adalah bidang yang menjadi bidang keahliannya. Beliau adalah seorang akuntan terdaftar dan memperoleh gelar Master of Business Administration dari Case Western Reserve University, Ohio, USA.

Iqbal Islami serves as member of the Audit Committee of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) since 2012. He has previously served as member of the audit committee on two other SOEs and a listed company. Concurrently, he is a lecturer at the Training Center for the Development of Human Resources at the Ministry of Finance. Prior to this, he served for more than 20 years as a lecturer at the State Accountancy College (STAN). As a lecturer at STAN, he was often asked to provide his expertise as consultant in finance and accountancy for a number of State-Owned Enterprise, Regional-Owned Enterprise and companies from the private sector. His area of expertise includes Strategic Management, Finance and Management Information System. Iqbal Islami is a Registered Accountant and holds a Master of Business Administration degree from Case Western Reserve University, Ohio, US.

Profil Sekretaris Komisaris

Secretary to the Board of Commissioner Profile



Nuning Sri Rejeki Wulandari

Sekretaris Dewan Komisaris

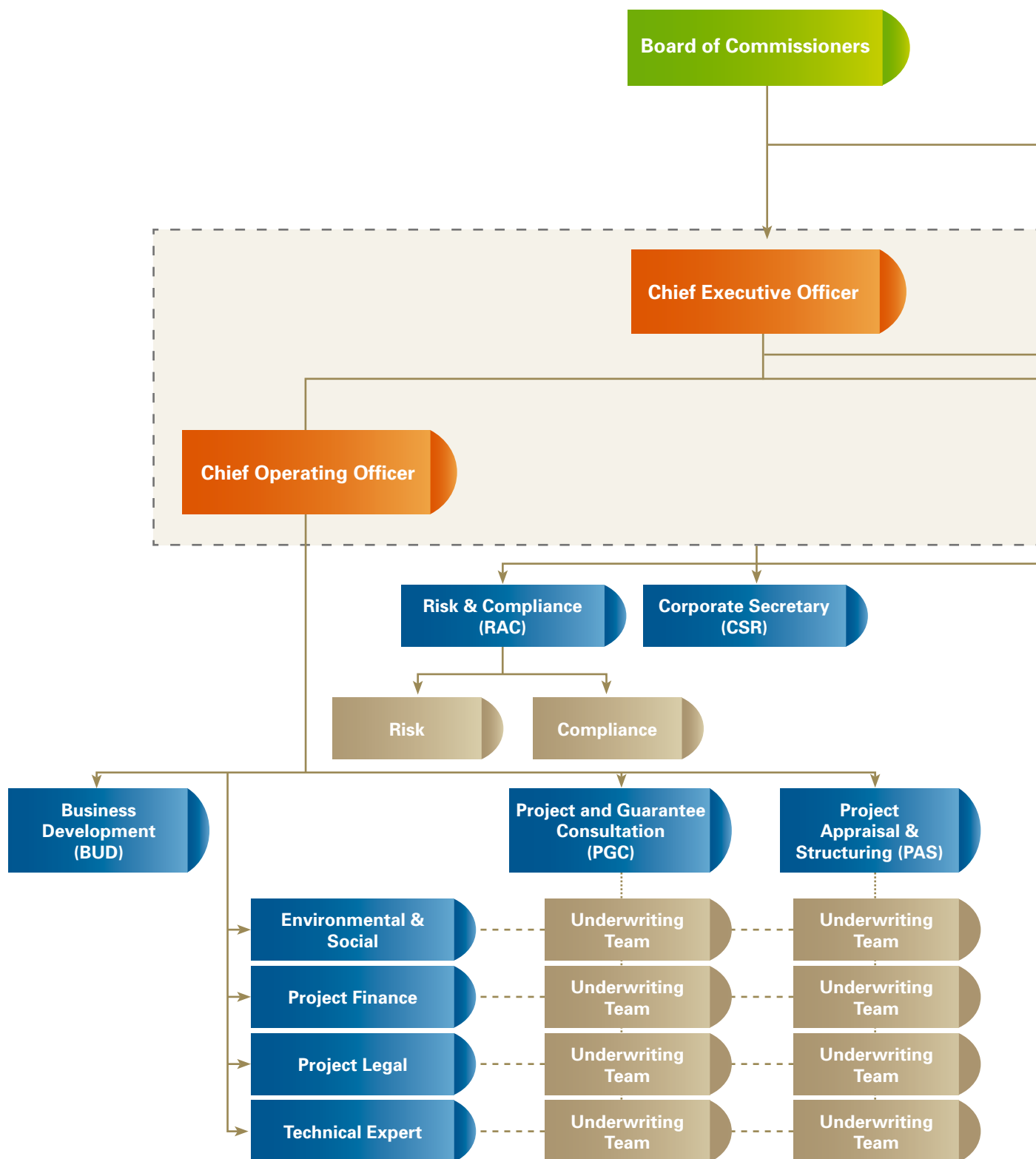
Secretary to the Board of Commissioner

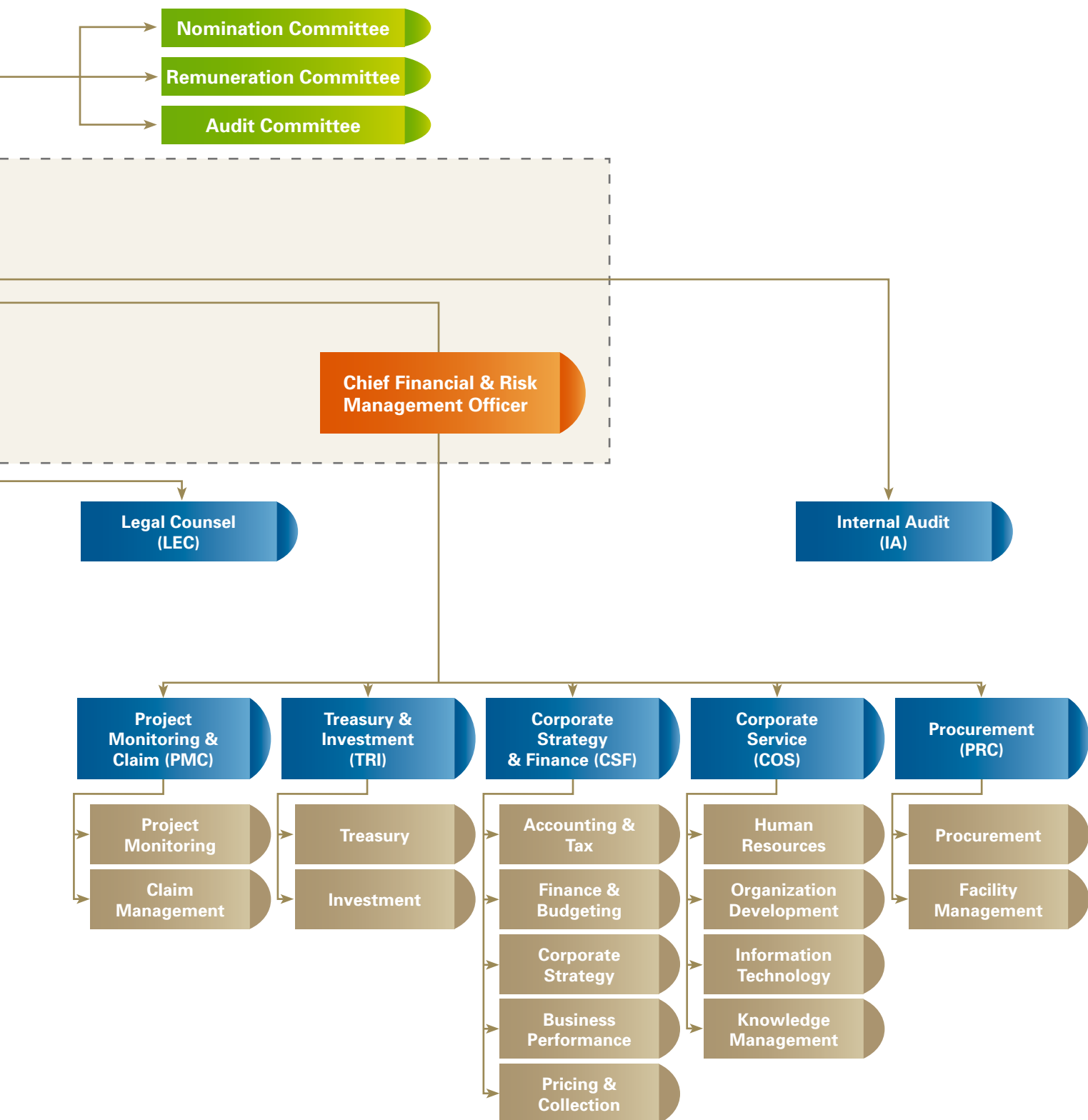
Nuning Sri Rejeki Wulandari bergabung di PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) sebagai Sekretaris Dewan Komisaris sejak pertengahan tahun 2011. Wanita kelahiran Bogor, 6 Juli 1963 ini memperoleh gelar Insinyurnya dari Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor pada tahun 1987. Kemudian beliau memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) setelah menyelesaikan studinya di University of Detroit, Michigan, USA, pada tahun 1994. Saat ini, peserta berbagai macam pelatihan termasuk di antaranya Technical Cooperation for Maximizing of State Asset Management through Strengthening Institutional Capacity (JICA, 2011) ini sedang menjabat sebagai Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan. Di Kementerian Keuangan, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Subbagian Kelembagaan, Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Bapepam-LK (2002-2006) dan Kepala Bagian Kepegawaian, Bapepam-LK (2006-2009). Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Kepegawaian, DJKN (2009-2011) yang kemudian dilanjutkan menjabat sebagai Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan, DJKN (2011-2012).

Nuning Sri Rejeki Wulandari joined PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) as Secretary of the Board in mid 2011. Born in Bogor, on Juli 6, 1963, she obtained a Bachelor degree from the Faculty of Agriculture, Bogor Institute of Agriculture, in 1987. Next, she obtained a Master of Business Administration (MBA) degree after finishing her study at University of Detroit, Michigan, US, in 1994. She has also attended a number of training courses and workshops including Technical Cooperation for Maximizing of State Asset Management through Strengthening Institutional Capacity (JICA, 2011). Concurrently, she serves as Reviewer Staff of Policy Alignment at the Directorate General of State Assets (DJKN), the Ministry of Finance (MoF). At the MoF, she previously served as Head of Sub-Unit Institutional, Organization and Governance, Bapepam-LK (2000 - 2006) and Head of Employee Administration Unit, Bapepam-LK (2006 - 2009). She has also served as Head of Employee Administration Unit, DJKN (2009 - 2001) and as Review Staff for Restructuring, Privatization and State Assets Separation Effectiveness at the DJKN (2011 - 2012).

Struktur Organisasi

Organization Structure





This page is intentionally left blank
Halaman ini sengaja dikosongkan



**PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero)
Indonesia Infrastructure Guarantee Fund**

Sampoerna Strategic Square
North Tower 14th floor
Jl Jenderal Sudirman Kav.45-46
Jakarta 12930 Indonesia
Telp: +62 21 57950550
Fax : +62 21 57950040
info@iigf.co.id
www.iigf.co.id



iigf official



@iigfofficial